



PROSIDING SEMINAR NASIONAL

# 90 TAHUN SUMPAH Pemuda



Para Penulis

Dr. Anatona, M.Hum

Dr. Nopriyasman, M.Hum

Dr. Midawati, M.Hum

Dra. Irianna, M.Hum

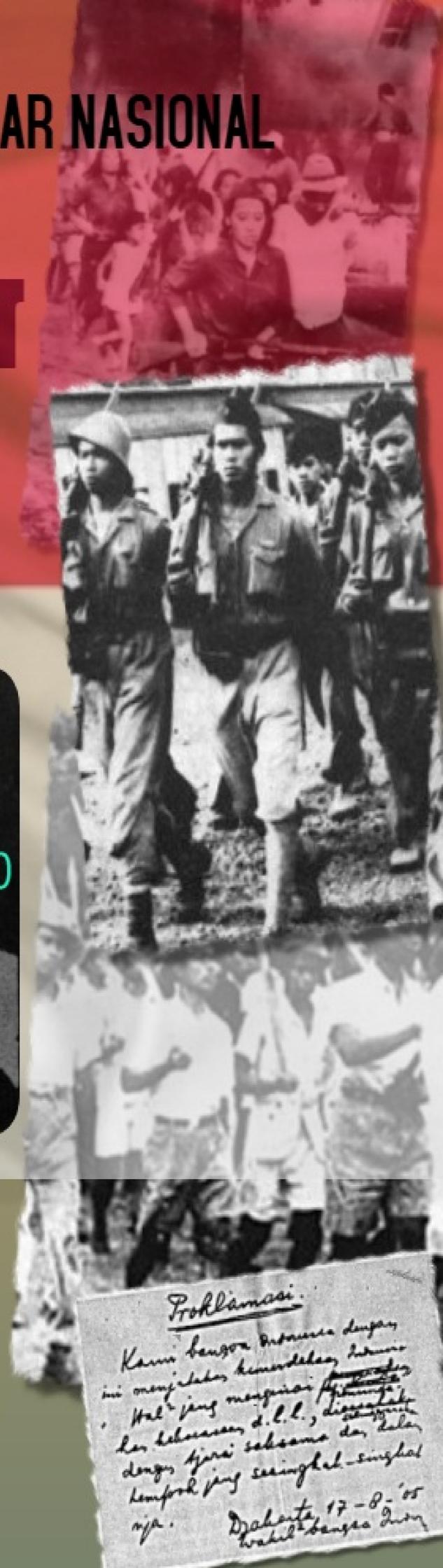
Israr Iskandar, S.S., M.Si

Drs. Sabar, M.Hum

Yudhi Andoni, S.S., M.A

Ana F. Ramadhani, S.S.M.A

Wahyu Suri Yani, S.Hum



Proklamasi.  
Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan, seluruh tanah yang merdeka, bersatu, berkesatuan, dan berkeadilan, dengan jiwa dan raga, dan kelompok yang seinghal-singhal nja.  
Dibaca, 17-8-'05  
Wakil bangsa Indonesia

90 TAHUN SUMPAH PEMUDA  
(1928-2018)  
Memperkuat Komitmen Keindonesiaan di Era G. 4.0

Editor  
Yudhi Andoni, S.S., M.A

Labor Sejarah  
Universitas Andalas  
2018

90 TAHUN Sumpah Pemuda (1928-2018): Memperkuat Komitmen  
Keindonesiaan di Era G. 4.0  
© Yudhi Andoni (ed), 2018

Cetakan pertama, 2018  
vi + 139 halaman  
21 x 15 cm  
ISBN 978-602-72301-6-3

Diterbitkan pertama kali oleh  
**Labor Sejarah**  
**Universitas Andalas**  
**Lt. II Gedung FIB Kampus Limau Manis, Padang**  
**Telp. 075171227**



## Daftar Isi

Daftar Isi .....	i
Kata Pengantar .....	iii
<i>Ruang dan Pariwisata Kota Bukittinggi</i> .....	1
<b>Ana F. Ramadhani dan Yella Arimadea Saragih</b> <i>Dari Mitos Hingga Realitas: Sejarah Gempa Bumi dan Tsunami di Pulau Nias</i> .....	27
<b>Anatona, Sabar, Riski Syukri Zalukhu</b> <i>Pelestarian Kesenian Tradisional Minangkabau di SMK Negeri 7 Padang Tahun 1997-2017</i> .....	41
<b>Irianna, Risa Junita Sari, Putri Anggita Sembiring</b> <i>Relasi BUMN dan Masyarakat Adat di Sumatera Barat PT Semen Padang dan PT BA UPO</i> .....	53
<b>Israr, Lindayanti</b> <i>Feminisasi Peran Perempuan dalam Pertanian Hortikultura di Nagari Alahan Panjang Kabupaten Solok</i> .....	67
<b>Midawati, Purwo Husodo</b> <i>Merajut Keindonesiaan: Pengalaman Politik Masyarakat Sungai Pagu dan Sangir Membangun “Rasa SolokSelatan”</i> .....	91
<b>Nopriyasman, Syafrizal, Armansyah</b> <i>Dinamika Sistem Pemerintahan dan Perlawanan Rakyat Nias Pada Masa Kolonial Belanda</i> .....	107
<b>Sabar, Anatona, Purwo Husodo, Riski Syukri Zalukhu</b> <i>Pesona Pariwisata Minangkabau Pedalaman Sebagai Mooi Indie Pada Masa Kolonial Belanda (1900-1942)</i> .....	129
<b>Wahyu Suri Yani</b> <i>Konstruksi Keindonesiaan di Sumatera Barat Pada 1950an</i> .....	149
<b>Yudhi Andoni, Alex Darmawan</b>	



## Kata Pengantar

SEGALA puji kami ucapkan hanya kepada Allah, Tuhan Semesta Alam. Atas rahmat dan karunia-Nya kepada kami, telah pula memudahkan kami menyelesaikan satu pekerjaan mulia, menyunting karya-karya para sejarawan masa depan Indonesia sehingga dapat hadir dalam bentuk buku ini. Salam teriring salawat juga kami sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang membuka jalan pencerahan kepada sekalian umat manusia.

Buku ini lahir dari sebuah konferensi nasional dengan tema sejarah, yakni memperingati 90 Tahun Sumpah Pemuda (1928-2018). Peringatan Sumpah Pemuda pada tahun ini begitu berarti ketika komitmen keindonesian tengah dirundung ketiadayakinan terhadap hari depan Negara-bangsa yang kita cintai ini. Sumpah Pemuda pada galibnya masa 90 tahun lalu adalah satu “penandatanganan” komitmen keindonesiaan kita. Namun setelah masa bergulir keindonesiaan kita berada di titik nadir.

Penegasan pada satu tanah air, satu bangsa, dan menjunjung bahasa persatuan dirampas oleh konflik verbalis sesama anak bangsa. Hoaks bertebaran, menciptakan kebencian kita sesama kita. Ketidakpercayaan di antara para elite nasional merapuhkan pilar-pilar kebangsaan. Masyarakat terpolarisasi demi kepentingan sesaat. Maka dari itu, konferensi ini bertujuan mengingatkan kembali komitmen keindonesiaan itu.

Kami mengucapkan terima kasih kepada para pemateri konferensi. Tidak banyak teknis dari penyuntingan teks/ makalah yang dapat kami lakukan. Hal itu tidak lain karena para pemateri adalah para penulis mumpuni. Harapan kami semoga karya-karya dalam buku ini dapat bermanfaat di masa datang. Semoga.

Editor  
YA

# Ruang dan Pariwisata Kota Bukittinggi

Ana Fitri Ramadani, S.S., M.A., Yella Arimadea Saragih

## Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang pola perubahan ruang dalam pariwisata di Bukittinggi, terutama mencoba mengkhususkan kepada perubahan lahan parkir di sekitaran kawasan pariwisata Pasar Atas Bukittinggi. Sempitnya lahan yang ada di kawasan Pasar Atas membuat pemerintah kota Bukittinggi berinisiatif untuk merubah fungsi ruang umum menjadi lahan parkir dan juga kemudian membangun sebuah lahan parkir modern di kawasan Pasar Atas. Perubahan lahan yang terjadi tersebut tentu pada akhirnya akan berdampak atau berpengaruh kepada beberapa hal. Pertama terkait dengan kebijakan pemerintah terhadap tata ruang kota, terutama pada daerah kawasan wisata Pasar Atas Bukittinggi. Kedua, tentu saja kepada masyarakat yang berada disekitar kawasan wisata Pasar Atas Bukittinggi, baik itu para pedagang, tukang parkir, masyarakat yang tinggal disekitaran kawasan wisata tersebut dan para wisatawan yang berkunjung. Penelitian ini mencoba membatasi pada perubahan dan pengaruh perubahan ruang pada pariwisata di Bukittinggi. Bagaimana proses pembentukan dan perubahan ruang kota terutama untuk sarana perparkiran di kawasan Pasar Atas Kota Bukittinggi? Data yang diperoleh merupakan hasil dari penggalan informasi melalui data-data sejarah, pertama sumber setempat dan sejamin, kedua sumber setempat dan tidak sejamin. Wawancara dengan para informan yang memiliki hubungan terkait permasalahan dalam penelitian ini.

Kata Kunci : Kota, Ruang Kota, Pariwisata, Bukittinggi.

## **A. Pendahuluan**

### **1.1. Latar Belakang**

Berbicara mengenai sebuah kota yang akan tergambar petama kali dalam benak kita adalah sebuah daerah yang padat dan dipengaruhi oleh sebuah modernitas, dihuni oleh masyarakat yang heterogen dengan semua prasarana dan sarana yang memadai bagi masyarakat yang menetap didalamnya. Melville mengungkapkan<sup>1</sup> bahwasannya dalam pembentukan sebuah kota pertimbangan dari kondisi geografis dimana kota tersebut berada, bukan hanya merupakan sebuah pertimbangan yang esensiil. Akan tetapi, keadaan ini nantinya akan mempengaruhi fungsi dan bentuk bagi fisik kota itu sendiri. Seperti kota Surabaya yang berada di wilayah pesisir pantai Jawa yang kemudian berkembang menjadi sebuah kota perdagangan. Begitu pula perkembangan kota-kota di wilayah Sumatra Barat, ini tidak terlepas dari keberadaan kondisi geografis nya. Contohnya saja Kota Bukittinggi, yang sampai saat sekarang terkenal sebagai kota tujuan wisata.

Kota Bukittinggi<sup>2</sup> merupakan daerah yang terletak pada kawasan dataran tinggi Sumatera Barat. Jarak antara ibukota propinsi Sumatera Barat dengan kota ini berkisar 120 km. Selain memiliki peranan penting dalam sejarah Indonesia, kota ini juga terkenal dengan keeksotikan alam dan cuacanya yang sejuk. Hal ini menjadikan Bukittinggi sebagai sebuah pusat kunjungan wisata di Sumatra Barat.

Pemerintah Kota Bukittinggi kemudian memulai langkah untuk mewujudkan keinginan tersebut dengan menjadikan kota Bukittinggi sebagai sebuah kawasan pusat pariwisata, salah satunya adalah menjadikan Pasar Atas sebagai poros utama untuk kunjungan para wisatawan. Pasar Atas yang dahulunya merupakan pasar anak nagari dan kemudian berkembang menjadi pasar utama memiliki letak yang sangat strategis untuk kawasan pusat

pariwisata. Hal ini dapat terlihat dari letaknya yang diapit oleh beberapa objek wisata utama Bukittinggi yaitu Kebun Binatang, Benteng *Fort de Kock* dan Panorama *Ngarai Sianok*. Letak ketiga objek wisata ini pun dapat ditempuh dengan berjalan kaki dari kawasan Pasar Atas.

Perkembangan perdagangan dan fasilitas transportasi menjadi salah satu latarbelakang pemerintah Kota Bukittinggi untuk memperkenalkan pengembangan kompleks perbelanjaan modern di Pasar Atas. Kegiatan tersebut merupakan wujud dari program peningkatan pasar yang dilaksanakan pada tahun 1970 di Propinsi Sumatra Barat.<sup>3</sup> Hal ini semakin terlihat ketika terjadi peristiwa kebakaran di Pasar Atas pada tahun 1972. Pemerintah kota Bukittinggi kemudian berinisiatif untuk membangun kembali Pasar Atas yang ditargetkan menjadi sebuah pusat pertokoan yang permanen seperti Pasar Klewer yang ada di Solo.<sup>4</sup> Hal ini memperlihatkan bahwasannya mulai pada tahun 1970an Pasar Atas Bukittinggi telah dijadikan sebagai poros utama dalam peningkatan pariwisata dan peerekonomian bagi Kota Bukittinggi.

Program pemerintah ini semakin berkembang, setelah adanya Rencana Induk/ *Master Plan* pada tahun 1984-2004 yang membawa dampak dan pengaruh yang besar bagi perkembangan Kota Bukittinggi nantinya. Program ini juga menunjang tujuan utama pemerintah Kota Bukittinggi untuk mewujudkan tujuan menjadikan kota Bukittinggi sebagai kota wisata pada tahun 1984.<sup>5</sup>

Perkembangan kunjungan para wisatawan yang datang ke Bukittinggi terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dapat dilihat pada 1984 jumlah wisatawan yang datang ke Bukittinggi sebanyak 3.938 orang dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 1997 sebanyak 108.694 orang baik wisatawan domestik maupun internasional. Akan tetapi, angka ini mengalami penurunan pada tahun 1999 menjadi 98.425 orang yang

## *Memperkuat Komitmen Keindonesiaan di Era G. 4.0*

disebabkan faktor krisis keuangan pada saat itu.<sup>6</sup> Saat ini perkembangan untuk kunjungan wisatawan ke daerah Bukittinggi kembali mengalami peningkatan, data statistik tahun 2015 menunjukkan setidaknya sekitar 333.127 orang telah mengunjungi Bukittinggi, baik itu wisatawan domestik maupun internasional.<sup>7</sup>

Peningkatan kunjungan wisatawan ke Bukittinggi kemudian juga mempengaruhi kebutuhan akan ruang, terutama dalam kebutuhan ruang parkir. Permasalahan ini kemudian memunculkan sebuah kebijakan dari pemerintah untuk membangun dan memanfaatkan area-area kosong sebagai lahan parkir disekitar kawasan wisata terutama kisaran Pasar Atas. Minimnya lahan parkir untuk area wisata kota Bukittinggi salah satunya dapat dilihat dari permasalahan parkir disekitaran kawasan objek wisata Taman Panorama dan Lobang Jepang, dimana perpakiran dilakukan pada bahu jalan. Hal ini menimbulkan rasa ketidaknyamanan kepada para pengunjung.<sup>8</sup> Penggunaan bahu jalan ini sebagai area parkir tidak lain dikarenakan kecilnya ruang yang ada di kawasan Pasar Atas dan sekeliling daerah objek wisata di Bukittinggi.

Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah kota Bukittinggi kemudian membangun fasilitas-fasilitas parkir dengan memanfaatkan area atau ruang terbuka yang ada di sekitaran kawasan Pasar Atas. Hal ini terlihat dengan disterilisasinya area jalan utama didepan dan sebelah timur Jam Gadang yang pada awalnya dapat dilalui oleh kendaraan, kemudian ditutup dan dijadikan sebagai lahan parkir kendaraan. Bukan hanya itu saja, pemerintah Kota Bukittinggi kemudian membangun sebuah gedung parkir dengan alokasi dana Rp. 16,8 miliar. Gedung parkir tersebut berlokasi di kawasan Jalan Soekarno-Hatta tepatnya berada di sebelah kantor Jasa Raharja.<sup>9</sup> Pembangunan gedung parkir tersebut dilaksanakan pada tahun 2012, ditandai dengan

pemancangan tiang perdana yang disaksikan langsung oleh Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno bersama Walikota Bukittinggi Ismet Azis dan Ketua DPRD Sumatra Barat Yultekhnil.<sup>10</sup>

Pembangunan sarana dan prasarana terutama dalam pengembangan lahan parkir dalam ruang kota tentunya akan selalu menimbulkan sisi positif dan negatif. Pada satu sisi ada sebuah keuntungan yang akan dihasilkan oleh pemerintah kota bagi kesejahteraan perekonomian kota dan masyarakat, namun tidak jarang di sisi lain akan ada sisi-sisi yang terpinggirkan. Sisi ini tidak lain adalah masyarakat marginal yang berada atau memanfaatkan ruang kota tersebut bagi kehidupan mereka. Hal-hal tersebut yang kemudian ingin coba untuk dilihat melalui penelitian **“Ruang dan Pariwisata Kota Bukittinggi”**.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Penelitian ini akan mencoba melihat perubahan fungsi dan pengembangan ruang kota yang ada di sekitar kawasan Pasar Atas terutama dalam permasalahan pembangunan dan perkembangan lahan parkir. Adapun masalah yang akan coba dilihat pada penelitian ini adalah: Bagaimana proses pembentukan dan perubahan ruang kota terutama untuk sarana perparkiran di kawasan Pasar Atas Kota Bukittinggi?.

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat sejauh mana pengaruh perubahan ruang kota terutama untuk penggunaan lahan parkir bagi pariwisata Bukittinggi. Selain itu juga ingin melihat dampak perubahan ruang kota tersebut terhadap kehidupan masyarakat yang baik yang menetap maupun yang bekerja disekitaran wilayah ruang kota tersebut.

## **B. Tinjauan Pustaka**

Purnawan menyatakan bahwasannya kota merupakan sebuah wadah dari berbagai aspek kehidupan yang sangat kompleks, dimana penggambaran mengenai sebuah kota sangat rumit jika dilihat dari sudut pandang teoritisnya. Hal ini disebabkan karena dalam melihat dan menafsirkan sebuah kota dapat diangkat dari berbagai macam sudut pandang.<sup>11</sup>

Sejalan dengan Hadi Sabari yang menyatakan bahwasannya kota merupakan pusat dari kegiatan politik, ekonomi, sosial dan kultural yang memiliki warna tersendiri atas kegiatan-kegiatan tersebut. Hanya saja, suatu penonjolan dan corak tertentu seringkali terlihat dengan jelas. Hal tersebut berkaitan dengan latar belakang dari terjadinya sebuah kota, yakni dari segi ekonomi, politik, kultural dan fisik keruagannya.<sup>12</sup>

Permasalahan ini yang kemudian coba dilihat oleh Zulqayyim<sup>13</sup> dalam melihat perkembangan kota Bukittinggi melalui sudut pandang sosial-ekonomi. Pada awalnya Bukittinggi dikembangkan oleh pemerintah Kolonial Belanda sebagai sebuah pusat pemerintahan kedua di wilayah Sumatra Barat setelah Padang. Pasar merupakan unsur utama dalam perkembangan kota Bukittinggi yang menjadikan daerah tersebut kemudian berkembang menjadi pusat pendidikan dan pergerakan nasional di Sumatra Barat.

Kota sebagai sebuah ruangan yang dinamis memiliki berbagai dimensi kehidupan yang saling terkait dan saling menjalin (*interdependence*). Perubahan yang terjadi dalam salah satu dimensi akan membawa pengaruh terhadap dimensi lainnya. Pengaruh tersebut dapat membawa kepada hal yang positif dan juga negatif. Apabila dinamika sebuah kota memberi pengaruh negatif pada salah satu dimensi, maka eksistensi dimensi lainnya akan menjadi

terganggu, pada akhirnya gejala-gejala sosial maupun gejala-gejala sosial muncul dengan sendirinya.<sup>14</sup>

Hal ini lah yang kemudian coba dilihat oleh Melisa<sup>15</sup> pada permasalahan keruangan kota Palembang. Jembatan Ampera yang merupakan icon dari kota Palembang merupakan suatu bentuk transformasi keruangan, yakni ruang air ke ruang darat. Perubahan fungsi keruangan kota ini menimbulkan perubahan di segala bidang, terutama dalam bidang perdagangan, dimana Palembang selalu dicitrakan sebagai sebuah kota yang berlandaskan kepada ekonomi sungai.

Selain itu Jonny Wongso dan Syed Zainol Abidin Idid<sup>16</sup> melihat sisi perubahan keruangan kota Bukittinggi dari masa ke masa. Dimana jika pada masa pemerintahan kolonial Bukittinggi dijadikan sebagai sebuah daerah pusat pemerintahan kedua, setelah kemerdekaan peran ini bertambah menjadi sebuah daerah tujuan wisata. Ini terlihat dengan dipindahkannya kawasan pusat pemerintahan dan perkantoran dari daerah Pasar Atas ke daerah Belakang Balok, sementara kawasan Pasar Atas kemudian dijadikan sebagai sebuah pusat pariwisata dan perekonomian kota Bukittinggi.

Salah satu aspek dari ruang publik yang kemudian digambarkan oleh Rezi Kurnia Putri<sup>17</sup> adalah penggunaan ruang umum terbuka bagi khalayak ramai dengan adanya aspek aksesibilitas aktif dan pasif. Salah satu permasalahan yang disorot dalam tulisan ini adalah bagaimana ruang kota yaitu sempitnya lahan parkir pada kawasan pariwisata kota Bukittinggi yang kemudian menjadikan bahu jalan dimanfaatkan sebagai lahan parkir.

Selanjutnya ada tulisan dari Trisno Edward<sup>18</sup> melihat bagaimana perkembangan pariwisata di Kota Bukittinggi. Peran

## *Memperkuat Komitmen Keindonesiaan di Era G. 4.0*

dari masyarakat dan pemerintah daerah sangat besar di dalam pengembangan potensi pariwisata Bukittinggi.

### **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian dan penulisan ini adalah metode sejarah. Metode sejarah terdiri dari 4 langkah, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan penulisan (historiografi). Heuristik adalah usaha untuk mencari dan menemukan sumber-sumber sejarah yang berisi informasi tentang sejarah pertumbuhan dan perkembangan Kota Bukittinggi. Untuk itu tahap heuristik dapat dibedakan atas 3 penelitian, yaitu studi kearsipan, studi kepustakaan, dan wawancara.

Studi kearsipan dan kepustakaan akan dilaksanakan di Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Propinsi Sumatra Barat, Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bukittinggi, Perpustakaan Bung Hatta Bukittinggi. Untuk wawancara akan dilaksanakan dengan informan yang memiliki hubungan terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan sebagai pendukung dari data-data yang telah didapatkan.

Kedua, tahap kritik sumber sejarah yaitu melakukan analisis terhadap informasi yang diperoleh, baik dari arsip, pustaka, maupun hasil wawancara, sehingga didapatkan data yang valid dan terpercaya untuk kemudian dijadikan fakta sejarah. Selanjutnya, pada tahap ketiga, berbagai fakta sejarah yang telah didapatkan tersebut diinterpretasikan dan disintesis (menggabungkan dan menghubungkan) dalam tema penelitian ini.

Terakhir adalah tahap penulisan (historiografi) dalam bentuk laporan penelitian dengan judul **“Ruang dan Pariwisata Kota Bukittinggi”**.

#### D. Pembahasan

*Enam bulan lamanya saja tinggal di Bukittinggi, lebih lama dari jang terderitakan oleh saja. Badan saja menderita ditekan oleh hawa Luhak Agam jang menusuk tulang dinginnja. Biarpun makan tjukup, dan setiap hari dilingkungi tamasja jang permai di kaki Merapi dan Singgalang, saja selalu penjakitan. (Muhammad Radjab, 1958)*

Muhammad Radjab pernah mengisahkan mengenai perjalanannya ke wilayah Sumatera terutama Sumatera Barat pada tahun 1958. Beberapa daerah ia kunjungi pada kurun waktu tersebut dalam rangka melaksanakan tugas. Salah satu daerah yang dikunjungi dan didiaminya dengan cukup lama adalah wilayah Bukittinggi. Ia membuat beberapa catatan-catatan penting sewaktu di daerah ini.

Kutipan tulisan di atas merupakan salah satu goresan catatan perjalanannya sewaktu mengunjungi dan bermalam di Bukittinggi. Daerah yang masuk ke dalam Luhak Agam dalam tataran wilayah adat Minangkabau tersebut digambarkan oleh Muhammad Radjab dengan daerah yang bersuhu dingin. Hal tersebut dikarenakan letaknya yang berada pada daerah ketinggian bukit dan juga diapit oleh dua gunung yaitu Gunung Merapi dan Gunung Singgalang.

Dikarenakan kondisi geografisnya ini, Bukittinggi juga dianugrahi oleh Tuhan dengan kawasan daerah yang sangat permai. Daerah-daerah tersebut sangat indah dijadikan sebagai sarana tamasya oleh orang-orang, disamping didukung oleh cuaca yang sejuk.

Kondisi tersebut pula yang kemudian menjadi daya tarik bagi bangsa Belanda dahulunya untuk menjadikan daerah Bukittinggi sebagai kawasan benteng pertahanan, pusat pemerintahan dan

## *Memperkuat Komitmen Keindonesiaan di Era G. 4.0*

daerah peristirahatan. Untuk memnuhi kebutuhan akan sarana dan prasana bagi jalannya sistem pemerintahan kolonial di Bukittinggi, maka pemerintah Belanda kemudian membangun benteng, pasar, sekolah-sekolah dan juga sebuah jam raksasa yang berada tepat di kawasan pusat kota dan tertinggi di Bukittinggi.

**Gambar 1**  
**Gunung Merapi di Lihat dari Bukittinggi Tahun 1920**



Sumber: <https://digitalcollections.universiteitleiden.nl>

Gambar di atas memperlihatkan bagaimana keelokan dari alam Bukittinggi pada tahun 1920. Sudah terlihat bangunan rumah modern Belanda yang didepannya disuguhkan pemandangan areal persawahan nan luas dan kemudian gunung merapi yang menjulang yang sedang mengeluarkan asap. Keelokan ini pulalah yang kemudian menjadikan Bukittinggi mendapatkan slogan sebagai *Paris van Java* di wilayah Sumatera. Selain itu hingga saat ini Bukittinggi juga masih sangat identik dengan dunia pariwisatanya.

Bercerita mengenai Bukittinggi tidak akan terlepas dari kisah nya sebagai sebuah kota kolonial yang kemudian berkembang menjadi daerah wisata. Pariwisata di Bukittinggi seolah-oleh telah menjadi sebuah magnet bagi masyarakat setempat ataupun bagi para pelancong yang datang dari luar daerah. Keelokan alam dan kesejukan udara kota ini menjadi nilai jual yang sangat ampuh terhadap wisatawan.

Jika berbicara mengenai wisata Bukittinggi kita tidak bisa terlepas dari sejarah kota tersebut dan sejarah perkembangan pariwisatanya. Karena ketiga hal ini sangat saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Kenapa demikian? Karena sejarah berkembangnya pariwisata di Bukittinggi tidak dapat dilepaskan oleh peranan orang-orang Belanda yang datang ke daerah tersebut dan kemudian membangun sebuah pemukiman dan sarana-prasarana untuk kebutuhan hidup mereka.

Nopriyasman<sup>19</sup> mengungkapkan dalam sebuah tulisannya bahwasannya pada masa kolonial Belanda telah banyak nya para pelancong yang datang terutama ke daerah Sumatera. Kedatangan tersebut bukan saja terkait dengan perdagangan dan penelitian, namun juga didasari oleh kebutuhan akan hiburan atau tamasya. Hal tersebut juga lah yang tergambar dengan dibentuknya kota Bukittinggi sebagai salah satu kawasan peristirahatan bagi orang-orang Belanda yang ada di Sumatra Barat pada masa kolonial.

Menerik jauh kedepan untuk perkembangan kota Bukittinggi setelah kemerdekaan, ternyata peranan kota ini sebagai sebuah kota wisata masih melekat hingga saat ini. Salah satunya adalah dengan berkembangnya Pasar Atas sebagai sentral atau titik utama dari pusat wisata di Bukittinggi.

### **A. Pasar Atas dan Keberadaan Pariwisata Bukittinggi**

Pasar Atas yang berada tepat di pusat jantung kota Bukittinggi yang berada didaerah tertinggi di kawasan kota Bukittinggi,<sup>20</sup> merupakan cikal bakal dari pembangunan sebuah kota Bukittinggi dahulunya. Pada awalnya Pasar Atas merupakan sebuah pasar tradisional masyarakat Agam sebelum masuknya pemerintah kolonial Belanda. Setelah pemerintah kolonial Belanda masuk ke kawasan darek dan mendirikan pusat pemerintahan di Bukittinggi, pemerintah kolonial kemudian mengembangkan pasar tersebut dengan membangun los-los untuk para pedagang.

**Gambar 2**  
**Perkampungan Cina di Bukittinggi 1935**



Sumber: <https://digitalcollections.universiteitleiden.nl>

Untuk masyarakat yang berdagang di Pasar Atas tersebut selain pedagang pribumi, pemerintah kolonial Belanda kemudian juga memberikan izin kepada pedagang Cina dan India (orang Keling). Mereka kemudian diberikan hak istimewa untuk membangun kios dan rumah disekitar kawasan tersebut.

Posisi Pasar Atas tersebut juga semakin strategis untuk dimanfaatkan sebagai kawasan pariwisata tidak lain dikarenakan ia berada dilokasi yang amat sangat mudah dijangkau dari objek wisata utama Bukittinggi. Lokasi Pasar Atas terletak ditengah-tengah antara Kebun Binatang, Benteng Fort de Kock dan Ngarai Sianok. Untuk menempuh objek pariwisata tersebut dari Pasar Atas, para wisatawan bisa saja dengan berjalan kaki.

Untuk mencapai Kebun Binatang Bukittinggi para wisatawan cukup hanya berjalan sekitar lima menit saja dari Pasar Atas. Nah dari kawasan objek wisata tersebut nantinya para wisatawan dapat langsung menuju Benteng Fort de Kock dengan menyeberangi Jembatan Limpapeh yang berada didalam lingkungan Kebun Binatang Bukittinggi.

Selain itu jika wisatawan hendak menuju objek wisata Ngarai Sianok, para wisatawan dapat berjalan kaki sekitar lebih kurang 2 Km dari Pasar Atas. Selalin bisa menikmati keindahan ngarai nantinya, para wisatawan juga dapat mengunjungi Lobang Jepang yang berada di area objek Wisata Ngarai Sianok. Lobang Jepang tersebut dahulunya adalah sebuah lobang yang dibangun pada masa pendudukan Jepang di Bukittinggi. Lobang tersebut dipergunakan sebagai tempat bersembunyi atau berlindungnya tentara Jepang dalam peperangan.

Selain itu, jika wisatawan ingin berehat sejenak mereka dapat menikmati kejayaan masa lalu yang masih berdiri megah di depan Pasar Atas Bukittinggi. Mereka dapat melepas penat dan berfoto dikawasan Jam Gadang, sebuah menara jam yang dibangun pada masa pemerintahan Kolonial Belanda.

Pada tahun 1984, Pemerintah Kota Bukittinggi mencanangkan Kota Bukittinggi sebagai Kota Pariwisata dan kemudian ditunjang dengan menjadikan Pasar Atas sebagai sebuah Pasar Pariwisata.<sup>21</sup> Dijadikannya Pasar Atas sebagai sebuah Pasar

## *Memperkuat Komitmen Keindonesiaan di Era G. 4.0*

Pariwisata tidak lalin dilatarbelakangi oleh posisinya yang strategis terhadap objek-objek pariwisata utama di Bukittinggi. Selain itu, ini juga akan menjadi nilai pendorong dalam menarik para wisatawan untuk berkunjung ke Bukittinggi baik wisatawan domestik maupun internasional.

Demi menunjang program tersebut, Pemerintah Daerah Bukittinggi kemudian melakukan penataan terhadap kawasan perdagangan. Contohnya dalam hal penertiban pedagang kaki lima, penataan taman yang berada di kawasan Jam Gadang, kemudian juga dengan membuat peraturan kepada para pedagang untuk menjaga dan membersihkan kawasan atau areal sekitar tempat mereka berdagang.<sup>22</sup>

### **B. Pariwisata dan Ruang Kota Bukittinggi**

Kegiatan untuk pengembangan pariwisata dalam suatu wilayah selain berkaitan erat dengan kebijakan dan program pemerintah daerah itu sendiri, juga memiliki dampak terhadap pembentukan dan perubahan pola ruang kota yang ada didaerah tersebut. Hal ini juga dialami oleh kota Bukittinggi sendiri. Intensitas kedatangan para wisatawan yang cukup padat ke kota ini, kemudian menjadikan pemerintah kota Bukittinggi mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru untuk menunjang perkembangan pariwisata tersebut.

Sesuai yang diutarakan oleh Desi Arianti<sup>23</sup> bahwasannya keterkaitan yang terjadi diantara satu sektor pariwisata dengan sektor pariwisata lainnya yang berada di kawasan pusat kota Bukittinggi, secara spasial telah menjadi sebuah magnet untuk menarik sektor-sektor lain yang terkait dengan pariwisata untuk berlokasi mendekati objek wisata yang ada tersebut.

Salah satu permasalahan yang muncul sesuai dengan uraian diatas adalah mengenai wilayah perparkiran. Daerah Kota

Bukittinggi yang kecil, terlebih sebagai sebuah daerah yang menjadi tujuan utama para wisatawan menimbulkan suatu permasalahan yang tak kunjung reda diantara pemerintah dan masyarakat. Permasalahan tersebut adalah mengenai ketersediaan lahan parkir. Permasalahan ini juga akan berdampak terhadap perubahan ruang kota yang ada disekitaran kawasan wisata terutama Pasar Atas.

**Gambar 3**  
**Terminal Bemo di Pasar Atas Tahun 1970**



Sumber: <https://opinikoe.com/potret-ranah-minang-tempo-dulu/> diakses pada tanggal 15 Maret 2018, pukul 19.49

Selama kurun waktu 1970 hingga 2015 pola perubahan ruang di kawasan pasar atas sudah banyak mengalami perubahan. Pada tahun 1970 kawasan Pasar Atas selain menjadi sebuah kawasan pusat pertokoan, dikawasan ini juga terdapat sebuah terminal dahulunya. Terminal tersebut dahulunya terletak didepan Jam Gadang. Dahulunya terminal dikawasan Pasar Atas tersebut adalah kawasan untuk terminal bus dalam kota dan luar kota.<sup>24</sup> Kemudian terminal bus tersebut dipindahkan ke daerah Pasar

## *Memperkuat Komitmen Keindonesiaan di Era G. 4.0*

Banto pada kisaran waktu 1971. Akan tetapi, pada kisaran waktu 1980 terminal bus yang tadinya berada di wilayah Pasar Banto dipindahkan oleh pemerintah kota Bukittinggi ke kawasan Aur Kuning.<sup>25</sup> Dimana dikawasan Aur Kuning ini sampai saat ini dijadikan sebagai terminal pusat dari bus antar kota, dalam propinsi dan bus luar propinsi. Untuk kawasan Pasar Atas sendiri pada tahun 1971 masih berdiri sebuah terminal yang saat itu hanya bemo dan bendi saja yang diperbolehkan untuk parkir dikawasan Pasar Atas. Pada kisaran tahun 1970 hingga 1990-an di daerah Bukittinggi belum banyak ditemui kendaraan bermotor milik pribadi. Rata-rata masyarakat Bukittinggi dahulunya berkendara untuk menempuh perjalanan didalam kota dengan menggunakan bendi atau bemo. Hingga untuk kepadatan lahan parkir belum nampak saat ini. Lokasi untuk parkir bendi sendiri pada masa ini terdapat disekitaran Jam Gadang. Tepatnya di depan kawasan Jam Gadang, kemudian bergeser ke jalan di samping Jam Gadang. Saat parkir bendi tersebut pindah ke jalan yang di samping Jam Gadang, bendi-bendi tersebut berbaris berjejer secara menurun mengikuti arah jalan.<sup>26</sup>

### **Gambar 4**

#### **Parkir Mobil dan Motor yang Bergandengan di Kawasan Pasar Atas**



Pak Datuak yang berprofesi sebagai seorang kusir bendi, menceritakan terkait sedikit perubahan yang terjadi pada ruang parkir yang ada di kawasan Pasar Atas Bukittinggi. Dahulunya pada rentang waktu 1990-an hingga tahun 2000-an ruang parkir untuk bendi, motor dan mobil itu terpisah. Jika untuk bendi dahulunya berada didepan kawasan Rumah Makan Selamat tepat berada di depan Jam Gadang.

Kemudian pada masa pemerintahan Walikota Ismet, parkir bendi berpindah ke arah bawah Jam Gadang tepatnya didepan Taman Bung Hatta, kemudian untuk parkir mobil berada di kawasan depan KFC. Namun, saat ini dikarenakan kondisi renovasi Jam Gadang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi, maka lahan parkir bendi, motor dan mobil pun kembali bertaut.<sup>27</sup>

Terlihat pada gambar di atas, bahwasannya untuk parkir ketiga alat transportasi tersebut berebut tempat atau lahan parkir. Separo bahagian jalan diperuntukan bagi kendaraan roda empat dan dua serta benda dan separo bahagian jalan lainnya diperuntukan untuk jalur perlintasan kendaraan. Hal tersebut kemudian tak ayal menimbulkan sedikit kemacetan yang diakibatkan sempitnya jalan yang dipergunakan sebagai jalur perlintasan.

Pemerintah Kota Bukittinggi mengelola sendiri untuk parkir yang ada di kawasan Pasar Atas tersebut. Tarif yang ditetapkan oleh pemerintah kota adalah sebesar Rp. 2.000,- untuk kendaraan roda dua dan Rp. 5.000,- untuk kendaraan roda empat.

Seiring dengan perkembangan dunia pariwisata di kota Bukittinggi, program-program dan kebijakan-kebijakan penunjang untuk peningkatan sarana dan prasarana semakin ditingkatkan oleh pemerintah kota. Salah satu nya untuk mengatasi permasalahan mengenai lahan parkir yang ada dikawasan Pasar Atas. Padatnya

## *Memperkuat Komitmen Keindonesiaan di Era G. 4.0*

kendaraan pribadi dalam kunjungan wisatawan di Bukittinggi menjadikan kawasan atau areal untuk perparkiran di Bukittinggi semakin tahun semakin tidak mencukupi. Hal ini kemudian menimbulkan permasalahan kemacetan yang ada di wilayah pusat pariwisata.

Pak Datuak yang berprfesi sebagai seorang kusir bendi, menceritakan terkait sedikit perubahan yang terjadi pada ruang perparkiran yang ada di kawasan Pasar Atas Bukittinggi. Dahulunya pada rentang waktu 1990-an hingga tahun 2000-an ruang parkir untuk bendi, motor dan mobil itu terpisah. Jika untuk bendi dahulunya berada didepan kawasan Rumah Makan Selamat tepat berada di depan Jam Gadang.

Kemudian pada masa pemerintahan Walikota Ismet, parkir bendi berpindah ke arah bawah Jam Gadang tepatnya didepan Taman Bung Hatta, kemudian untuk parkir mobil berada di kawasan depan KFC. Namun, saat ini dikarenakan kondisi renovasi Jam Gadang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi, maka lahan parkir bendi, motor dan mobil pun kembali bertaut.<sup>1</sup>

Terlihat pada gambar di atas, bahwasannya untuk parkir ketiga alat transportasi tersebut berebut tempat atau lahan parkir. Separo bahagian jalan diperuntukan bagi kendaraan roda empat dan dua serta benda dan separo bahagian jalan lainnya diperuntukan untuk jalur perlintasan kendaraan. Hal tersebut kemudian tak ayal menimbulkan sedikit kemacetan yang diakibatkan sempitnya jalan yang dipergunakan sebagai jalur perlintasan.

Pemerintah Kota Bukittinggi mengelola sendiri untuk perparkiran yang ada di kawasan Pasar Atas tersebut. Tarif yang ditetapkan oleh pemerintah kota adalah sebesar Rp. 2.000,- untuk kendaraan roda dua dan Rp. 5.000,- untuk kendaraan roda empat.

Seiring dengan perkembangan dunia pariwisata di kota Bukittinggi, program-program dan kebijakan-kebijakan penunjang untuk peningkatan sarana dan prasarana semakin ditingkatkan oleh pemerintah kota. Salah satu nya untuk mengatasi permasalahan mengenai lahan parkir yang ada dikawasan Pasar Atas. Padatnya kendaraan pribadi dalam kunjungan wisatawan di Bukittinggi menjadikan kawasan atau areal untuk perparkiran di Bukittinggi semakin tahun semakin tidak mencukupi. Hal ini kemudian menimbulkan permasalahan kemacetan yang ada di wilayah pusat pariwisata.

**Gambar 5**  
**Gedung Parkir Modern di Bukittinggi (Tampak Depan)**



Untuk itu pada tahun 2012 pemerintah Bukittinggi melakukan sebuah pembangunan gedung parkir modern yang berjarak sekitar 100 meter di bawah Jam Gadang. Gedung parkir tersebut memiliki luas lahan 1.927,87 meter persegi. Gedung parkir modern tersebut diperuntukan khusus untuk kendaraan roda empat. Adapun untuk daya tampung dari gedung parkir tersebut diperkirakan akan dapat menampung 295 unit mobil.<sup>28</sup>

**Gambar 6**  
**Gedung Parkir Modern di Bukittinggi (Tampak Belakang)**



Selain membangun parkir modern di daerah Jam Gadang, pembangunan pusat perbelanjaan dan sekaligus area parkir juga dilaksanakan di kawasan Pasar Banto. Selain nantinya dijadikan sebagai salah satu pusat perbelanjaan modern di kawasan Bukittinggi, untuk areal parkir pada bangunan ini juga menghubungkan area gedung dengan lahan parkir yang berada diseborang kawasan gedung, tepatnya didekat pendakian wowo jalan menuju ke Kebun Binatang.

**Gambar 6**  
**Gedung Parkir Modern di Bukittinggi (Tampak Belakang)**



Pertanyaan yang kemudian muncul dengan dibangunnya gedung perparkiran modern di kawasan Pasar Atas tersebut adalah apakah permasalahan perebutan ruang terutama untuk lahan parkir tersebut dapat berakhir?. Jawaban yang ada permasalahan perebutan ruang tersebut tetap saja berjalan. Hal tersebut dapat terlihat dari sepiunya areal parkir modern terutama untuk kendaraan roda empat.

Ada beberapa permasalahan yang kemudian menjadi kendala dalam pemanfaatan ruang terutama untuk parkir di kawasan wisata Pasar Atas Kota Bukittinggi. *Pertama*, masih adanya areal parkir resmi yang menggunakan bahu jalan di kawasan Pasar Atas. Harga untuk parkir resmi yang berada pada bahu jalan dengan harga dengan parkir modern tidak berbeda. Namun, yang membedakannya adalah jika diparkir resmi dibahu jalan tarif parkir dikenakan flat, sedangkan pada bangunan parkir modern tarif parkir dihitung per jam.

*Kedua*, adanya parkir liar yang berkembang di kawasan luar gedung perparkiran modern. Biasanya parkir liar tersebut beroperasi dari pukul 17.00 hingga pukul 22.00. parkir ini dikelola oleh para pemuda yang berada di sekitaran kawasan Pasar Atas. Untuk tarif yang digunakan masih sama yaitu Rp. 2.000,- untuk roda dua dan Rp. 5.000,- untuk roda empat, tarif ini berlaku flat.<sup>29</sup>

## **E. Penutup**

Keberadaan Pasar Atas sebagai salah satu kawasan pusat pariwisata di Kota Bukittinggi, membawa berbagai macam dampak. Salah satu dampak yang ditimbulkan adalah terjadinya perubahan ruang terutama untuk penggunaan lahan parkir pada kawasan pariwisata ini. Lahan parkir yang semakin hari semakin sangat dibutuhkan untuk kawasan tersebut, kemudian memunculkan sebuah kebijakan baru bagi pemerintah Kota

## *Memperkuat Komitmen Keindonesiaan di Era G. 4.0*

Bukittinggi sendiri untuk membangun sarana gedung parkir modern. Namun, hal tersebut ternyata tidak mengatasi masalah yang ada. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ternyata tidak didukung sepenuhnya dengan sikap yang ada di masyarakat. Hal tersebut terlihat dengan adanya atau lahirnya parkir liar yang masih banyak dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Sehingga, keinginan pemerintah untuk mengurangi kemacetan di kawasan wisata Pasar Atas hingga saat ini tidak bisa terwujud sepenuhnya. Akan tetapi, pada satu sisi ruang parkir tersebut juga menjadi sebuah pemasukan bagi masyarakat sekitar untuk perekonomian mereka.

### DAFTAR PUSTAKA

#### **Buku, Jurnal, Skripsi, Tesis**

- Azwar. 2006. "Pendekatan Klasifikasi Kota Dunia dan Indonesia Mulai dari Cara Numerik sampai Non-Numerik", dalam *Working Paper Sosiologi Andalas Vol. VIII No. 1 Januari 2006*. Padang: Laboratorium Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas.
- Branch, Melville C. 1995. *Perencanaan Kota Komprehensif Pengantar dan Penjelasan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Desi Arianti. 2014. "Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Perekonomian dan Keruangan Kota Bukittinggi (Pendekatan Analisis Input dan Output), dalam *Jurnal Wilayah dan Lingkungan, Volume. 2 Nomor 3*.
- Freek Colombijn. 2006. *Paco-paco Kota Padang Sejarah Sebuah Kota di Indonesia pada Abad ke-20 dan Penggunaan Ruang Kota*. Yogyakarta: Ombak.
- Hadi Sabari Yunus. 2005. *Klasifikasi Kota*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Jonny Wongso dan Syed Zainol Abidin Idid. 2011. “Koto Jolong to Tourism City As an Approach for Urban Heritage Conesevation in The Historic Cities of Minangkabau”, *Makalah* dalam APSA Congress.
- Lina Andalia. “Pedagang Kaki Lima di Pasar Atas Bukittinggi”. *Skripsi*. Padang: Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Andalas.
- Melisa. 2012. “Ampera dan Perubahan Orientasi Ruang Perdagangan Kota Palembang 1920an-1970an”, dalam *Jurnal Lembaran Sejarah Vol. 9, No. 1 (2012)*. Yogyakarta: Jurusan Sejarah Fakultas IlmuBudaya Universitas Gadjah Mada.
- Muhammad Radjab. 1958. *Tjataan di Sumatera*. Djakarta: Dinas Penerbitan Balai Pustaka.
- Nopriyasman. 1996. “Sejarah dan Pariwisata: Sebuah Gambaran Karya Wisatawan Untuk Pembangunan”, *Makalah*. Padang: Fakultas Sastra Universitas Andalas.
- Pemerintah Kota Bukittinggi. 2017. *Statistik Daerah Kota Bukittinggi*. Bukittinggi: Badan Pusat Statistik Kota Bukittinggi.
- Purnawan Basundoro. 2012. *Pengantar Sejarah Kota*. Yogyakarta: Ombak.
- Rezi Kurnia Putri. 2015. “Pengembangan Pariwisata oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Bukittinggi untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)”, *Skripsi*, (Padang: Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Andalas.
- Romi Ramadhani. 2002. “Perempuan Pedagang Pasar Atas Bukittinggi Tahun 1974-1997”, *Skripsi*. Padang: Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Andalas.
- Trisno Edward. 2005. “Sejarah Pariwisata di Kota Bukittinggi 1984-1999”. *Skripsi*. Padang: Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Andalas.

## *Memperkuat Komitmen Keindonesiaan di Era G. 4.0*

- Zulqayyim. 2005. “Pembangunan Infrastruktur Kota Bukittinggi Pada Masa Kolonial Belanda”, dalam Freek Colombijn, dkk, (ed). *Kota Lama Kota Baru Sejarah Kota-kota di Indonesia*. Yogyakarta: Ombak.
- . 2006. *Boekittinggi Tempo Doeloe*. Padang: Andalas University Press.

### **Internet**

- <https://m.inilah.com/news/detail/1865951/gedung-parkir-megah-dibangun-di-bukittinggi> diakses pada tanggal 14 Maret 2018, 21.45 Wib.
- <https://sumbar.antarane.ws.com/berita/28401/bukittinggi-alokasikan-rp168-miliar-bangun-gedung-parkir> diakses pada tanggal 14 Maret 2018, 22.03.

### **Wawancara**

Nama : Darmawansyah  
Umur : 64 Tahun  
Pekerjaan : Pensiunan PNS

Nama : Datuak  
Umur : 70 Tahun  
Pekerjaan : Kusir Bendi

Nama : Ahmad Fikri  
Umur : 19 Tahun  
Pekerjaan : Tukang Parkir Liar di Kawasan Pasar Atas

## Catatan Akhir

<sup>1</sup> Melville C. Branch, *Perencanaan Kota Komprehensif Pengantar dan Penjelasan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995), hlm. 37).

<sup>2</sup> Bukittinggi pada awalnya merupakan sebutan bagi salah satu bukit dari dua puluh tujuh bukit yang ada di wilayah hukum nagari adat *Kurai*. Bukit ini bernama *Bukik Kubangan Kabau* dengan kondisi geografisnya yang paling tinggi diantara bukit yang lain. Bukit ini dahulunya dijadikan sebagai tempat bermusyawarah bagi para penghulu Nagari Kurai V Jorong dan juga sebagai pakan (pasar). Pembangunan sebuah benteng pertahanan oleh Belanda pada tahun 1826 untuk melawan pasukan Padri, menjadi awal pendudukan pemerintah kolonial Belanda di wilayah ini. Tidak hanya itu saja, pendudukan kolonial Belanda turut mendorong perubahan wilayah Bukittinggi menjadi semakin luas. Wilayah yang disebut Bukittinggi bukan lagi daerah Bukik Kubangan Kabau, melainkan sudah berubah menjadi suatu wilayah administratif yang melingkupi beberapa nagari yang ada di sekitar wilayah Nagari Kurai. Zulqayyim, *Boekittinggi Tempo Doeloe*, (Padang: Andalas University Press, 2006), hlm. 20-26.

<sup>3</sup> Jonny Wongso dan Syed Zainol Abidin Idid, “Koto Jolong to Tourism City As an Approach for Urban Heritage Consevation in The Historic Cities of Minangkabau”, *Makalah* dalam APSA Congress, 2011.

<sup>4</sup> Lina Andalia, “Pedagang Kaki Lima di Pasar Atas Bukittinggi”, *Skripsi*, (Padang: Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Andalas), hlm. 29-33.

<sup>5</sup> Jonny Wongso dan Syed Zainol Abidin Idid, *op., cit.*

<sup>6</sup> Trisno Edward, “Sejarah Pariwisata di Kota Bukittinggi 1984-1999”, *Skripsi*, (Padang: Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Andalas, 2005), hlm. 41.

<sup>7</sup> Pemerintah Kota Bukittinggi, *Statistik Daerah Kota Bukittinggi*, (Bukittinggi: Badan Pusat Statistik Kota Bukittinggi, 2017), hlm. 25.

<sup>8</sup> Rezi Kurnia Putri, “Pengembangan Pariwisata oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Bukittinggi untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)”, *Skripsi*, (Padang: Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Andalas, 2015).

<sup>9</sup> <https://sumbar.antaranews.com/berita/28401/bukittinggi-alokasikan-rp168-miliar-bangun-gedung-parkir> diakses pada tanggal 14 Maret 2018, 22.03.

<sup>10</sup> <https://m.inilah.com/news/detail/1865951/gedung-parkir-megah-dibangun-di-bukittinggi> diakses pada tanggal 14 Maret 2018, 21.45 Wib.

<sup>11</sup> Purnawan Basundoro, *Pengantar Sejarah Kota*, (Yogyakarta: Ombak, 2012), hlm. 15.

## *Memperkuat Komitmen Keindonesiaan di Era G. 4.0*

<sup>12</sup> Hadi Sabari Yunus, *Klasifikasi Kota*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 1-2.

<sup>13</sup> Zulqayyim, *op.cit.*

<sup>14</sup> Azwar, “Pendekatan Klasifikasi Kota Dunia dan Indonesia Mulai dari Cara Numerik sampai Non-Numerik”, dalam *Working Paper Sosiologi Andalas Vol. VIII No. 1 Januari 2006*, (Padang: Laboratorium Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas, 2006), hlm. 1.

<sup>15</sup> Melisa, “Ampera dan Perubahan Orientasi Ruang Perdagangan Kota Palembang 1920an-1970an”, dalam *Jurnal Lembaran Sejarah Vol. 9, No. 1 (2012)*, (Yogyakarta: Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, 2012).

<sup>16</sup> Jonny Wongso dan Syed Zainol Abidin Idris, *op. cit.*

<sup>17</sup> Rezi Kurnia Putri, *op.cit.*

<sup>18</sup> Trisno Edward, *op.cit.*

<sup>19</sup> Nopriyasan, “Sejarah dan Pariwisata: Sebuah Gambaran Karya Wisatawan Untuk Pembangunan”, *Makalah*, (Padang: Fakultas Sastra Universitas Andalas, 1996).

<sup>20</sup> Zulqayyim, “Pembangunan Infrastruktur Kota Bukittinggi Pada Masa Kolonial Belanda”, dalam Freek Colombijn, dkk, (ed), *Kota Lama Kota Baru Sejarah Kota-kota di Indonesia*, (Yogyakarta: Ombak, 2005). Lihat juga Zulqayyim, *Op.cit.*, 2006.

<sup>21</sup> Romi Ramadhani, “Perempuan Pedagang Pasar Atas Bukittinggi Tahun 1974-1997”, *Skripsi*, (Padang: Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Andalas, 2002), hlm. 21.

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Desi Arianti, “Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Perekonomian dan Keruangan Kota Bukittinggi (Pendekatan Analisis Input dan Output), dalam *Jurnal Wilayah dan Lingkungan, Volume. 2 Nomor 3, 2014*, hlm. 193.

<sup>24</sup> Wawancara dengan Darmawansyah, pada tanggal 10 Agustus 2018.

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Wawancara dengan Pak Datuak, pada tanggal 8 Agustus 2018.

<sup>27</sup> Wawancara dengan Pak Datuak, pada tanggal 8 Agustus 2018.

<sup>28</sup> <https://m.inilah.com/news/detail/1865951/gedung-parkir-megah-dibangun-di-bukittinggi> diakses pada tanggal 14 Maret 2018, 21.45 Wib.

<sup>29</sup> Wawancara dengan Ahmad Fikri pada tanggal 22 September 2018.

# Dari Mitos Hingga Realitas: Sejarah Gempa Bumi dan Tsunami di Pulau Nias

Dr. Anatona, M. Hum, Drs. Sabar, M. Hum, Riski Syukri Zalukhu

## Abstrak

Hanya dalam tempo tiga bulan, terhitung sejak tanggal 26 Desember 2004 hingga 28 Maret 2005 silam, Pulau Nias yang terletak di lepas pantai barat Sumatera berturut-turut diguncang oleh gempa bumi dahsyat masing-masing berkekuatan 9,2 dan 8,7 skala Richter serta diikuti oleh gelombang tsunami, naiknya air laut Samudera Hindia ke daratan. Bencana alam ini telah meluluhlantakan berbagai sendi kehidupan di Pulau Nias terutama bangunan fisik seperti rumah, gedung perkantoran, rumah sakit, rumah ibadah, sekolah, jalan dan jembatan serta fasilitas publik lainnya hingga lahan pertanian dan permukiman penduduk. Selain itu, peristiwa gempa bumi dan tsunami di Pulau Nias tanggal 28 Maret 2005 menelan hampir 900 korban jiwa, serta lebih dari 6000 orang mengalami luka-luka. Korban meninggal dan luka-luka terutama diakibatkan karena tertimpa reruntuhan gedung dan terseret oleh gelombang tsunami. Peristiwa bencana alam gempa bumi dan tsunami di kepulauan Indonesia termasuk Pulau Nias senantiasa menjadi topik yang menarik. Terlebih lagi bila hal yang sama dikaitkan dengan peristiwa yang menimpa Aceh pada tahun 2004 dan Palu tahun 2018. Nias sendiri setidaknya selama dua ratus tahun belakangan seringkali mengalami guncangan gempa bumi dan tsunami. Makalah ini lebih jauh bermaksud merekonstruksi kembali sejarah gempa bumi dan tsunami yang pernah terjadi di Pulau Nias.

*Keywords: Nias island, disaster, earthquake, tsunami, history*

## **A. PENDAHULUAN**

Sudah lebih satu dekade lamanya, terhitung sejak tahun 2004, wilayah pesisir dan beberapa pulau di lepas pantai barat Sumatera mengalami bencana alam gempa bumi dan gelombang tsunami dahsyat. Diawali dengan gempa bumi berkekuatan 9,2 skala Richter yang diikuti naiknya gelombang tsunami ke daratan melanda Aceh dan pulau-pulau di lepas pantai barat Sumatera seperti Simeulue, Nias, dan lainnya pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2004. Bencana ini menelan korban yang sangat besar. Lebih dari 225.000 orang kehilangan nyawa. Tidak hanya sampai di sana, sekitar tiga bulan kemudian tepatnya pada tanggal 28 Maret 2005, gempa bumi berkekuatan 8,7 skala Richter kembali mengguncang Pulau Nias. Empat tahun setelah itu, tepatnya tanggal 30 September 2009 kembali tercatat gempa bumi dengan skala 7,6 skala Richter kembali mengguncang pesisir barat Sumatera. Kali ini di kota Padang dan wilayah sekitarnya. Lantas pada bulan November 2010 tercatat pula gempa bumi yang diikuti oleh gelombang tsunami di Kepulauan Mentawai. Semua itu telah menambah daftar panjang sejarah bencana alam gempa bumi dan tsunami di beberapa kawasan pesisir pantai dan pulau-pulau di bagian barat Sumatera.

Kepulauan Indonesia merupakan kawasan rawan gempa yang kemudian menjadikannya juga sebagai daerah rawan tsunami. Hal ini dikarenakan kebanyakan dari kepulauan Indonesia terletak di daerah tektonik aktif tempat berinteraksinya lempeng Eurasia. Nias sendiri tercatat sebagai pulau yang sering mengalami bencana alam gempa bumi dan tsunami. Berbagai laporan sejak zaman kolonial Belanda menyebutkan bahwa selama berabad-abad pulau ini seringkali diguncang gempa dan diikuti oleh naiknya air laut ke daratan (Bambowo 1975; Reid 1995). Hal ini tentu saja tidak terlepas dari posisi letak geografis Pulau Nias yang berada pada lempeng Eurasia di Lautan Hindia, yang sangat rawan mengalami

guncangan dan naiknya air pasang ke daratan. Pengalaman yang begitu lama yang dialami Nias yang seringkali mengalami bencana alam dalam kurun waktu berabad-abad tersebut, oleh Nata'alui Duha disebutnya sebagai pulau bergoyang (Duha 2012).

Bencana alam yang datang secara beruntun telah mengguncang semua sendi kehidupan masyarakat Nias, terutama bagi penduduk yang terkena langsung dampak bencana. Betapa tidak, tanpa diperkirakan sebelumnya atau mendapat peringatan dini, gempa yang diikuti oleh gelombang tsunami telah meluluhlantakkan kehidupan masyarakat. Pada sisi lain, peristiwa demi peristiwa alam yang dialami meninggalkan warisan berupa pengetahuan di kalangan masyarakat dari berbagai peristiwa alam yang sering terjadi berupa kearifan lokal di sana dalam upaya menyelamatkan diri terhindar dari bencana, salah satunya menjauh dari laut.

## B. MITOLOGI

Orang Nias cukup akrab dengan istilah gempa. Untuk menyebut gempa, komunitas ini memiliki kosa kata yang terdapat di dalam bahasa daerahnya sendiri. *Duru* atau *ndruru* dalam kosa kata bahasa Nias berarti gempa. Sedangkan kata *duru* (*ndruru*) *danö* artinya gempa bumi (Apolonius, 2011). Istilah *ndruru* dikenal luas di kawasan wilayah Kepulauan Nias termasuk kelompok wilayah Pulau-Pulau Batu di bagian selatan, sebagai sebuah fenomena alam berupa guncangan bumi.

Sekaitan dengan hal tersebut, Pulau Nias juga dinamai dengan istilah *hulo solaya-laya* dengan dua pengertian. Pertama, pulau yang terapung-apung. Bersama dengan gugusan pulau-pulau yang ada di sekitarnya, Nias berada di tengah-tengah lautan luas Samudera Hindia yang terapung dan “terombang-ambing” oleh pukulan ombak. Pengertian kedua, pulau yang menari-nari. Maksudnya

## *Memperkuat Komitmen Keindonesiaan di Era G. 4.0*

ialah di pulau ini seringkali terjadi gempa bumi sehingga keadaannya tidak stabil. Penduduk merasakan seolah-olah berada disebuah tempat yang sedang menari-nari atau bergoyang (Hämmerle, 2015; Duha, 2012)

Geografis Pulau Nias berada di zona 6 dengan risiko seismik tertinggi di Indonesia (Beetham, 2008). Oleh karena itu secara periodik pulau ini senantiasa mengalami guncangan. Sejarah panjang gempa bumi di pulau Nias pada periode awal dapat diketahui melalui kisah-kisah tradisional yang masih bercampur mitos. Saat masyarakat Nias belum lagi mengenal tulisan, kisah-kisah gempa bumi di pulau tersebut terungkap melalui tradisi lisan yang dituturkan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Terdapat beberapa varian kisah terjadinya gempa bumi di Pulau Nias. Namun dari varian yang ada, kisahnya selalu terpusat pada sosok bernama Latura Danö atau dalam versi lain namanya disebut Bauwabadanö Hia (Mendrofa, 1981). Dalam mitologi Nias, Latura Danö merupakan cucu dari pasangan dewa-dewi yang tinggal di kayangan, masing-masing bernama Tuhamoraangi Tuhamoraanaa (laki-laki) dan Burutiraoangi Burutiraoanaa (perempuan). Pasangan ini memiliki anak laki-laki bernama Sirao sebagai pewaris tahta dan penguasa di *Teteholi Ana'a*, yang kemudian menjadi ayah kandung dari Latura Danö.

Selain Latura Danö, Sirao masih memiliki delapan orang anak lagi. Dalam kisah berikutnya diceritakan bahwa Latura Donö bersama ke-8 saudaranya diturunkan (*ladada*) dari dunia atas sebagai tempat tinggal para dewa ke bumi. Lokasi tempat ia diturunkan berada tepat di *Tanö Niha* atau tanah (bumi) Nias. Akan tetapi, Latura Danö memiliki tubuh yang besar dan gemuk. Akibatnya permukaan tanah tempat ia diturunkan tidak sanggup menahan berat tubuhnya. Tubuh Latura Danö akhirnya menembus permukaan hingga masuk ke dalamnya. Saat sampai di dalam

bumi, ia dipercaya menjelma menjadi seekor ular besar. Di sinilah pada akhirnya ia bertempat tinggal. Menurut *hoho* yaitu tradisi lisan orang Nias Latura Danö sebagai *da'ö zanaya tanö sisagörö*, *da'ö zandaya tanö sébolo*. Artinya, dialah yang menjadi penadah bumi yang luas (Zebua, 2010).

Pada masa lalu di Nias seringkali terjadi konflik dan peperangan antar warga yang berbeda kampung (*banua*). Demikian pula dengan perbuatan kriminal. Apabila konflik tersebut sampai mengucurkan darah hingga membasahi permukaan bumi dan merembes ke dalam tanah maka Latura Donö tidak suka. Ia terganggu dan menggeliatkan tubuhnya. Kekuatannya saat menggeliat besar sekali hingga membuat bumi Nias terguncang-guncang dan masyarakat menganggapnya sebagai gempa bumi.

### C. CATATAN SEJARAH

Selang dua tahun berturut-turut dari 2004 hingga 2005, Pulau Nias mengalami dua kali bencana alam gempa bumi dahsyat masing-masing pada tanggal 26 Desember 2004 dan tanggal 2005. Pada gempa bumi yang pertama termasuk gempa bumi tektonik, diikuti oleh naiknya air laut ke darat (tsunami). Gempa bumi tersebut berlangsung selama 3 menit hingga banyak bangunan yang rusak. Meski demikian sejumlah bangunan terbuat dari bata yang kokoh serta rumah adat (*omohada*) yang terbuat dari kayu, tetap tegak berdiri.

Dua kali peristiwa gempa bumi dahsyat yang terjadi pada saat itu merupakan rangkaian peristiwa yang pernah terjadi secara berulang-ulang di pulau tersebut pada masa lalu. Mengacu kepada katalog 90 peristiwa tsunami yang pernah terjadi di wilayah Samudera Hindia selama lebih dari 2 milenium belakangan, terhitung sejak tahun 326 SM hingga 2005 silam, sebagaimana yang disusun oleh Rastogi dan Jaiswal (2006) serta Rastogi (2007),

## *Memperkuat Komitmen Keindonesiaan di Era G. 4.0*

catatan peristiwa gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Pulau Nias tidak ada yang lebih tua dari abad ke-19. Memang ada satu kali peristiwa gempa bumi dan tsunami yang tercatat pada katalog tersebut terjadi pada akhir abad ke-18 tepatnya pada tanggal 10 dan 11 Februari 1797 dengan kekuatan 8,2 skala Richter. Gempa bumi diikuti tsunami pada masa itu terjadi di kawasan bagian selatan pulau Nias tepatnya di Pulau-Pulau Batu dengan jarak sekitar 100 km dari pulau Nias, namun dari aspek budaya, kawasan tersebut termasuk dalam lingkungan kultur Nias. Gempa bumi dan tsunami saat ini juga dialami oleh kawasan pesisir barat Sumatera termasuk kota Padang yang jaraknya mencapai 257 km dari Pulau-Pulau Batu. Dengan kondisi ini, besar kemungkinan gempa bumi juga terjadi di Pulau Nias pada masa itu.

Dalam katalog disebutkan pula bahwa selama abad ke-19, Nias mengalami guncangan gempa bumi sebanyak lima kali. Beberapa kali di antaranya diikuti pula oleh naiknya gelombang tsunami ke daratan. Gempa bumi pertama terjadi pada awal tahun 1843 tepatnya tanggal 5 dan 6 Januari 1843 dengan kekuatan 7,2 skala Richter. Gempa bumi yang berlangsung dua hari ini diikuti oleh gelombang tsunami yang menyapu pesisir timur pulau Nias, termasuk Gunungsitoli (Rastogi dan Jaiswal, 2006).

Junghuhn menguraikan, gempa dahsyat ini berlangsung 9 menit. Di Gunungsitoli banyak rumah yang hancur. Sebagian dari wilayah Hili Harifa (Hilihati). Gempa juga mengakibatkan tanah longsor dan benteng Belanda yang berada di atas bukit di Gunungsitoli mengalami rusak berat. Kerusakan lebih parah lagi saat naiknya gelombang tsunami ke daratan. Air laut menyapu daratan dari arah tenggara, hingga menghancurkan segala yang hendak menghalanginya di pantai timur Nias, mulai dari daerah Ture Lembaru, air menerjang sampai ke Miga dan Gunungsitoli (Nieuwenhuisen dan Rosenberg, 1863; Hämmerle, 2013)

Selang sembilan tahun kemudian, Nias kembali diterpa guncangan gempa bumi, tepatnya pada tanggal 11 November 1852. Setelah itu, dalam rentang waktu sembilan tahun, tepatnya dalam tahun 1861, pulau Nias kembali mengalami gempa bumi sebanyak 3 kali berturut-turut. Paling awal terjadi pada tanggal 16 Februari 1861 dengan guncangan yang dahsyat dengan kekuatan 8,5 skala Richter dan diikuti oleh naiknya gelombang tsunami. Kejadiannya menimpa sisi barat daya Nias dengan ketinggian air tsunami mencapai 7 meter. Dua kali lagi gempa bumi susulan di tahun yang sama masing-masing terjadi lagi pada tanggal 9 Maret dan 26 April 1861 (Rastogi dan Jaiswal 2006).

Selain di bagian barat, gempa bumi dan tsunami yang terjadi pada tanggal 16 Januari 1861 juga dirasakan di bagian selatan Pulau Nias. Salah satu daerah yang terkena dampak gempa Nias Selatan ialah Teluk Lagundri. Rappard mencatat gempa ini memporakporandakan dan menghancurkan benteng Belanda di Lagundri. Agaknya benteng ini baru berusia 5 tahun saat terjadi dan tsunami. Tahun 1856 Jenderal van Swieten pernah memerintahkan kepada penguasa Belanda di Pulau Nias agar membangun sebuah benteng sebagai pos Belanda di Nias Selatan. Jumlah prajurit yang bertugas di benteng tersebut berjumlah 75 orang dan 3 perwira (Schröder, 1917; Puccioni, 2013: 51-52; Rappard, 1909).

Setelah gempa disusul oleh tsunami. Seluruh benteng dan areal sekitarnya digenangi air. Sebanyak 16 serdadu Belanda yang berada di benteng tersebut tenggelam. Namun tidak ada catatan korban jiwa dari penduduk. Sejumlah perlengkapan militer seperti mesiu dan senjata terendam air laut. Hal ini mengakibatkan seluruh perlengkapan militer yang tersimpan di benteng tersebut tidak dapat lagi berfungsi dengan baik dan rusak. Akibatnya semua perlengkapan militer Belanda di sana tidak berfungsi. Hal ini menimbulkan konsekuensi yang serius. Oleh karena ketiadaan

## *Memperkuat Komitmen Keindonesiaan di Era G. 4.0*

peralatan maka prajurit Belanda yang bertugas di Lagundri harus melarikan diri dan kembali ke Gunungsitoli (Schröder; Hämmerle 4)

Memasuki awal abad ke-20, atau 46 tahun setelah gempa berkekuatan besar sebelumnya, Nias kembali mengalami guncangan gempa bumi dan tsunami. Kali ini terjadi pada tanggal 7 Januari 1907. Tidak ada catatan mengenai tingkat kerusakan dan korban jiwa pada masa itu padahal gempa bumi tersebut juga diperkirakan diikuti oleh tsunami. Sebagai perbandingan, dalam waktu yang bersamaan gempa bumi juga terjadi dan dialami oleh masyarakat yang tinggal di Simeulue, sebuah pulau yang terletak di sebelah utara Nias. Beberapa saat setelah gempa, Pulau Simeulue juga dilanda tsunami dengan naiknya air laut Samudera Hindia ke daratan. Diperkirakan lebih dari 50 persen infrastruktur di Simeulue mengalami kerusakan termasuk menelan banyak korban jiwa. Begitu dahsyatnya tsunami saat itu hingga para korban ditemukan di atas pohon kelapa setinggi 10 meter bahkan hingga di perbukitan yang jaraknya agak jauh dari pantai (Mc Adoo, 2006).

Sejarah kembali mencatat, 57 tahun setelah itu tepatnya pada tahun 1961, gempa bumi kembali terjadi di Nias. Kali ini di bagian selatan Nias dengan kekuatan 8,9 Mw (Kompas, 27 Desember 2018). Empat puluh tahun setelah itu tidak ditemukan lagi informasi mengenai peristiwa yang sama di Pulau Nias. Baru saat memasuki awal abad ke-21, siklus gempa kembali terjadi di sana. Pantai barat Sumatera diguncang gempa tektonik pada tanggal 26 Desember 2004, atau 43 tahun setelah gempa yang terakhir tahun 1961.

Gempa bumi ini mengguncang Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan beberapa wilayah di Sumatera Utara, yakni Kabupaten Nias, Sibolga, Tapanuli Tengah dan Pantai Cermin. Guncangan gempa tersebut memicu tsunami dan banjir bandang

di wilayah Kabupaten Nias. Akibatnya infrastruktur bangunan dan akses jalur darat mengalami kerusakan yang menjadi penyebab sulitnya akses untuk evakuasi korban.

Beberapa surat kabar yang terbit di Medan membuat laporan sehari setelah kejadian gempa bumi dan tsunami di Nias. Air pasang telah melanda beberapa kecamatan di Kabupaten Nias yaitu Sirombu, Mandrehe, Tuhemberua, Lahewa, Afulu serta beberapa kecamatan di Nias Selatan. Fasilitas umum di Sirombu yaitu pasar dan pelabuhan laut digenangi air hingga 2-3 meter. Sejumlah pulau-pulau kecil di lepas pantai Sirombu seperti Hinako, Bawa, Heruanga, Bogi, Asu, Imana dan Amatala terancam tenggelam (Analisa, 27 Desember 2018). Jurnalis Harian Waspada yang terbit di Medan juga melaporkan bahwa kondisi terparah berada di dua kecamatan yang terletak di Nias Barat yakni Kecamatan Sirombu dan Kecamatan Mandrehe. Sehari setelah kejadian tersebut menyebabkan 42 orang tewas dan 75 orang hilang, dimana korban terbanyak terdapat di dua kecamatan tersebut yang sebagian besar anak-anak (Waspada, 27 Desember 2018)

Meski tidak dapat dikatakan kecil, namun akibat yang ditimbulkan oleh bencana alam gempa bumi dan tsunami di Pulau Nias pada tanggal 26 Desember 2004, jauh lebih sedikit bila dibandingkan dengan Aceh. Total jumlah yang meninggal dunia mencapai 122 orang, 18 dinyatakan hilang dan sebanyak 2.300 orang terkena dampak langsung, termasuk yang mengalami luka-luka (Beetham, 2008)

Bencana gempa dan tsunami yang dirasakan masyarakat Nias juga memberikan dampak pada kondisi psikologis. Seperti yang diberitakan Harian Waspada masyarakat Kabupaten Nias yang selamat mengalami depresi yang disebabkan rasa kecewa pada pemerintah pusat yang terkesan memomorduakan Nias dalam memberikan perhatian sebagai wujud penanggulangan bencana.

## *Memperkuat Komitmen Keindonesiaan di Era G. 4.0*

Besarnya dampak tsunami di daerah Nanggroe Aceh Darussalam dibandingkan beberapa daerah yang terkena tsunami di Sumatera Utara menjadikan perhatian publik bahkan pemerintah terfokus pada daerah Nanggroe Aceh Darussalam.

Pada tanggal 28 Maret 2005, hanya tiga bulan kemudian, sebuah gempa besar yang tercatat sebagai 8,7 skala Richter menghantam Pulau Nias. Gempa bumi ini menghancurkan sebagian besar wilayah pedesaan di Nias, yang pada saat itu memiliki populasi sebanyak 710.000 jiwa. Hal ini menyebabkan korban jiwa sebanyak 839 orang. Selain itu sekitar 6.300 orang mengalami luka-luka; 70.000 orang kehilangan tempat tinggal; 13.000 rumah hancur dan 60.000 rumah rusak; 12 pelabuhan dan dermaga rusak atau hancur; 400 jembatan dan 1.000 km jalan dilalui; 760 gedung pemerintah rusak, 720 sekolah hancur, dua rumah sakit dan 350 klinik kesehatan rusak, 1.940 bangunan keagamaan (gereja dan masjid) rusak, dan 90% orang kehilangan mata pencaharian mereka. (Beetham, 2008).

Tidak hanya guncangan gempa bumi yang terjadi pada saat itu juga mengakibatkan naiknya air laut ke daratan. Daerah terparah yang mengalami dampak tsunami mirip dengan yang terjadi pada tahun 2004 yaitu masih di bagian barat pulau Nias. Ketinggian gelombang tsunami di pantai barat Nias pada tahun 2005 mencapai 2 hingga 4 meter (Jaiswal, Rastogi & Murty 2008). Korban jiwa pasca gempa dan tsunami Nias terus bertambah setelah sebelumnya dilaporkan sebanyak 671 orang. Laporan yang terus masuk dan terlambat memberikan data korban yang meningkat menjadi 839 orang setelah 3 minggu pasca tsunami.

Bencana tsunami yang melanda daerah Nias langsung ditanggapi oleh Gubernur Sumatera Utara yang menugaskan Kepala Satuan Tugas SAR (*Search and Rescue*) untuk meninjau lokasi, dan membawa bantuan. Tanggapan berupa penugasan

tersebut dikeluarkan pada dinihari setelah peristiwa tsunami terjadi. Peninjauan lokasi sendiri dibagi menjadi 2 tim, yakni sub tim A yang meninjau daerah Pulau-Pulau Batu di Nias Selatan dan sub tim B meninjau Kecamatan Sirombu dan Kecamatan Mandrehe. Sedangkan, bantuan yang dibawa berupa 1 buah genset 10.000 KVA, bahan-bahan makanan seperti, indomie, beras, kain, sarung, obat-obatan, dan peralatan SAR. Sedangkan setelah 4 minggu Bupati Nias dan Nias Selatan bersama Satkorlak melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi serta pembersihan kota.

Kondisi Nias sudah kembali normal setelah terkena bencana gempa dan tsunami, hal ini dilihat dari kondisi pemerintahannya yang sudah berjalan dengan baik, kantor-kantor pemerintahan sudah beraktifitas seperti biasa, dan jenazah para korban sudah dikebumikan. Semua korban sudah di evakuasi dan bantuan sudah di kirim dari Sibolga. Hal yang dilakukan pemerintah adalah melakukan pendataan yang kemudian dilanjutkan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi daerah Nias.

Nias sudah bisa memasuki tahapan rehabilitasi karena kondisi Nias sudah bisa dikatakan stabil Hal ini diungkapkan Gubernur Sumatera Utara setelah meninjau lokasi. Penanganan bencana nasional memang belum sampai pada tahap rehabilitasi namun Gubernur Sumatera Utara mengusulkan agar Nias memasuki tahap rehabilitasi, dimana selain kondisinya yang sudah bisa dikatakan stabil tingkat kerusakannya sendiri tidak terlalu parah jika dibandingkan dengan Aceh.

Nias diberikan otoritasnya sendiri atas keluhan daerah Nias atas bencana gempa dan tsunami oleh presiden pada kunjungannya ke Nias. Bupati Nias mewakili masyarakat berterimakasih pada Presiden, Menteri, dan DPR RI atas respon terhadap keluhan daerah Nias. Respon ini memberikan harapan kepada Nias untuk mengejar ketertinggalannya dari kabupaten lainnya di Sumatera

## *Memperkuat Komitmen Keindonesiaan di Era G. 4.0*

Utara. Selanjutnya Bupati Nias juga berterimakasih kepada media pemberitaan yang mengabari kondisi Nias sehingga mempermudah informasi pihak pemberi bantuan untuk mengetahui Nias.

### **D. PENUTUP**

Meski tidak ada peninggalan catatan tentang peristiwa gempa bumi dan tsunami di Pulau Nias yang lebih tua dari abad ke-19, namun diyakini bahwa fenomena bencana alam gempa bumi dan tsunami ini merupakan peristiwa yang sudah lama senantiasa terjadi di Pulau Nias. Ada dua alasan. Pertama, Pulau Nias berada di lempeng Eurasia. Hal ini tentu saja bila dibanding dengan daerah lain, tingkat terjadinya gempa bumi di kawasan ini lebih tinggi. Penelitian Rastogi telah membuktikan bahwa lempeng Sunda mencapai hampir 80 persen dari kejadian gempa bumi selama lebih dari 2000 tahun. Alasan kedua, tradisi lisan orang Nias yang dikaitkan dengan guncangan bumi. Tradisi lisan ini sudah muncul jauh sebelum lahirnya penelitian-penelitian ilmiah. Terkait dengan hal tersebut, lahirlah istilah-istilah penyebutan pulau Nias sebagai pulau menari atau pulau bergoyang.

Paparan yang tersaji pada tulisan ini baru merupakan hasil kajian awal tentang sejarah bencana alam gempa bumi dan tsunami di Pulau Nias. Masih banyak lagi sumber-sumber sejarah yang belum tergarap, misalnya dokumen-dokumen Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) Aceh-Nias pasca peristiwa gempa bumi dan tsunami tahun 2004 dan 2005. Pada penelitian-penelitian lanjutan tentu akan dapat memaksimalkan sumber-sumber tersebut untuk hasil kajian lebih komprehensif lagi.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Beetham, Dick. 2008. *Uplift and Damage from the Mw8.7 Nias Earthquake of 28 March 2005*. Building Resilience achieving

- effective post-disaster reconstruction GNS Science Ltd.,  
Lower Hutt, New Zealand
- Duha, Nata'alui. 2012. *Omo Niha: Perahu Darat di Pulau Bergoyang*.  
Gunung Sitoli: Museum Pusaka Nias.
- Hämmerle, P. Johannes M. (Penerjemah). 2013. *Pasukan Belanda  
di Kampung Para Penjagal: Penggalan Cerita Pelawanan Warga  
Desa Rumpun Fau di Nias Selatan dan Kronologis Peristiwa Sejarah  
di Nias dalam Berbagai Dokumen Luar Negeri*. Gunungsitoli:  
Yayasan Pusaka Nias
- Hämmerle, P. Johannes M. 2015. *Asal Usul Masyarakat Nias: Suatu  
Interpretasi*. Gunung Sitoli: Museum Pusaka Nias
- Jaiswal, R.K., Rastogi, B.K. & Tad S. Murty, 2008. "Tsunamigenic  
Sources in The Indian Ocean", *Science of Tsunami Hazards*,  
Vol. 27 No. 2
- Laiya, Bambowo. 1975. "Sendi-sendi Masyarakat Nias". *Peninjau*,  
Majalah Lembaga Penelitian dan Studi Dewan Gereja-gereja  
di Indonesia, Tahun II.
- Lase, Apolonius. 2011. *Kamus Li Niha Nias – Indonesia*. Jakarta:  
Penerbit Kompas.
- McAdoo, Brian G. Lori Dengler, M.EERI Gegar Prasetya, Vasli  
Titov. 2006. "Smong: How an Oral History Saved Thousands  
on Indonesia's Simeulue Island during the December 2004  
and March 2005 Tsunamis", *Earthquake Spectra*, June
- Nieuwenhuisen, J.T., dan H.C.B. von Rosenberg. 1863. "Verslag  
omtrent het eiland Nias en deszelfs bewoners", *Verhandelingen  
van het Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en  
Wetenschappen*.
- Puccioni, Vanni. 2014. *Tanah Para Pendekar: Petualangan Elio  
Modigliani di Nias Selatan Tahun 1886* (Alih bahasa oleh  
Nurchayani Evi dkk). Jakarta: Gramedia

## *Memperkuat Komitmen Keindonesiaan di Era G. 4.0*

- Rastogi, B.K. dan Jaiswal, R.K. 2006. "A Catalog of Tsunamis in the Indian Ocean". *Science of Tsunami Hazards*, Vol. 25 No. 3
- Rastogi, B.K. 2007. "A Historical Account of the Earthquakes and Tsunamis in the Indian Ocean" dalam Tad S. Murty, U. Aswathanarayana, N. Nirupama (eds.). *The Indian Ocean Tsunami*. London: Taylor & Francis
- Rappard, Tj. C. 1909, "Het Eiland Nias en Zijne Bewoners", *Bijdragen tot de Taal-, Land-, en Volkenkunde uitgegeven door Koninklijk Instituut voor Taal-, Land-en Volkenkunde*, LXII.
- Reid, Anthony (Comp.). 1995. *Witnesses to Sumatra: A Travellers' Anthology*. Kuala Lumpur: Oxford University Press
- Zebua, Victor. 2010. *Jejak Cerita Rakyat Nias*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

### **Surat Kabar**

*Analisa*, 27 Desember 2004.

*Kompas*, 27 Desember 2004

*Waspada*, 27 Desember 2004

# Pelestarian Kesenian Tradisional Minangkabau di SMK Negeri 7 Padang Tahun 1997-2017

Dra. Irianna, M.Hum, Risa Junita Sari, Putri Agita Sembiring

## Abstrak

SMKN 7 Padang merupakan salah satu sekolah kejuruan di Sumatera Barat yang mempunyai tanggung jawab keilmuan untuk mempertahankan dan merawat nilai-nilai tradisi dan budaya lokal Minangkabau hari ini. Ditengah gempuran arus modernisasi dan globalisasi, SMKN 7 Padang hadir seperti angin segar sebagai agen kebudayaan yang kian lama semakin memudar dan menghilang di tengah masyarakat Sumatera Barat hari ini. Dengan berpegang pada komitmen untuk terus mewariskan Budaya Minangkabau pada siswa-siswanya, SMKN 7 Padang telah berupaya menunjukkan kompetensinya pada dunia keilmuan dan pendidikan hari ini, bahwa di tengah sekolah-sekolah lainnya berlomba untuk menorehkan prestasi pada bidang akademik yang umum, SMKN 7 justru bergerak dengan pelan tapi pasti dalam mewariskan nilai-nilai tradisi dan budaya Minangkabau bagi siswanya. Tulisan ini bergerak pada ranah sejarah pendidikan, dengan memberikan gambaran bahwa pendidikan kejuruan terutama di bidang kesenian dan kebudayaan kerap mendapat respon yang tidak terlalu antusias dari masyarakat umumnya. Namun hal ini tidak hanya menjadi satu-satunya hambatan dalam perkembangan SMKN 7 tersebut. Tantangan yang paling utama adalah dalam mewariskan nilai-nilai tradisi dan kebudayaan tersebut agar mempunyai kontribusi dan pelestarian nilai-nilai budaya Minangkabau di tengah pesatnya ide-ide globalisasi.

Keywords: SMKN 7 Padang, Pelestarian, Tradisional, Minangkabau

## **A. SEJARAH PERKEMBANGAN SMKN 7 PADANG**

Sumatera Barat merupakan salah satu daerah yang sarat dengan keberagaman budaya yang di dalamnya memuat berbagai bidang kesenian tradisional, seperti seni tari, seni musik, seni drama, seni rupa, dan banyak lagi lainnya. Kesenian tradisional tersebut menjadi identitas dan ciri khas dari kebudayaan di Sumatera Barat. Namun, perkembangan kebudayaan dalam bidang kesenian tradisional tersebut ternyata tidak selalu berjalan mulus. Minat generasi penerus tidak selalu konstan. Arus globalisasi dan modernisasi membuat generasi muda yang menjadi penerus kebudayaan tersebut, mulai melirik kesenian lain yang lebih berbau modern. Hal ini menjadi kendala dalam melestarikan nilai-nilai tradisional di Sumatera Barat, terutama di bidang kesenian. Oleh karena itu, untuk mempertahankan eksistensi kebudayaan tradisional tersebut, pemerintah daerah Sumatera Barat kemudian menjadikan budaya dan kesenian tradisional kedalam sebuah struktur pendidikan formal, dengan mendirikan sekolah yang berbasis pendidikan kebudayaan dan kesenian Minangkabau. Salah satu sekolah yang terus berkembang di Kota Padang dan identik dengan seni tradisinya adalah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 7 Padang, yang juga terdapat di Kampus SMK Seni Budaya Cengkeh Lubuk Begalung Padang.

Terdapat tiga SMK sekolah formal yang berbasis seni tradisional dan seni kerajinan di Sumatera Barat, beberapa bidang keahlian yang diajarkan diantaranya jurusan busana butik, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan, kriya keramik, kriya logam, kriya kayu, dan kriya tekstil terdapat di SMKN 8 Padang, yang berasal dari nama Sekolah Menengah Industri Kerajinan (SMIK), kemudian SMKN 4 Padang yang dikenal dengan Sekolah Menengah Seni Rupa (SMSR), mempunyai beberapa program keahlian, diantaranya jurusan seni lukis, desain komunikasi visual,

desain produk kriya tekstil, desain interior perhotelan dan *landscaping*, akuntansi, dan pemasaran. Serta SMKN 7 Padang yang masih dikenal dengan nama Sekolah Menengah Karawitan Indonesia (SMKI), tercatat pada tahun 1982 sebagai satu-satunya SMKI yang ada di Sumatera. Terkhusus SMKN 7 Padang, spesifikasi keahlian yang dimiliki oleh siswanya adalah seni tradisi Minangkabau. Oleh karena itu, sekolah seperti ini digadagadangkan hanya ada satu di Sumatera Barat bahkan pulau Sumatera.

SMKN 7 didirikan pada tahun 1965 dengan nama awal Konserfatori Karawitan (KOKAR) Minangkabau, yang bertempat di daerah Padang Panjang. Pada tahun 1977, KOKAR kemudian berganti nama menjadi Sekolah Menengah Kerawitan Indonesia (SMKI). Pada tahun 1982, SMKI Padang Panjang tersebut kemudian pindah lokasi ke wilayah Padang, yang beralamat di Komplek Sekolah Seni Budaya, Kelurahan Cengkeh, Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang. Penamaan SMKI ternyata bertahan hingga 15 tahun, hingga pada tahun 1977 nama SMKI berubah menjadi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 7 Padang dengan program studi keahlian Seni Pertunjukan dengan empat kompetensi keahlian, yaitu: Seni Kerawitan Minang, Seni Tari Minang, Seni Teater, dan Seni Musik Non Klasik. Program studi ini terus berkembang dari tahun ke tahun, hingga hari ini terdapat beberapa penambahan dalam kompetensi keahlian yang ditawarkan oleh SMKN 7. Beberapa penambahan tersebut yaitu; Tata Kecantikan Rambut dan Broadcasting. Awal mula berdirinya KOKAR dicetus dan disponsori oleh Dinas Kebudayaan Propinsi Sumatera Barat pada saat itu yang dikepalai oleh Rasyid St. Tangah Hari, yang juga langsung menjadi kepala sekolah sekolah KOKAR yang pertama, atau disebut juga dengan direktur. Rasyid St. Tangah menjadi direktur KOKAR dari tahun 1965-1970.

## *Memperkuat Komitmen Keindonesiaan di Era G. 4.0*

Pada awal mula perkembangannya, SMKN 7 yang saat itu masih bernama KOKAR hanya memiliki 6 guru saja, dengan jumlah murid hanya 13 orang saja. pada tahun berikutnya jumlah murid menjadi naik lebih dari dua kali lipat, yaitu 28 orang. Namun, setelah itu tidak ada lagi yang mendaftar menjadi murid KOKAR, sehingga hingga tahun 1969, murid KOKAR hanya 28 orang itu saja. Pada tahun 1969, KOKAR berhasil meluluskan 10 orang angkatan yang pertama. Hal ini kembali menumbuhkan minat masyarakat untuk bersekolah di KOKAR, sehingga pada tahun ajaran yang sama terdapat 26 siswa yang mendaftar di KOKAR. Jumlah pendaftar di KOKAR hingga tahun 1974 mengalami fluktuasi jumlah yang mengkhawatirkan. Hingga tahun 1974 jumlah murid yang mendaftar bahkan tidak lebih dari 10 orang, malah terdapat tahun yang tidak satupun pendaftar sama sekali.

Namun pada tahun 1975, KOKAR menerima 30 orang murid. Rata-rata murid yang masuk ke KOKAR adalah siswa-siswa tamatan SMTP yang mempunyai minat dan bakat terhadap kesenian, khususnya kesenian Minangkabau, karena KOKAR hanya memiliki satu program keahlian atau jurusan, yaitu Minangkabau. Beberapa mata pelajaran yang diajarkan di KOKAR adalah Lagu minangkabau, Musik Kerawitan Minangkabau, Bahasa dan Sastra Minangkabau, Pementasan, Adat Istiadat Minangkabau, Tambo Minangkabau, Ilmu Musik, Tari Minang, Pencak Silat, Bahasa Indonesia, Ilmu Mendidik, Antropologi, Kesusastraan, Bahasa Inggris, Sejarah Kebudayaan dan Kesenian, Manajemen dan Agama. Murid-murid tersebut berasal dari Sumatera Barat. Salah satu murid KOKAR yang paling terkenal adalah Hoeridjah Adam yang mampu membawa kesenian tradisional Minangkabau ke panggung kesenian nasional. Hal ini begitu kontradiktif mengingat sarana dan prasarana kegiatan belajar di KOKAR sangat mengkhawatirkan. Ketiadaan gedung

sekolah yang jelas, sepertinya tidak membuat semangat kreatifitas siswa KOKAR menjadi surut. Dengan memanfaatkan tumpangan gedung-gedung dari berbagai lembaga, siswa KOKAR terus belajar dengan semangat, walaupun juga dengan alat musik yang seadanya seperti beberapa buah talempong pacik yang hanya berjumlah beberapa buah saja.

Pada saat KOKAR berganti menjadi SMKI negeri Padang Panjang, jurusan di sekolah seni tersebut kemudian dikembangkan, karena pada saat masih di bawah KOKAR metode kurikulumnya disinyalir hanya berbentuk sanggar saja. Oleh karena itu pada saat berganti menjadi SMKI, metode kurikulum kemudian diubah sesuai dengan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0292/0/1976 yaitu untuk melakukan inovasi pendidikan yang bertujuan untuk membina kebudayaan nasional, maka jurusan yang ada di SMKI mulai dikembangkan, dari yang sebelumnya hanya satu jurusan saja, dikembangkan menjadi tiga jurusan, yaitu Seni Kerawitan, Seni Tari dan Seni Teater Daerah. Namun, fokus dari SMKI ini tidak jauh berbeda dengan pada saat masih di bawah KOKAR, yaitu mempunyai misi dan tujuan dalam pengembangan seni tradisi Minangkabau.

Setelah berganti nama menjadi SMKI, terjadi lonjakan jumlah siswa yang masuk. Puncaknya adalah pada tahun 1981, merupakan tahun dengan angka jumlah siswa yang tertinggi, yaitu 127 orang. Total jumlah siswa SMKI pada saat itu adalah sebanyak 339 orang. Hal yang diutamakan dalam kurikulum SMKI adalah mengasah kemampuan yang menjadi bidang peminatan siswa mereka. Salah satu caranya adalah dengan melakukan banyak praktek penampilan, terutama untuk siswa dari seni tari. Minimnya masyarakat minangkabau yang memiliki keahlian dalam bidang seni tari, membuat siswa SMKI mendapat tempat untuk memperkenalkan kesenian tari Minangkabau, tidak hanya pada

## *Memperkuat Komitmen Keindonesiaan di Era G. 4.0*

masyarakat Minangkabau saja, tetapi juga untuk etnis lainnya. Tidak jarang siswa SMKI mendapat tawaran untuk meramaikan sebuah kegiatan dengan menampilkan tari-tari khas Minangkabau seperti, Tari Galombang, Tari Pasambahan, Tari Piring, dan banyak lagi lainnya.

Pada tahun 1982, SMKI Padang Panjang kemudian dipindahkan ke Padang, dan berganti nama menjadi SMKI Negeri Padang. Berlokasi di daerah Cengkeh, Kota Padang, SMKI menarik perhatian banyak seniman dan budayawan Sumatera Barat. Hal ini terlihat dari begitu banyaknya seniman dan budayawan yang kemudian melanjutkan pendidikan anak-anaknya di SMKI. Jumlah siswa terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini juga disebabkan karena pada tahun-tahun tersebut, pemerintah memberlakukan sistem langsung diangkat menjadi pegawai negeri pada suatu lembaga tertentu walaupun hanya tamatan sekolah menengah saja. Pada tahun 1987 jumlah siswa bahkan melonjak hingga mencapai ribuan orang, sehingga tidak tertampung oleh fasilitas sarana dan prasarana yang ada di sekolah tersebut. Sepuluh tahun kemudian, SMKI Padang berganti nama menjadi SMKN 7 Padang, berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 036/0/1997 pada tanggal 07 Maret 1997 tentang perubahan nama sekolah menjadi SMKN.

## **B. PELESTARIAN NILAI-NILAI KESENIAN TRADISIONAL DI SMKN 7 PADANG**

Ciri khas dari SMK-SMK berbasis kesenian ini, yakni pada pelestarian seni-seni etnik dan tradisi, khususnya ke-Minangkabauan. Pengembangan yang inovatif harus dilakukan agar sekolah seni pertunjukan ini eksis dan diapresiasi oleh masyarakat, salah satunya melahirkan karya-karya seni, termasuk tari, musik dan karawitan. Sekolah ini mempunyai visi dan misi

yang bertujuan untuk mengedepankan kesenian pertunjukan ke-Minangkabauan baik berskala lokal, nasional, maupun internasional.

Oleh karena itu, dengan kehadiran SMK yang memiliki keahlian seni dan budaya daerah, ditengah-tengah banyaknya sekolah kejuruan dengan beragam keahlian, memudahkan generasi pelajar yang terdidik terutama bagi para lulusan setingkat SLTP untuk dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi sesuai dengan bakat seni yang telah dimiliki, serta dapat mempertahankan nilai-nilai kesenian tradisi Minangkabau ditengah-tengah maraknya kesenian Barat yang dapat memudahkan seni tradisi Minangkabau itu sendiri.

Budaya-budaya yang bersifat lokal kurang mendapat perhatian dari para pengelola dan penentu kebijakan pendidikan. Namun, SMKN 7 Padang sebagai satu-satunya SMK seni tradisi yang menjadikan karawitan Minang sebagai ciri khas sekolah dan digunakan sebagai materi dalam pembelajarannya, ditengah derasnya era globalisasi yang mengagung-agungkan modernitas, kebudayaan lokal yang menjadi ciri khas suatu daerah dan bangsa mesti dipertahankan.

Seni karawitan merupakan seni tradisional yang sekarang ini mulai redup dan jarang peminatnya. Oleh sebab itu, seni karawitan yang merupakan salah satu program keahlian pada SMK Seni dan Budaya harus dilestarikan. Untuk melestarikan budaya tradisional agar dapat bertahan eksistensinya, maka harus ada hubungan kerjasama antara siswa dengan masyarakat dan antara guru dengan masyarakat dalam mengusung berbagai acara seni dan budaya Minangkabau.

Karawitan sebagai materi pembelajaran di sekolah masih dipengaruhi oleh kaidah-kaidah tradisi sebagai ciri-ciri dari seni budaya lokal atau daerah. Seni tradisi secara umum dapat

## *Memperkuat Komitmen Keindonesiaan di Era G. 4.0*

dinyatakan sebagai bentuk budaya lokal adalah yang merupakan seni kelompok etnik yang memiliki kemapanan sistem nilai, patokan, aturan tertentu yang harus dipatuhi.

Lembaga-lembaga pendidikan yang bertujuan untuk melestarikan seni budaya bangsa perlu diselamatkan dan didukung. Semua pihak mesti mengapresiasi pendidikan seni budaya yang diterapkan oleh SMK seni terkhusus SMKN 7 Padang, karena telah memberikan wadah pada generasi muda bangsa dalam mendukung keunggulan seni dan budaya tradisional. Pendidikan kejuruan bidang keahlian seni budaya tradisi, punya cita-cita tinggi untuk memperkenalkan kekayaan seni dan budaya tradisional yang merupakan warisan nenek moyang untuk dilestarikan ke generasi berikutnya.

SMKN 7 Padang dalam upaya untuk melestarikan dan merawat nilai-nilai tradisi ke-Minangkabauan di Sumatera Barat, menuntut para siswa untuk aktif berkegiatan di luar sekolah. Misalnya dengan cara aktif di sanggar-sanggar seni budaya Minangkabau, dan nilainya dianggap sebagai sebuah kegiatan ekstrakurikuler. Sistem pendidikan yang diterapkan oleh SMKN 7 Padang adalah dengan pembagian porsi belajar 60% Teori, dan 40% praktek lapangan.

Saat ini terdapat enam jurusan keahlian di SMKN 7 Padang, yaitu:

1. Seni musik non klasik, dengan program keahlian pemain musik non klasik, pelatih musik non klasik, penata musik non klasik, penyanyi, dan pengiring musik non klasik.
2. Seni tari, dengan program keahlian penari, penata tari, pelatih tari, penata rias seni pertunjukan.
3. Seni kerawitan, dengan program keahlian pelatih dan pemain instrumen kerawitan Minangkabau, penata instrumen

kerawitan minangkabau, pengiring tari-tari minangkabau, dan penyanyi lagu-lagu minangkabau.

4. Seni teater, dengan program keahlian aktor dan aktris, sutradara, penata artistik, penulis naskah, dan drama/skenario.
5. Seni kecantikan wajah dan rambut, dengan program keahlian menjadi penata rambut, pelatih penata rambut, perawatan kulit dan wajah.
6. Teknik produksi dan penyiaran televisi, dengan program keahlian kameramen, penulis naskah, dan manajemen produksi dan penyiaran.

Dalam upaya untuk melestarikan nilai-nilai tradisi kebudayaan Minangkabau, SMKN 7 Padang konsisten untuk menjadikan poin tersebut menjadi visi dan misi SMKN 7 Padang, yaitu untuk menghasilkan lulusan yang profesional dan terampil di bidang seni pertunjukan, tata kecantikan dan teknologi informasi yang berbasis iman dan takwa, serta ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menumbuhkan kecintaan dan keterampilan siswa terhadap seni budaya daerah, nasional, dan mancanegara, serta mendukung berbagai program pemerintah dalam bidang pariwisata, seni dan budaya, sehingga berguna dan bermanfaat dalam masyarakat. Dalam hal kurikulum, SMKN 7 Padang mengutamakan kurikulum yang hasil akhirnya adalah upaya untuk merawat dan melestarikan nilai-nilai tradisi Minangkabau. Hal ini bertujuan untuk menanamkan rasa tanggung jawab moral pada siswa SMKN 7 agar menunaikan tugasnya sebagai agen pelestari nilai tradisi di Sumatera Barat.

### **C. PENUTUP**

Kehadiran SMKN 7 Padang sebagai sebuah sekolah kejuruan di Kota Padang memberikan angin segar dalam pelestarian nilai-

## *Memperkuat Komitmen Keindonesiaan di Era G. 4.0*

nilai budaya Minangkabau. Pada perkembangannya SMKN 7 Padang pernah memperoleh Akreditasi A dari pemerintah, namun saat ini akreditasi tersebut mengalami penurunan menjadi B. Akan tetapi, penurunan akreditasi tersebut ternyata tidak berdampak terhadap jumlah siswa yang masuk ke sekolah tersebut. Hal ini terlihat dengan pada grafik jumlah siswa SMKN 7 Padang setiap tahunnya yang terus mengalami kenaikan walaupun tidak secara signifikan. Kenaikan jumlah siswa yang mendaftar dan bersekolah disana salah satunya disebabkan karena orientasi siswa yang mendaftar tersebut nantinya setelah menamatkan Sekolah Menengah Atas tersebut, mereka ingin langsung terjun ke dunia kerja dengan keterampilan yang telah mereka peroleh selama bersekolah di SMKN 7 Padang. Hal tersebut juga dilatarbelakangi oleh latar belakang kondisi perekonomian keluarga siswa yang rata-rata merupakan kalangan menengah ke bawah.

### **Daftar bacaan**

- Ahmadi, Abu dan Nur Uhbiyati. 1991. *Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bahar, Mahdi. 2004. *Seni Tradisi Menentang Perubahan*. STSI Padang Panjang.
- Beeby, C.E. 1981. *Pendidikan di Indonesia Penilaian dan Pedoman Perencanaan*. Jakarta: LP3ES.
- Damsar, dkk. 2008. *Padang Reconstruction Kampus Bicara Tentang Kota Padang Kampus Menulis Tentang Kota Padang*. Padang: BEM KM Unand.
- Daulay, Haidar Putra. 2007. *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indones*. Jakarta: Kencana Media Group.
- Gunawan, H Ary. 2000. *Sosiologi Pendidikan Suatu Analisis Sosiologi Tentang Berbagai Problem Pendidikan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

- Hasbullah. 2005. *Dasar-Dasar Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ihsan, Fuad. 1996. *Dasar-Dasar Kependidikan*. Jakarta: Rinekan Cipta.
- Mudyahardjo, Redja. 2003. *Pengantar Pendidikan: Sebuah Studi di Awal tentang Dasar-Dasar Pendidikan Pada Umumnya Dan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nasution. 1995. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- \_\_\_\_\_. 2001. *Sejarah Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Navis, A.A. 1986. *Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Ruang Pendidikan INS KayuTanam Sumatera Barat.
- Sedyawati, Edi. 2010. *Budaya Indonesia Kajian Arkeologi, Seni dan Budaya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sjamsudin, Helius. 2012. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Soenaryo, dkk. 2002. *Sejarah Pendidikan Teknik Dan Kejuruan Di Indonesia, Membangun Manusia Produktif*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan.
- Tirtarahardja, Umar. 2005. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Wadiyo. 2008. *Sosiologi Seni*. Semarang: Universitas Negeri Semarang Press

## *Memperkuat Komitmen Keindonesiaan di Era G. 4.0*

# Relasi BUMN dan Masyarakat Adat di Sumatera Barat PT Semen Padang dan PT BA UPO

Israr Iskandar, S.S.,M.Si , Dr. Lindayanti, M.Hum

## Abstrak

Hubungan antara BUMN dengan masyarakat adat di Sumatera Barat selalu naik turun. Itulah gambaran hubungan antara masyarakat nagari Lubuk Kilangan dengan perusahaan PT Semen Padang dan masyarakat nagari Kubang dengan PT Bukit Asam UPO (TBO) Sawahlunto yang tidak kunjung tuntas hingga kini. Walaupun dua perusahaan “pelat merah” itu sudah beroperasi sejak lebih seabad lalu, namun persoalan utama yang berkelanjutan tetap saja terkait keberadaan dan operasional BUMN tersebut di atas lahan yang notabene tanah ulayat masyarakat adat. Jika di masa lalu, khususnya periode pra-reformasi, masyarakat adat tidak leluasa menuntut apa yang disebut sebagai hak-haknya, bahkan nyaris tidak terdengar, maka di era reformasi dan otonomi daerah, mereka menyampaikannya dengan lugas.

Kata Kunci: BUMN, Masyarakat Adat, Otonomi.

## **Pendahuluan**

Keberadaan badan usaha milik negara (BUMN) khususnya yang bergerak dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) di suatu daerah tidak jarang menghadapi permasalahan terkait status lahan lokasi operasional perusahaan. Kasus tuntutan masyarakat nagari Lubuk Kilangan di kota Padang terhadap perusahaan PT Semen Padang (dewasa ini menjadi anak perusahaan PT Semen Indonesia) dan aspirasi masyarakat nagari Kubang di Sawahlunto terhadap PT Bukit Asam Unit Produksi Ombilin (PT BA UPO) yang berkelanjutan hingga dewasa ini terkait langsung dengan lahan lokasi operasional perusahaan warisan kolonial Belanda itu.

Selama ini berkembang persepsi di kalangan masyarakat Lubuk Kilangan sendiri bahwa BUMN semen yang beroperasi di lahan ulayat mereka belum memberikan kontribusi yang layak bagi masyarakat sekitar. Perusahaan mengeksploitasi kekayaan alam di lahan warisan nenek moyang mereka, namun semua keuntungannya disetor ke kas negara dan kemudian juga pemegang saham perusahaan. Masyarakat sekitar tak lebih sebagai penonton. Walaupun ada anak nagari yang bekerja di Semen Padang (SP), namun jumlahnya kurang dari 10 persen. Walaupun belakangan ada satu dua putra lokal memegang posisi kunci di SP, misalnya sebagai anggota komisaris, namun keberadaan mereka dianggap tidak berkontribusi banyak bagi pembangunan Nagari.<sup>1</sup>

Sementara itu, aspirasi masyarakat Nagari Kubang terhadap PT BA UPO/TBO berangkat dari kondisi perusahaan tambang yang tidak lagi beroperasi secara riil di lapangan karena deposit batubaranya, khususnya untuk tambang terbuka, sudah habis. Masyarakat Kubang menilai bahwa sudah seharusnya PT BA menyerahkan kembali tanah eks tambang ke masyarakat adat, karena perusahaan secara riil sudah berhenti beroperasi. Namun pihak PT BA UPO menyangkal mereka sudah benar-benar berhenti

beroperasi. PT BA UPO juga menyatakan masih memiliki banyak sekali aset perusahaan yang harus dijaga dalam bentuk bangunan, lahan, peralatan dan lainnya.

Pada masa lalu, tuntutan masyarakat terhadap BUMN yang ada di wilayah mereka sudah pernah dimunculkan. Bahkan untuk SP ada beberapa kali. Namun sistem politik otoritarian, khususnya periode Orde Baru, tidak pernah mengakomodasi secara sungguh-sungguh aspirasi warga. Suara-suara kritis dari masyarakat, sekalipun atas nama hak-hak kultural masyarakat adat, akan dibungkam atau diabaikan begitu saja oleh perusahaan maupun penguasa politik masa itu. Kasus di banyak daerah, suara-suara kritis masyarakat bahkan bisa dianggap atau dituduh sebagai upaya makar kepada Pemerintah.

Kedatangan era reformasi dan otonomi daerah memberikan kesempatan besar kepada warga di daerah-daerah, termasuk warga Lubuk Kilangan di Padang dan Kubang di Sawahlunto, untuk melayangkan tuntutan-tuntutan mereka yang tersumbat selama ini kepada pemerintah maupun perusahaan BUMN yang ada di wilayah mereka. Mereka melihat komunitas-komunitas adat di daerah-daerah lain juga begitu. Untuk SP, masyarakat Lubuk Kilangan berharap BUMN tersebut mengakui secara tegas keberadaan hak ulayat mereka dan kemudian (di atas itu) membantu memberdayakan masyarakat sekitar lebih maksimal lagi, bukan sekedar “pelepas dahaga” bersifat sementara. Padahal di sisi lain, produksi dan keuntungan perusahaan terus membesar dari tahun ke tahun. Sementara masyarakat Kubang berharap PT BA UPO mengembalikan tanah ulayat masyarakat adat untuk dikelola kembali, karena perusahaan pertambangan batubara itu tidak beroperasi lagi.

## **Hasil dan Pembahasan**

Hubungan “panas dingin” antara dua BUMN besar di Sumbar dengan masyarakat sekitar perusahaan sudah sangat panjang. Bahkan sejak zaman kolonial Belanda, ketika perusahaan “pelat merah” itu mula beroperasi, sekalipun ekspos atas pola relasi masyarakat adat dan korporasi-korporasi besar tersebut masih terbatas sekali.

Untuk kasus Semen Padang, tuntutan dilayangkan masyarakat nagari Lubuk Kilangan, sebuah nagari yang memang kaya dengan bahan baku industri semen seperti batu kapur, silika, dan tanah liat (Erjoni, 2010). Sementara untuk konteks PT BA UPO/TBO, tuntutan paling berani disampaikan masyarakat nagari Kubang, salah satu nagari penghasil batubara di kota Sawahlunto. Tuntutan terhadap BUMN-BUMN itu atas nama hak-hak masyarakat adat yang dilanggar atau tidak diperhatikan selama ini.

## **Semen Padang dan Masyarakat Lubuk Kilangan**

Semen Padang merupakan perusahaan warisan kolonial Belanda yang mula beroperasi tahun 1910, namun sudah dirintis dan dibangun sejak 1907. Sewaktu akan dibangun itu, pihak kolonial yang sudah melakukan pendekatan dan kesepakatan dengan masyarakat adat terkait lahan lokasi pabrik, sumber bahan baku serta aliran sungai sumber energi listrik bagi pabrik semen. Hal itu dilakukan, karena semua lahan tersebut adalah tanah ulayat warga nagari.

Konsensus dengan masyarakat nagari tertuang dalam *Keboelatan Kerapatan Nagari Lubuk Kilangan No 8 Tahun 1907*. Di antara butir penting yakni penyerahan hak guna lahan dari masyarakat ke CC Lau (tokoh yang menemukan dan merintis pabrik semen itu) akan dikompensasi dengan uang jasa sebanyak

400 gulden yang diserahkan Lau kepada masyarakat nagari setiap tahunnya. Disebutkan juga bahwa CC Lau juga bersedia memenuhi tuntutan ninik mamak agar perusahaan nantinya memberikan kesempatan bekerja kepada anak nagari setempat baik ketika proses pembangunan pabrik maupun setelah pabrik beroperasi (Zed, 2000).

Ternyata kemudian yang menjadi pelaksana pabrik semen itu bukan CC Lau pribadi melainkan dialihkan ke sebuah perusahaan yang dibentuk bernama NV *Nederlandsch Indie Portland Cement Maatschappij* (NIPCM). Dengan demikian kesepakatan penyerahan tanah ulayat untuk lokasi pabrik dan bahan baku semen diperbarui pula dari masyarakat ke NV NIPCM, tertanggal 11 Juni 1910. Secara umum substansi kesepakatan masyarakat Lubuk Kilangan dengan NV NIPCM sama dengan kesepakatan mereka dengan CC Lau tahun 1907.

Sejarah panjang pabrik semen itu kemudian, dimulai dari akhir zaman Belanda, Jepang, hingga awal kemerdekaan, tidak begitu banyak mendeskripsikan hubungannya dengan masyarakat adat. Perusahaan semen itu sendiri adalah gambaran sejarah pabrik yang jatuh bangun melewati berbagai krisis, sampai nyaris dilego sebagai besi tua tahun 1960-an sampai akhirnya “diselamatkan” pemerintah dan elit-elit Minang di Jakarta. Masa-masa penyelamatan Semen Padang di masa awal Orde Baru itulah keterlibatan dan pengorbanan masyarakat Lubuk Kilangan untuk perusahaan terbesar di Sumbar itu kembali dicatat oleh sejarah.

Singkat cerita, pada tahun 1970, masyarakat Lubuk Kilangan kembali menyerahkan tanah ulayatnya seluas 126,3 ha kepada perusahaan yang kemudian bernama PN Semen Padang. Kebetulan saat itu, beberapa tahun pasca-krisis, pihak Semen Padang berencana merehabilitasi dan memodernisasi perusahaan, sehingga pihak manajemen dan dibantu pula Bupati Padang Pariaman

## *Memperkuat Komitmen Keindonesiaan di Era G. 4.0*

kemudian memohon kesediaan masyarakat Lubuk Kilangan menyerahkan tanah ulayat yang merupakan lokasi perluasan pabrik dan sumber bahan baku. Namun demikian, masyarakat tetap menuntut SP untuk mengutamakan anak nagari mereka dalam perekrutan tenaga kerja ketika terjadi perluasan perusahaan dimaksud. Sebenarnya, penyerahan saat itu langsung “dikompensasi” oleh SP dengan pembangunan sebuah masjid dan kantor KAN. Bahkan BUMN ini juga mengganti semua bangunan dan tanaman yang ada di atas lahan yang akan diserahkan (Zed, 2010).

Pada tahun 1995, ketika pemerintah menggabungkan Semen Padang, Semen Gresik (Jawa Timur) dan Semen Tonasa (Sulawesi) ke sebuah grup bernama Semen Gresik Group (SGG), sebenarnya terkandung masalah krusial terkait status lahan lokasi perusahaan dan sumber bahan baku pabrik semen Padang. Masyarakat Sumbar secara umum protes atas kebijakan pemerintah menggabung tiga BUMN itu, namun protes lokal itu tidak begitu lugas dan tegas. Lewat memorandum DPRD Sumbar, ada satu butir terkait tanah ulayat di mana dewan mengingatkan pemerintah pusat bahwa keberhasilan Semen Padang selama ini karena kesukarelaan masyarakat menyerahkan tanah ulayatnya. Namun suara lunak tersebut tidak ditanggapi. Pemerintah pusat tetap menjalankan niatnya menggabungkan SP, SG dan ST. Padahal SG sendiri sudah *go public*, di mana sebagian sahamnya sudah dimiliki swasta. Dengan penggabungan itu, maka posisi kepemilikan pemerintah di SP pun menjadi sama dengan kepemilikan pemerintah di SG dan ST.

Pada titik ini, suara masyarakat Lubuk Kilangan hampir tak terdengar sama sekali. Waktu itu tuntutan dilayangkan oleh DPRD Sumbar supaya lebih bergema dan diharapkan akan dipertimbangkan dengan bijaksana oleh pemerintah pusat. Namun

namanya zaman otoriter dan sentralisme: Alih-alih suara masyarakat Lubuk Kilangan, suara DPRD dan Pemda Sumbar saja bisa “dikesampingkan” oleh pihak Jakarta. Pemerintah Pusat nampaknya tidak peduli, bahwa dengan bernaungnya Semen Padang di bawah SGG yang sudah *go public*, maka ketentuan tanah ulayat nagari Lubuk Kilangan yang tidak boleh diperjualbelikan pun terlanggar.

Hal serupa terjadi pada saat Pemerintah menjual sahamnya di SGG ke Cemex, Mesksiko, sampai Cemex memiliki 24 persen saham di SGG, termasuk di dalamnya SP. Masyarakat Lubuk Kilangan, bahkan masyarakat Sumbar sendiri, tak bisa berbuat banyak untuk menentang kebijakan Jakarta. Kalau sudah diprivatisasi, apalagi ke pihak asing, maka itu artinya status tanah ulayat akan ikut “terjual” ke pihak swasta, termasuk investor asing. Padahal tanah ulayat yang diserahkan masyarakat nagari ke Semen Padang hanya dalam batas pemanfaatan hak guna sebagaimana kesepakatan dengan PT Semen Padang, bukan kesepakatan dengan SGG maupun Cemex dan pihak ketiga lainnya.

Hanya saja fokus masyarakat Lubuk Kilangan memang hanya memperjuangkan hak-haknya kepada SP. Urusan dengan pemerintah pusat, investor asing, dan pihak ketiga lainnya adalah urusan SP. Tak heran, pada tahun 1997, masyarakat nagari yang diwakili KAN kembali protes ke SP karena menuding perusahaan bekerjasama dengan pemda “mengambil alih” lahan warga tanpa musyawarah dengan pemuka adat setempat. Lahan baru yang diokupasi adalah sumber bahan baku pabrik. Tak hanya KAN, peladang juga protes, meminta upah garap lahan yang selama ini telah mereka lakukan.

Pada saat muncul gerakan elit Sumbar yang meminta pemisahan (*spin-off*) SP dari SGG tahun 1999, masyarakat Lubuk Kilangan menunjukkan sikap yang berbeda. Mulanya KAN Lubuk

## *Memperkuat Komitmen Keindonesiaan di Era G. 4.0*

Kilangan berada dalam satu barisan dengan elit Propinsi, tapi ketika mereka melihat para aktor gerakan itu sudah mendahulukan kepentingan pribadi dan kelompoknya, maka KAN Lubuk Kilangan memilih mundur. Namun hal ihwal perbedaan sikap itu juga karena pihak SP menolak permintaan KAN agar perusahaan memberikan kontribusi Rp5 per zak semen ke masyarakat adat. Pihak perusahaan melihat hal itu sebagai bentuk pungli. Penolakan manajemen SP itu membuat KAN tersinggung sampai akhirnya memilih sikap berbeda dengan SP dan elit Sumbar dalam menghadapi Pemerintah Pusat. KAN malah kemudian terkesan mendukung pemerintah untuk menambah kepemilikan Cemex di SGG (*put option*). Mereka bahkan terkesan “meyambut” kedatangan investor asing di Indarung.

Pada tahun 2017 muncul lagi tuntutan baru dari KAN agar SP memberikan kontribusi lebih besar lagi pada masyarakat Lubuk Kilangan. Ada beberapa tuntutan KAN yang mesti dipenuhi SP yang semuanya terkait kepentingan anak nagari, seperti prioritas rekrutmen tenaga kerja, jabatan komisaris, dan kontraktor lokal. Selain itu KAN juga menuntut komisi untuk nagari Rp20 ribu per ton semen. Pihak nagari menyadari, kondisi SP saat ini berbeda dengan sebelumnya. Jika dulu SP adalah perusahaan BUMN murni, maka belakangan sudah menjadi anak perusahaan belaka dari SGG dan kini Semen Indonesia. Bahkan sejak 2018, jumlah direksi SP dikurangi dari lima menjadi tiga saja dan komisaris dari lima menjadi tiga. Walaupun berat untum dipenuhi, tapi sebagai aspirasi, KAN harus menyampaikannya, karena SP berada di atas tanah ulayat.

### **PT BA UPO, Sawahlunto dan Kubang**

Sementara itu konflik agraria antara PT BA UPO dengan masyarakat Kubang Sawahlunto pasca-Orde Baru juga berangkat

dari klaim kedua belah pihak terkait status (kepemilikan) tanah (eks) lokasi tambang. Walaupun nagari-nagari lain juga punya “urusan” dengan PT BA UPO terkait lahan eks tambang, namun nagari Kubanglah yang cukup lantang menyampaikan aspirasinya ke perusahaan maupun pemerintah kota Sawahlunto.

Masyarakat Kubang mengatakan lahan yang tidak lagi ditambang PT BA UPO semestinya diserahkan kembali ke masyarakat nagari. Selain karena lahan eks tambang itu merupakan tanah ulayat warisan nenek moyang orang Kubang, tetapi juga karena lahan-lahan itu notabene tak lagi “dimanfaatkan” PT BA UPO. BUMN itu sudah mengurangi aktivitasnya bahkan kemudian menghentikan kegiatan penambangan, karena deposit tambang terbukanya sudah habis.

Dalam proses tuntutan itu, masyarakat Kubang berharap PT BA dan Pemda Sawahlunto tidak seperti pemerintah kolonial: Tidak mengindahkan hukum adat dan tidak memenuhi janjinya kepada masyarakat Kubang yang telah menyerahkan tanah ulayatnya untuk ditambang. Dalam memori sejarah masyarakat Kubang, Belanda enggan menyisihkan keuntungan perusahaan untuk masyarakat Kubang, karena menganggap sebagian besar tanah ulayat yang ditambang itu adalah tanah negara di mana pemerintah kolonial Belanda berhak mengelolanya.

Namun dalam perkembangannya, masyarakat Kubang melihat model kebijakan dan cara pandang PT BA UPO dan Pemda Sawahlunto soal tanah ulayat eks tambang tak berbeda dengan kolonial Belanda.<sup>2</sup> Keduanya (seolah) memperlakukan tanah ulayat masyarakat Kubang sebagai tanah negara. Tidak hanya itu, tapi juga sikap perusahaan dan Pemda pada warga nagari. Jika di masa lampau pemerintah kolonial enggan membayar uang adat kepada masyarakat, maka Pemda Sawahlunto merasa tak perlu melibatkan

## *Memperkuat Komitmen Keindonesiaan di Era G. 4.0*

masyarakat Kubang ketika hendak memperpanjang KP PT BA UPO, sekalipun perusahaan itu tak beroperasi lagi.<sup>3</sup>

Atas dasar itulah masyarakat Kubang di awal reformasi, tepatnya tahun 2000, melakukan protes dan perlawanan dengan cara mengambilalih sebagian lahan kuasa pertambangan (KP) PT BA UPO. Mereka dan juga banyak pekerja yang datang dari luar Sawahlunto melakukan kegiatan penambangan batubara yang kemudian dikenal sebagai PETI (penambangan tanpa izin). Kegiatan itu akhirnya dihentikan aparat. Pada saat itulah pihak KAN Kubang melancarkan tuntutan atas lahan eks tambang PT BA UPO, namun tidak mendapatkan tanggapan dari Pemda Sawahlunto maupun PT BA UPO.

Pada bulan Oktober 2002, KAN menyurati PT BA UPO dengan tuntutan yang sama, namun respon manajemen BUMN itu tetap “dingin”. Alasannya saat itu Pemda Sawahlunto sedang menginventarisir tanah-tanah tersebut. Pada masa pemerintahan Walikota Amran Nur, KAN Kubang kembali melakukan pendekatan berhubung KP PT BA UPO akan berakhir dan segera akan diperpanjang. Namun saat perpanjangan KP dimaksud, Pemda Sawahlunto tak mengajak *ninik mamak nagari* Kubang untuk memusyawarakannya.

Pada Juni 2007, KAN melayangkan somasi kepada Pemda Sawahlunto, PT BA UPO dan PT KAI (Kereta Api Indonesia) Sumbar. KAN mengajak pihak-pihak dimaksud untuk “duduk bersama” membicarakan seluruh permasalahan terkait pemanfaatan tanah eks tambang, namun somasi tersebut tak mendapatkan tanggapan apapun dari pihak-pihak dimaksud. Di bulan Juli 2007, KAN kembali melayangkan somasi keduanya. Intiuntutannya hampir sama, namun tetap tidak mendapatkan respon apapun dari pihak terkait.

Pihak masyarakat Kubang terutama KAN juga mengakui, mereka tak bisa “bersikeras” karena mereka tak memiliki bukti otentik bahwa lahan eks tambang PT BA UPO itu adalah lahan ulayat warga yang harus dikembalikan setelah tidak dipakai lagi. Mereka hanya menyangkan, pihak PT BA UPO “menutup rapat” akses terhadap dokumen penyerahan tanah ulayat dari masyarakat Kubang kepada pihak Belanda di akhir abad 19. KAN meyakini, dokumen itu dapat menjelaskan banyak hal, termasuk status tanah eks tambang yang tetap dikuasai PT BA UPO.

Pihak PT BA UPO sendiri memang terkesan menutup rapat akses terhadap dokumen penyerahan lahan dimaksud. Alasannya “rahasia perusahaan”. Namun intinya, tanah eks tambang tetap merupakan milik perusahaan PT BA UPO karena sudah memiliki status HGU. Nampaknya pendirian PT BA itu didasarkan pada sikap Belanda dulu yang menganggap bahwa untuk hak guna tanah cukup dibayar sekali saja ke penghulu dan selanjutnya tanah sudah berpindah kepemilikan menjadi tanah pemerintah (kolonial) dari sebelumnya tanah lepas (versi Belanda) ataupun tanah ulayat (versi warga).<sup>4</sup>

## **Kesimpulan**

Hubungan dengan pola naik turun antara masyarakat adat dengan BUMN besar di wilayah Sumbar telah memiliki sejarah yang panjang terkait keberadaan BUMN-BUMN itu di atas tanah ulayat masyarakat nagari. Warga ternyata tak hanya menuntut kontribusi maksimal lagi dari BUMN terhadap warga yang nenek motangnya dulu berkorban untuk perusahaan dan pemerintah berkuasa, tetapi juga pengakuan atas status tanah ulayat dimaksud.

Masyarakat Lubuk Kilangan sendiri misalnya tak mempersoalkan Semen Padang dikelola pihak investor manapun asal terus berkontribusi positif dan maksimal bagi warga sekitar.

## *Memperkuat Komitmen Keindonesiaan di Era G. 4.0*

Tak hanya itu, mereka berharap perusahaan dan pemerintah tak menyangkal status tanah ulayat nagari yang menjadi lokasi perusahaan dan sumber bahan baku pabrik semen. Tapi tentu saja, harapannya juga, perusahaan semen itu tetap berstatus BUMN di mana mayoritas atau seluruh sahamnya dimiliki pemerintah.

Sementara konflik masyarakat Kubang dengan PT BA UPO yang sudah berhenti melakukan aktivitas penambangan tentu akan lebih terang jika status eks lahan tambang itu diperjelas. Penjelasan atas status hukum lahan eks tambang, bahkan merunut akar historisnya, menjadi sangat penting bagi penyelesaian konflik agraria jangka panjang, sekalipun perusahaan itu tak lagi melakukan aktivitasnya. Kepastian hukum menjadi suatu yang niscaya bagi pihak manapun.

Perihal kontribusi lewat dana CSR kepada masyarakat memang suatu yang sudah semestinya dilakukan perusahaan manapun, termasuk BUMN. Namun jangan sampai hal itu menjadi “solusi temporer” belaka, ketika status lahan dimaksud tak diperjelas dari segi sejarah maupun kemudian tinjauan hukumnya.

### **Daftar Pustaka**

- Erman, Erwiza. 1999. *Miners, Managers, and The States. A socio political history of the Ombilin Coal Mines West Sumatera 1892-1996*. Amsterdam: Universteit Amsterdam.
- Hidayat, Syarif (editor). 2003. *Kegamangan Otonomi daerah*. Jakarta: Pustaka Quantum.
- Sulistiyarningsih, 2005. “Status Tanah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Semen Padang yang berdiri di atas tanah ulayat Masyarakat Adat Sumatera Barat”. *Tesis Magister Hukum Universitas Airlangga*.

- Israr, Iskandar 2007. *Elit Lokal, Pemerintah dan Modal Asing: Kasus Gerakan Spin-off PT Semen Padang dari PT Semen Gresik*. Jakarta: SAD dan CIRUS.
- Erjoni. 2010. *Konflik Tanah Ulayat antara Masyarakat Batu Gadang dan PT Semen Padang*. Skripsi. Jurusan Sejarah Universitas Andalas.
- Semen Padang. 2010. *On Going Transformation Laporan Tahunan Semen Padang*.
- <https://www.kabarin.co/anak-nagari-lubuk-kilangan-minta-semen-indonesia-hormati-hak-ulayat-ninik-mamak-kami-berikut-sejarahny/>

### Catatan

<sup>1</sup>Wawancara dengan Basri Dt Rajo Usali, Ketua Kerapan Adat Nagari (KAN) Lubuk Kilangan Padang, di Batugadang, Padang, 11 September 2018. KAN adalah institusi adat di tingkat nagari di Minangkabau yang anggotanya merupakan perwakilan suku-suku yang ada di nagari bersangkutan.

<sup>2</sup> Sejak awal masyarakat Kubang memang sudah merasakan kebijakan tidak adil Belanda. Dalam masalah pembebasan lahan yang mengandung kekayaan batubara, pemerintah kolonial memaksakan persepsinya sendiri kepada warga pemegang hak ulayat. Pemerintah hanya mau mengantirugi lahan sawah dan lahan kering garapan penduduk. Sementara lahan kosong tidak dianggap sebagai lahan ulayat warga sehingga tidak perlu diganti rugi. Lahan lepas dianggap sebagai tanah negara di mana pemerintah (kolonial) memiliki hak mengelolanya.

<sup>3</sup> Wawancara dengan Akmal, tokoh masyarakat Kubang. Wawancara di Sawahlunto, 3 September 2018.

<sup>4</sup> Wawancara dengan Akmal, tokoh masyarakat Kubang. Wawancara di Sawahlunto, 3 September 2018.

*Memperkuat Komitmen Keindonesiaan di Era G. 4.0*

# Feminisasi Peran Perempuan dalam Pertanian Hortikultura di Nagari Alahan Panjang Kabupaten Solok

Dr. Midawati, M.Hum, Drs.PurwoHusodo, M.Hum

## 1. Pendahuluan

Modernisasi pertanian di negara maju mahupun di negara berkembang, ditandai dengan “Revolusi Hijau”. Revolusi Hijau ini terjadi akibat kemajuan pesat di dunia barat setelah Perang Dunia Kedua, yang mempercepat pertumbuhan dalam pertanian. Kemajuan dalam bidang pertanian dibuktikan dengan peningkatan mutu tanaman dan hewan, penemuan jenis tanaman yang dapat menghasilkan cukup banyak, teknologi pemupukan, perlindungan tanaman melalui racun pembasmi hama. Di samping itu ditemukannyatekhnik yang cocok untuk dipergunakan di daerah tropis, yang didasarkan atas jenis tanaman dan hasilnya cukup baik.

Di negara berkembang telah dilakukan banyak penelitian. Di Meksiko penelitian dilakukan oleh *International Maize and Wheat Improvement Center* dan di Filipina oleh *International Research Institute*, memegang peranan dalam revolusi ini. Di Meksiko panen rata-rata gandum mengalami kenaikan rata-rata 0.94 ton per ha pada tahun 1949 menjadi 2.64 ton pada tahun 1968. Di Filipina penanam jenis tanaman baru diharapkan menghasilkan panen dua kali lipat. Jenis tanaman tersebut sudah banyak ditanam di pelbagai tempat di dunia, terutama di India, Pakistan, Turki dan Tunisia. Antara

## *Memperkuat Komitmen Keindonesiaan di Era G. 4.0*

tahun 1965 da 1970, areal pertanian bertambah luas dari 20 000 ha menjadi 15-20 juta ha. Keberhasilan dalam memperluas penanaman dibarengi dengan pemupukan, pembasmi hama dan irigasi (Malasis 1978: 66).

Terdapat beberapa temuan akibat Revolusi Hijau. Pertama, tanaman baru biasanya cenderung ditanam di beberapa daerah yang menguntungkan, seperti memiliki kesuburan, kemudahan memperoleh sarana produksi baru seperti bibit baru, pupuk, pestisida dan serta jaringan perniagaan. Namun hal tersebut memperbesar jurang antar daerah, persaingan semakin ketat dan posisi daerah yang tidak menguntungkan semakin memburuk. Kedua, keuntungan teknologi baru biasanya hanya dinikmati oleh petani besar. Akibatnya jurang sosial bertambah besar. Petani besar biasanya lebih dapat menerima pembaharuan, lebih terpelajar dan lebih banyak dapat mengikuti perkembangan mutakhir, modal yang cukup dan lebih mudah mendapat kredit. Ketiga, Revolusi Hijau memberi banyak tersedia lapangan kerja pada masa produksi pertanian yang semakin intensif. Akan tetapi sistem pertanian yang menerapkan mekanisasi pertanian mengurangi jumlah pekerjaan dalam pertanian. Keempat, pengaruh Revolusi Hijau tidak hanya ditentukan oleh agronomi, tetapi juga oleh faktor sosial ekonomi. Revolusi Hijau tidak akan terjadi bila sistem pendidikan dan penyuluhan tidak serius dilakukan (Malasis 1978: 66-67) .

Di Indonesia pemerintahan Indonesia telah memulai Revolusi Hijau ini sejak tahun 1966, iaitu sejak masa Orde Baru, semakin intensif sejak tahun 1970. Kebijakan pemerintah dalam meningkatkan produksi tanaman pangan utama, telah mengantarkanteknologi ke pedesaan. Pemerintah telah mengeluarkan paket-paket Bimas, Inmas, Insus, Super Insus dan sebagainya sampai tahun 1987. Paket-paket tersebut sudah

meningkatkan produksi padi, dan telah berhasil menjadi negara swasembada beras setelah tahun 1984 (Bechtold 1988: xiii). Penemuan terbaru dalam sistem pertanian dan bibit baru telah banyak diperbaharui sampai sekarang ini (2018).

Pembahasan mengenai perempuan di pertanian telah ditulis oleh peneliti. Aktivitas perempuan di pedesaan di negara Amerika Latin (Giarracca dan Taubal: 2011), perempuan mempunyai peranan yang penting di dalam sistem produksi tanaman yang dapat dijual, pekerjaan daur ulang di negara sub-Sahara Afrika (SOFA teams UN: 2011), pemberdayaan perempuan sebagai penghasil tanaman pangan untuk mengurangi malnutrisi (kurang gizi) di Nigeria (2001), memberikan kredit terhadap perempuan dalam mengurangi kekerasan kepada mereka dalam sistem patriarkhi di Bangladesh (Schullerdkk :1996), produksi pertanian tanaman pangan di pedesaan Kenya didukung oleh pasar perempuan (*market women*) (Kiteme:1992, Turritin 1988). Terjadi perubahan pola hubungan gender di Negeri Sembilan ketika pola pertanian yang sawah ditinggalkan akibat pendidikan serta merantau ke banyak kota (Azizah Kasim: 1988).

Pengakuan terhadap kerja perempuan di pertanian sawah di Jawa cukup signifikan mencapai 5,2 jam perhari, namun mereka masih dianggap kurang mampu dan kurang pengetahuan (Hutajulu :2015). Walaupun terjadi modernisasi pertanian, namun modernisasi itu menggeser mereka dari pertanian dan mengurangi pendapatan mereka (Nurpilihandkk: 2000). Pembangunan gagal melihat peran perempuan di pertanian gagal melihat peran perempuan dalam ekonomi pertanian berubah menjadi lemah bahkan sama sekali ditiadakan. Kemudian mengukuhkan nilai-nilai dari suatu masyarakat di mana aktivitas perempuan dibatasi di sekitar tugas-tugas rutin rumahtangga, di sekitar mengurus anak

## *Memperkuat Komitmen Keindonesiaan di Era G. 4.0*

(HadrianaMarheiniMunthe: 2002). Perempuan dianggap sebagai pembantu kerja lelaki (Tim PSG Stain Pekalongan: 2010).

Hal yang terjadi di Jawa, berbeda dengan keadaan yang terjadi di Sumatera Barat. Komersialisasi pertanian dari pertanian padi sawah satu kali dalam setahun menjadi 3 kali dalam setahun, yang terjadi di nagari Batuhampar menyebabkan peran perempuan meningkat (Midawati: 2005), dalam segi ekonomi dan sosial antara perempuan dan lelaki saling melengkapi (Davis: 1994).

Feminisasi dimaksudkan bahwa terjadi peningkatan peran perempuan sebagai ibu dalam rumah tangga mahupun di luar rumah. Di Minangkabau yang berdasarkan sistem matrilineal, perempuan diberi pemahaman sebagai “ibu rumah tangga”, ‘domestik’ dan ‘kerja’. Artinya wanita menjalankan fungsi sebagai ibu daripada anak-anak yang mengerjakan pekerjaan rumah tangga (domestik) dan ia sebagai pekerja baik mengurus dan mengelola lahan pertanian mahupun sebagai peniaga (Blackwood 1995:145). Ketika seorang ibu, menyatakan ia seorang ibu rumah tangga, dalam ungkapan tersebut mencakup pekerjaan rumah tangga, pertanian, niaga dan warung.

### **2. Metode penelitian**

Penelitian dilakukan di nagari Alahan Panjang. Nagari Alahan Panjang terdiri dari 10 jorong, yaitu Alahan Panjang, Batu putih, Batang Hari, Galagah, Padang Laweh Alahan Panjang, TaratakTengah Alahan Panjang, TaratakGalundi, Taluak Dalam, Pangaliah Kayu dan Jorong Usak. Untuk kajian ini diambil 30 % dari jumlah jorong, iaitu tiga jorong, jorong Batu Putih, Batang Hari dan TaratakTengah Alahan Panjang. Penelitian ini menggunakan penelitian survey dengan menggunakan angket. Jumlah angket yang disebar kepada petani perempuan sebanyak

110 angket. Metode statistik digunakan adalah deskriptif untuk memperoleh persentase, dengan menggunakan sistem SPSS.

### **3. Geografi dan transportasi di Nagari Alahan Panjang**

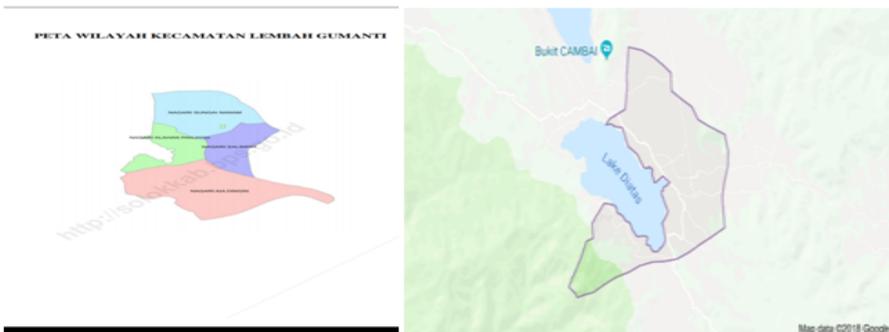
Nagari Alahan Panjang terletak di dalam kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok. Kecamatan ini sebelah utara berbatasan dengan kecamatan PayuangSakaki, sebelah selatan dengan kabupaten Pesisir Selatan dan kecamatan Pantai Cermin, sebelah barat dengan kecamatan Danau Kembar dan sebelah timur dengan kecamatan Hiliran Gumanti. Dalam kawasan Kecamatan lembah Gumanti terdapat 4 nagari, yaitunagari Alahan Panjang, Sungai Nanam, Salimpat dan Air Dingin. Luas keseluruhan kecamatan seluas 459,72 km<sup>2</sup>. Nagari Alahan Panjang mempunyai luas 88, 76 km<sup>2</sup>, Air Dingin luasnya 126,39 km<sup>2</sup>, Salimpat dengan luas 80,03 km<sup>2</sup> dan nagari Sungai Nanam dengan luas 164,54 km<sup>2</sup>. Kawasan nagari Alahan Panjang terletak di dataran tinggi iaitu 145- 1680 meter dari permukaan laut dan mempunyai suhu yang dingin, tanah yang subur sehingga sesuai untuk tanaman sayuran. Nagari ini mempunyai luas lahan yang sawah yang ditanami padi seluas 10 ha untuk irigasi teknis dan 5 ha setengah teknis. Sawah yang ditanami tanaman hortikultura seluas 1704 ha pada tahun 2017 (MonografiNagari: 2018). Dapat disimpulkan bahwa pertanian hortikultura di sawah memang jauh lebih luas dari pada padi sawah.

Berkurangnya penduduk menanam padi di sawah disebabkan bahwa tanaman padi tidak menguntungkan berbanding tanaman sayuran. Tanaman padi dengan sistem padi cepat panen selama 4 dan 3 bulan tidak bisa ditanam di sawah karena tidak menghasilkan. Padi yang bisa ditanam adalah padi yang berumur 7 bulan. Beras di Alahan Panjang berwarna kemerahan, tidak berwarna putih. Oleh sebab itu tanaman padi bagi petani hanya untuk di konsumsi sendiri, tidak untuk dijual.

## *Memperkuat Komitmen Keindonesiaan di Era G. 4.0*

Jumlah penduduk pada tahun 2010 sebanyak 18.500 orang, penduduk lelaki sebanyak 9259 orang dan penduduk perempuan sedikit lebih banyak yaitu 9301 orang. Pada tahun 2018 penduduk mempunyai jumlah KK sebanyak 4871kk, 10.027 orang penduduk lelaki, 11147 orang penduduk perempuan dan jumlah keseluruhan sebanyak 21.174 orang.

Peta Kecamatan Lembah Gumanti Dan Nagari Alahan Panjang



Nagari Alahan Panjang mempunyai 10 jorong, iaitu jorong, Alahan Panjang, i merupakan kawasan perbukitan, yang terdiri dari sawah dan ladang. Demikian juga dengan nagari Alahan Panjang, yang merupakan kawasan bukit dan sawah. Pada masa tahun 1970-an sawah padi masih dominan, namun pada tahun 1980-an sawah mulai berkurang karena tanah sawah mulai beralih fungsi yang ditanami tanaman hortikultura seperti bawang, cabe, kentang dan lobak sejak tahun 2010.

Sebahagian kawasan nagari Alahan Panjang yang terletak di tepi danau Di Atas, merupakan kawasan yang mempunyai pemandangan yang indah. Danau Di Atas merupakan salah satu tujuan wisata di Sumatera Barat. Transportasi umum dari Kota Padang sebagai ibu kota provinsi Sumatera Barat menuju nagari

Alahan Panjang, pengunjung dapat menaiki angkutan kota dalam provinsi. Tempat pemberhentian angkutan umum ini di pasar Alahan Panjang. Namun dari pasar Alahan Panjang ke nagari-nagari tidak tersedia angkutan umum, yang ada hanya ojek motor dengan bayaran rata-rata Rp. 15000 ke setiap nagari. Bayaran seperti ini dianggap mahal, oleh karena itu hampir semua rumah di nagari ini mempunyai motor sebagai alat pengangkutan keluarga. Sepertinya untuk infrastruktur, kawasan ini kurang memadai jika orang luar datang untuk mengunjungi kawasan tersebut, bila mereka tidak mempunyai kendaraan sendiri dan biaya yang mahal jika mengunjungi kawasan tersebut.

Petani di Alahan Panjang dapat memasarkan hasil pertanian dalam dua cara. Pertama, mengangkut ke pasar Nagari Alahan Panjang yang diadakan setiap hari Kamis dan Sabtu. Hal ini dilakukan oleh petani yang dekat tempat kediaman ke pasar. Pasar ini menjual keperluan sehari-hari dan bahan sandang lainnya, yang datang dari nagari-nagari sekitar kecamatan Lembah Gumantidan Kabupaten Solok. Untuk membeli komoditi sayuran dalam jumlah besar di beli oleh toke yang datang ke pasar. Toke tersebut datang dari sekitar kecamatan Lembah Gumanti, dari Kabupaten Agam dan dari Solok.

Kedua, toke datang ke rumah petani untuk langsung membeli komoditi yang mereka perlukan, seperti bawang, lobak, tomat dan cabe. Banyak petani lebih mengandalkan kedatangan toke untuk membeli sayuran mereka daripada mengangkut ke pasar Alahan Panjang. Bila petani mengangkut ke pasar akan menambah ongkos dan biaya tukang angkat barang dan setiap barang dikenakan biaya Rp.5000 per potong. Bila toke datang ke rumah, harga sedikit di bawah harga pasar, namun tidak sebesar yang dikeluarkan jika dibawa ke pasar. Oleh sebab itu petani lebih memilih menjual di rumah kepada toke. Seperti harga bawang, bila harga mahal,

## *Memperkuat Komitmen Keindonesiaan di Era G. 4.0*

dianggap mahal oleh petani di atas Rp.15000, harga ini sudah dianggap memadai oleh petani karena jika dikeluarkan biaya produksi seperti pupuk, racun dan keperluan obat-obatan lain petani telah mendapat untung, apalagi jika harga mencapai Rp.40.000 dan Rp.60.000 petani memperoleh untung yang sangat besar.

Toke yang ada masuk ke nagari merupakan toke besar dan kecil yang disebut *anak randai*. Anak randai iaitu toke yang membeli sayuran seperti bawang, kemudian menjual lagi kepada toke yang lebih besar. Toke besar datang dengan membawa mobil pick up dan truk, sehingga bisa mengangkut komoditi cukup banyak. Toke bawang dan kentang membawa karung tempat bawang, sementara untuk tomat mereka sudah menyediakan peti, sehingga bila membawa ke tempat yang jauh tomat tidak rosak dalam perjalanan. Mobil pick up biasa membawa barang dengan jarak tidak terlalu jauh seperti antar kota dalam provinsi, manakala truk membawa barang ke tempat jauh iaitu ke luar provinsi, seperti Pekanbaru, Batam dan Jawa.

Sebenarnya boleh dikatakan bahwa pasar untuk komoditi sayuran seperti ini di nagari Alahan Panjang tidak ada masalah. Yang menjadi masalah bagi petani adalah harga yang tidak stabil. Bila harga berada di bawah RP.15000 untuk bawang, petani akan merugi, karena harga pupuk dan racun tidak pernah turun. Demikian pula dengan harga sayuran lainnya. Petani tidak mempunyai kemampuan menyangga harga yang memadai. Pemerintah lah yang bertanggungjawab menyangga harga ini seperti harga beras agar kesejahteraan petani tetap terjamin. Di Indonesia tidak ada jaminan bagi petani merugi bila harga murah, petani selalu tidak diuntungkan dan mereka tetap dibiarkan tidak berdaya dan dibiarkan menanggung kerugian.

#### 4. Aktifitas perempuan nagari Alahan Panjang dalam pertanian

Perempuan di nagari Alahan Panjang tidak membedakan pekerjaan rumah tangga dengan pekerjaan di pertanian. Seiring dengan semakin intensifnya pertanian horikultura, terutama bawang, kentang, tomat dan cabe, kacang buncis, yang menjadi andalan mereka, maka penglibatan seluruh keluarga bukan suatu yang aneh. Pekerjaan di pertanian dilakukan oleh anak-anak sampai orang tua. Seperti dalam pekerjaan pasca tanam pada tanaman bawang, anak-anak lelaki dan perempuan membantu orang tua di ladang dan di rumah dalam mengerjakan *maurek*, yaitu membersihkan bawang dari akar bawang dan membersihkannya, serta memotong bawang untuk dijadikan tampang atau benih. Anak sekolah, lelaki dan perempuan membantu orang tua sehabis sekolah. Jika ibu yang mempunyai bayi di rumah, di sela-sela mengasuh anak, dia dapat *maurek* bawang, baik kepunyaan orang lain. Jika bawang kepunyaan dia, tentu tidak akan mengeluarkan upah pekerja. Jika *maurek* bawang kepunyaan orang lain perempuan ini akan memperoleh wang Rp. 1000 per kilogramnya. Berapa kilogram yang mereka selesaikan, mereka akan memperoleh uang pada hari itu. Bagi orang tua yang sudah berumur 60 tahun ke atas, *maurek*, merupakan pekerjaan harian mereka di rumah dan di ladang, banyak dari pada orang tua ini yang sudah berumur 70 tahun ke atas masih kuat fisiknya untuk beraktifitas di ladang. Seorang nenek yang sudah berumur 80 tahun masih dapat mengerjakan penanaman bawang, cabe, memetik cabe, *maurek* dan menyangi rumput di ladang.

Antara lelaki dan perempuan terdapat pembahagian kerja, namun tidak signifikan perbedaannya. Lelaki mengerjakan pekerjaan yang berat, seperti mencangkul dan menjadikan tanah gembur, memberi plastik yang dapat bertahan selama lima kali tanam, memberi racun dan mengangkat hasil panen ke rumah.

## *Memperkuat Komitmen Keindonesiaan di Era G. 4.0*

Manakala menanam, menyang, memanen dilakukan bersama-sama, suami isteri, bahkan dibantu oleh anak-anak jika mereka libur sekolah. Lelaki lebih banyak mengerjakan pekerjaan di luar pertanian, seperti jika ada pengerjaan proyek pelebaran jalan, irigasi dan jembatan dalam rangka pembangunan infrastruktur desa.

Sejak lebih kurang tiga tahun belakangan (2016) dana desa sudah besar mengalir ke pedesaan. Mula-mula hanya Rp.600.000.000 kemudian terus bertambah sampai satu milyar rupiah. Penggelontoran dana desa bagi pemerintah untuk menyerap tenaga kerja di pedesaan. Banyaknya pembangunan desa, tidak terkecuali di nagari Alahan Panjang, menyebabkan pekerjaan perempuan di pertanian pun bertambah. Misalnya menyemprot hama yang semula dikerjakan lelaki, menjadi kerja perempuan, artinya aktivitas pekerjaan perempuan menjadi meningkat. Bagi perempuan yang sudah mempunyai anak yang besar-besar, setiap hari merupakan hari kerja untuk mengerjakan ladang mereka. Seorang petani perempuan tidak hanya mempunyai satu jenis tanaman di lahan ladang, jika seorang petani mempunyai lahan tiga atau empat piring sawah, mereka tidak akan menanam satu macam jenis tanaman. Bisa saja mereka menanam bawang dengan cabe, di ujung-ujung gundukan mereka menanam seledri, atau daun bawang. Ada yang mencampur dengan tomat, kacang buncis dan lobak. Alasan petani menanam dengan sistem campuran ini adalah bila harga satu komoditi harganya rendah seperti bawang, bisa ditopang oleh cabe yang dianggap harga lebih stabil, bawang dengan tomat dan sebagainya. Di samping itu tanaman bawang yang dominan ditanam, tidak bisa terus menerus ditanam, setiap tiga kali bawang ditanam, sesudahnya harus diganti seperti dengan tomat cabe, lobak dan kacang buncis. Ini lah cara petani menghindari menjadi miskin karena menanggung rugi ketika harga bawang jatuh.

### 5. Perempuan dalam produksi tanaman hortikultura

Bila dilihat dari hasil angket di bawah ini, perempuan mayoritas menyatakan susah memulai usaha bertani, mencapai 60 % dan yang tidak menyatakan sukar hanya 13% persen. Kesukaran disebabkan membagi antara pekerjaan rumah dengan pekerjaan pertanian. Mereka pergi ke ladang setelah pekerjaan rumah selesai dilakukan, ditambah dengan menyiapkan makan untuk dibawa ke ladang.

#### Sukar memulakan bertani

Kesukaran	Angka	%
Ya	66	60.0
Tidak	13	11.8
Yang tidak menjawab	31	31
Jumlah	110	100

Kesukaran memulakan bertani oleh perempuan didominasi oleh modal sebanyak 93%, seperti dalam tabel di bawah. Hal ini adalah permasalahan klasik bagi petani, terutama petani kecil yang mempunyai modal yang relatif lebih terbatas. Modal yang dimaksud adalah untuk membeli pupuk, racun dan membayar tenaga kerja bila mereka memerlukan. Sementara untuk bibit, bisa diambil dari meminjam dulu kepada kerabat yang bisa diganti ketika telah panen.

### **Masalah memulakan pertanian**

Masalah	Angka	%
Modal	93	84.5
Kurang percaya diri	2	1.8
Tenaga kerja	6	5.5
Lain-lain	6	5.5
Tidak menjawab	3	2.7
Jumlah	110	100

Petani menggunakan tenaga kerja pada mulanya sebanyak 2-3 orang cukup banyak, yaitu 46 atau 41.6% (tabel di bawah). Tenaga kerja yang digunakan untuk mengolah tanah sampai bisa ditanami. Tenaga kerja bagi petani yang mempunyai lahan kecil biasa di kalangan orang dekat atau orang kampung, jika petani yang mempunyai luas, mereka menggunakan pendatang dari luar kampung dan provinsi.

### **Penggunaan Tenaga kerja**

Banyak tenaga kerja	Angka	%
1 orang	10	11.6
2-3 orang	46	41.8
4-5 orang	13	11.8
Lebih dari 5 orang	17	15.5
Tidak menjawab	24	21.8
Jumlah	110	100

Modal yang digunakan petani perempuan dalam melakukan satu kali penanaman, cukup besar bagi petani kecil. Banyak petani menggunakan modal di atas Rp. 2500.000, yaitu 45.4% (tabel di bawah). Ini menandakan untuk menanam satu jenis tanaman diperlukan modal yang besar. Sedangkan yang menggunakan modal di bawah Rp. 500.000 hanya 10%.

**Modal yang digunakan dalam satu kali penanaman**

Banyak modal (Rp)	Angka	%
< 500.000	10	9.1
500.000-1.000.000	18	16.4
1.000.000-1.500.000	7	6.4
1.500.000-2.000.000	5	4.5
2.000.000-2.500.000	6	5.5
lebih dari 2.500.000	54	49.1
Tidak menjawab	10	9.1
Total	110	100

Sedangkan sumber modal bagi petani perempuan ini di peroleh dari beberapa sumber. Banyak dari mereka mempergunakan modal sendiri yaitu 43.6% dan pinjaman dari orang tua sebanyak 33% (tabel di bawah). Artinya mayoritas dari mereka menggunakan modal dari keluarga sendiri dan juga telah ada yang menggunakan modal dari bank sebanyak 6.4%, artinya sistem pertanian modern telah mereka gunakan, dan mereka telah berani menanggung resiko jika tidak berhasil.

**Sumber modal yang digunakan petani**

Sumber modal	Angka	%
Sendiri	48	43.6
Pinjaman dari orang tua saudara	33	30.0
Pinjaman dari institusi keuangan lain	11	10.0
Pinjaman dari bank	7	6.4
Pinjaman dari orang lain	4	3.6
Tidak menjawab	7	6.4
Jumlah	110	100

## *Memperkuat Komitmen Keindonesiaan di Era G. 4.0*

Petani hampir semua pernah meminjam uang baik untuk modal, maupun menambah modal. Hal ini suatu yang biasa bagi agribisnis.

### **Petani pernah meminjam**

Pernah meminjam	Angka	%
Ya	91	82.7
Tidak	15	13.6
Tidak menjawab	4	3.6
<b>Jumlah</b>	<b>110</b>	<b>100</b>

Kegunaan uang pinjaman bagi petani perempuan dari tabel di bawah, bahwas Mayoritas untuk memperbesar modal sebanyak 60% dan cukup banyak juga untuk menutup kerugian yaitu sebanyak 20.9%.

### **Kegunaan uang pinjaman**

<b>Kegunaan wang</b>	<b>Angka</b>	<b>%</b>
Memperbesar modal penanaman	60	54.5
Menutup kerugian	23	20.9
Membuat tempat baru	7	6.4
Lain-lain	3	2.7
Tidak menjawab	17	15.5
<b>Jumlah</b>	<b>110</b>	<b>100</b>

Selama mereka mengerjakan usaha pertanian mereka pernah melakukan peminjaman uang, yang digunakan untuk usaha pertanian dan keperluan lain yang mendadak. Banyak dari petani perempuan meminjam kepada keluarga, yaitu 43.6%, koperasi juga banyak mencapai 28.2% dan bank sebanyak 22.7% (tabel di bawah). Ini berarti petani perempuan sudah menggunakan institusi resmi dalam mencukupi keperluan uang mereka dalam mengusahakan pertanian mereka.

**Tempat meminjam uang**

<b>Institusi</b>	<b>Angka</b>	<b>%</b>
Bank	25	22.7
Koperasi	31	28.2
Tengkulak/ tkg kredit	-	-
Keluarga	48	43.6
Pegadaian	1	0.9
Lain-lain	1	0.9
Tidak menjawab	4	3.6
<b>Jumlah</b>	<b>110</b>	<b>100</b>

Jumlah uang yang mereka pinjam juga beragam, tergantung keperluan yang mereka gunakan. Pinjaman yang dilakukan petani tidak merata. Dari tabel di bawah ini, pinjaman yang banyak dilakukan yaitu antara 1-6 juta rupiah sebanyak 49.1%. Bahkan yang meminjam 15 juta Rupiah sebanyak 15%, artinya petani perempuan mempunyai kemampuan untuk meminjam dengan pinjaman yang cukup besar. Hal ini dapat dihubungkan dengan pendapatan kasar petani.

**Jumlah pinjaman yang dilakukan petani perempuan**

Jumlah pinjaman Rp.	Angka	%
Kurang dari 1 juta	13	11.8
1.01-3 juta	30	27.3
3.01-6 juta	24	21.8
6.01-8 juta	6	5.5
8.01-11 juta	5	4.5
11.01 -15 juta	1	.9
Lebih dari 15 juta	15	13.6
Tidak menjawab	16	14.5
<b>Jumlah</b>	<b>110</b>	<b>100</b>

## *Memperkuat Komitmen Keindonesiaan di Era G. 4.0*

Petani memperoleh pendapatan petani 1 kali panen paling banyak 1-3 juta Rupiah sebanyak 25.5%, 3-6 juta sebanyak 21.8% dan kurang dari 1 juta sebanyak 20.9% (lihat tabel di bawah ini). Jika dijumlahkan ketiganya, memang mayoritas petani mempunyai pendapatan kurang dari 1 juta sampai 6 juta rupiah yaitu 68.2%. Petani perempuan yang mempunyai pendapatan kurang dari satu juta rupiah, adalah petani yang menanam cabe, tomat, kacang buncis dan terung, karena mereka memanen 2 kali dalam seminggu. Manakala bawang, kentang, lobak dipanen sampai 3 bulan. Sementara yang berpendapatan tinggi di atas 6 juta Rupiah sampai 16 juta mencapai 26.3%, hal ini dapat dikatakan sudah banyak petani yang mempunyai pendapatan cukup tinggi .

### **Jumlah pendapatan petani 1 kali panen**

Jumlah pendapatan	Angka	%
Kurang dari 1 juta	23	20.9
1.01-3 juta	28	25.5
3.01-6 juta	24	21.8
6 .01-8 juta	11	10.0
8.01-11 juta	5	4.5
11.01-13 juta	5	4.5
13.01-16 juta	8	7.3
Tidak menjawab	6	5.5
Jumlah	110	100

Penggunaan tenaga kerja penting artinya dalam sistem pertanian yang intensif. Petani perempuan menggunakan tenaga kerja selama mereka terlibat dalam sistem produksi. Banyak dari petani menggunakan tenaga kerja kurang dari 3 orang, yaitu sebanyak 37.3% (lihat tabel di bawah). Hal ini tentu akan mengurangi ongkos produksi, karena tidak banyak menggunakan tenaga kerja.

**Jumlah tenaga kerja yang digunakan**

Jumlah	Angka	%
kurang dari 3 orang	41	37.3
3-5 orang	18	16.4
6-8 orang	6	5.5
9-10 orang	3	2.7
Tidak menjawab	42	38.2
Jumlah	110	100

Tenaga kerja perempuan yang digunakan oleh petani perempuan sebanyak 1-3 orang ialah mayoritas, yaitu 50.9% (lihat tabel dibawah ini).

**Banyak tenaga kerja perempuan**

Banyak tenaga kerja (Orang)	Angka	%
1-3	56	50.9
4-5	8	7.3
6-7	2	1.8
Tidak menjawab	44	40.0
Jumlah	110	100

Sementara penggunaan tenaga kerja lelaki 1-3 hampir setengahnya, iaitu sebanyak 46.4% (lihat tabel di bawah). Sehingga bisa disimpulkan bahwa penggunaan tenaga kerja perempuan lebih banyak dari lelaki pada penggunaan tenaga kerja 1-3 orang. Namun perbedaan penggunaan tenaga kerja di antara kedua jenis kelamin ini tidak begitu jauh.

## *Memperkuat Komitmen Keindonesiaan di Era G. 4.0*

### **Banyak tenaga kerja lelaki**

Jumlah tenaga kerja (orang)	Angka	%
1-3	51	46.4
4-5	12	10.9
6-7	2	1.8
Tidak menjawab	45	40.9
Jumlah	110	100

Dalam kerja pertanian ini petani perempuan menghabiskan waktu untuk bekerja dalam sehari dari 5.1- 7 jam adalah banyak yaitu 39.1%, bekerja 7-10 jam juga banyak yaitu 30%. Pekerjaan pasca panen biasanya banyak menghabiskan waktu, seperti maurek, seorang ibu rumah tangga dapat bekerja dari pagi sampai sore di rumah, demikian juga orang yang sudah berumur 70 tahun ke atas dapat mengerjakannya di rumah

### **Jam kerja petani perempuan dalam sehari**

Jam kerja	Angka	%
3-5jam	15	13.6
5.1-7 jam	43	39.1
7.1-10 jam	33	30.0
lebih dari 10 jam	8	7.3
Tidak menjawab	11	10.0
Jumlah	110	100.0

Sementara jumlah jam digunakan untuk keluarga mayoritas petani perempuan menggunakan waktu lebih dari 10 jam yaitu sebanyak 61.8%. Artinya petani perempuan masih mementingkan dan tidak meninggalkan keluarga mereka. kerugian.

**Lama waktu untuk keluarga**

Jam untuk keluarga	Angka	%
kurang dari 3 jam	5	4.5
3-5 jam	13	11.8
5-7 jam	9	8.2
7-10 jam	9	8.2
lebih dari 10 jam	68	61.8
Tidak menjawab	6	5.5
Jumlah	110	100

Pekerja yang digunakan dalam penanaman mahupun setelah pasca panen pada tabel di bawah ini, mayoritas berasal dari kampung sendiri sebanyak 51.8%. Penggunaan tenaga kerja dari kampung sendiri, lebih mudah dan tersedia dengan cepat, di samping itu untuk membantu ekonomi sesama penduduk.

**Asal pekerja sekali panen**

Asal pekerja	Angka	%
Kampung sendiri	57	51.8
Kampung tetangga	6	5.6
Keluarga	14	12.7
Jawa	4	3.6
Tidak menjawab	26	23.3
Jumlah	110	100

Upah yang dikeluarkan petani perempuan dalam satu kali panen (dalam tabel di bawah ini), mayoritas sebesar Rp. 500.000-Rp.1000.000 yaitu 63.6%. Jika harga turun di bawah standar produksi Rp.15000, upah sebesar itu menjadi masalah, karena menambah kerugian di tingkat petani perempuan. Jika harga di atas Rp. 15000, harga demikian tidak menjadi masalah, karena tidak menambah jumlah kerugian.

## *Memperkuat Komitmen Keindonesiaan di Era G. 4.0*

### **Upah yang dikeluarkan petani perempuan**

Besar upah (Rp.)	Angka	%
Kurang dari 500 ribu	5	4.5
500 ribu-1 juta	70	63.6
1 juta- 1,5 juta	1	.9
Yang tidak menjawab	34	30.9
Jumlah	110	100.0

Jika dilihat dari tabel di bawah, keuntungan yang mereka peroleh 1-3 juta Rupiah adalah cukup banyak, mencapai 30.9% dan jika dijumlahkan petani yang berpendapatan kurang satu juta Rupiah sampai 6 juta Rupiah adalah sangat banyak yaitu sampai 70%. Sedangkan yang mempunyai keuntungan di atas 6 sampai lebih 15 juta Rupiah sudah mencapai 19.6%. Artinya bagi petani keuntungan yang tinggi seperti ini telah menjadikan mereka petani yang berhasil dan telah mampu membiayai anak mereka sekolah sampai ke perguruan tinggi, mempunyai kendaraan seperti motor dan mobil.

### **Rata-rata keuntungan yang diperoleh petani perempuan**

Jumlah	Angka	%
kurang dari 1 juta	17	15.5
1.01-3juta	34	30.9
301-6juta	26	23.6
6.01-9juta	7	6.4
9.01-12juta	4	3.6
12.01-15juta	6	5.5
lebih dari 15 juta	5	4.5
Tidak menjawab	11	10.0
Jumlah	110	100

## **6. Kesimpulan**

Revolusi Hijau telah merubah sistem pertanian di seluruh dunia. Perubahan terjadi baik dari segi teknismaupun dalam penemuan bibit baru guna meningkatkan hasil produksi tanaman mereka. Di nagari Alahan Panjang, terjadi perubahan pola penanaman padi sawah menjadi penanaman tanaman hortikultura di sawah. Pada penanaman padi, pekerjaan perempuan masih terbatas tanaman padi, ketika terjadi perubahan penanaman hortikultura ini perempuan semakin intensif bekerja di ladang. Pekerjaan tersebut mulai dari penanaman sampai pasca panen. Terutama pada tanaman bawang yang melibatkan ana-anak sampai orang tua. Keterlibatan perempuan di semua lapisan telah memberi keuntungan, terutama dari segi perolehan ekonomi mereka.

Bila dilihat dari hasil angket di atas, petani perempuan mempunyai kesukaran dalam masalah modal sangat banyak yaitu 84.5%, modal yang mereka menggunakan modal lebih dari Rp.2500 000, sumber modal sendiri dan pinjaman keluarga. Dalam menekuni pekerjaan pertanian ini petani perempuan pernah meminjam uang untuk keberlangsungan pertanian mereka. Kegunaan wang itu untuk memperbesar modal. Dalam satu kali panen banyak dari mereka dapat memperoleh keuntungan 1-6 juta rupiah, sementara pendapatan 6-15 juta Rupiah telah mencapai 19.6% petani perempuan. Artinya telah banyak dari mereka berpendapatan tinggi. Dalam menggunakan tenaga kerja petani banyak menggunakan tenaga kerja 1-3 orang dan penggunaan tenaga kerja tersebut lebih banyak tenaga kerja perempuan dari pada lelaki. Untuk meningkatkan ekonomi mayoritas mereka telah menggunakan waktu untuk bekerja 5-10 jam dalam sehari, sementara untuk keluarga mayoritas lebih dari 10 jam sehari, artinya walaupun mereka bekerja, keluarga tidaklah ditinggalkan. Upah yang mereka keluarkan dalam sekali panen mencapai Rp.

## *Memperkuat Komitmen Keindonesiaan di Era G. 4.0*

500 ribu sampai satu juta Rupiah. Dari keseluruhan kerja yang demikian mayoritas dari petani perempuan mendapat keuntungan sebanyak satu juta Rupiah sampai 6 juta rupiah (70%), sementara 6 juta Rupiah sampai 15 juta Rupiah telah mencapai 19.6%. Dapat disimpulkan petani perempuan sudah mendapat keuntungan yang besar dari pertanian sayuran ini.

### **Daftar pustaka**

- Azizah Kasim. 1988. Women, Land and Gender Relations in Negeri Sembilan: Some Preliminary Findings. *Southeast Asian Studies*, Vol. 26, No.2.
- Bechtold, Karl-Heinz W. 1988. *Politik dan Kebijaksanaan Pembangunan Pertanian*. Jakarta: Yayasan Obor
- Blackwood, E. 1997. Women, Land, and Labor: Negotiating Clientage and Kinship in a Minangkabau Peasant Community. *Ethnology*. Vol. 36. No. 4(277-293).
- Davis, Carol Elizabeth. 1994. Gender Relations And Networks In A West Sumatran Minangkabau Village. *Thesis PhD*. University of Hull
- Delima Hasri Azhari. 2008. Indonesian Rural Women: The Role in Agricultural Development. *Analisis Kebijakan Pertanian*, vol 6 no 1. 1-10
- Giarracca, Norma dkk. 2008. Women in Agriculture: Introduction. *Latin American Perspectives* Vol. 35, No. 6.
- Hadriana Marheini Munthe. 2002. Pengaruh modernisasi pertanian terhadap partisipasi perempuan di pedesaan: Satu tinjauan sosiologi. *USU digital*
- Josua P. Hutajulu. 2015. Analisis peran perempuan dalam pertanian Di kecamatan Rasau Jaya kabupaten Kuburaya. *Journal Social Economic of Agriculture*, Volume 4, Nomor 1

BPS Kabupaten Solok. 2010. *Kecamatan Dalam Angka*.

BPS Kabupaten Solok 2017. *Kecamatan Dalam Angka*

Kiteme, Kamuti. 1992. The Socioeconomic Impact of the African Market Women Trade in Rural Kenya. *Journal of Black Studies*, Vol. 23, No. 1. pp. 135-151

Malassis, Louis. 1976. *Dunia Pertanian, Pendidikan dan Perkembangan*. Jakarta: Gunung Agung

Midawati. 2001. Perempuan Dan Komersialisasi Pertanian Di Nagari Batuhampar 1970-1990. *Tesis Master*. Jurusan Sejarah, Universitas Indonesia.

Wali Nagari .2018. *Monografi Nagari Alahan Panjang*.

SOFA Teams and Doss, Cheryl. 2011, The Role of Women in Agriculture. Agricultural Development Economics Division The Food and Agriculture Organization of the United Nations [www.fao.org/economic/esa](http://www.fao.org/economic/esa)

Turritin, Jane. 1988. Men, Women, and Market Trade in Rural Mali, West Africa Author(s): Reviewed work(s). *Canadian Journal of African Studies / Revue Canadienne des Études Africaines*, Vol. 22, No. 3. pp. 583-604

Ugbomeh, George M. M. 2001. Empowering Women in Agricultural and education for sustainable for rural development. *Oxford university development journal*.

## *Memperkuat Komitmen Keindonesiaan di Era G. 4.0*

# Merajut Keindonesiaan: Pengalaman Politik Masyarakat Sungai Pagu dan Sangir Membangun “Rasa SolokSelatan”\*

Dr. Nopriyasman, M.Hum, Drs. Syafrizal, M.Hum,  
Drs. Armansyah, M.Hum \*\*

## Abstrak

Artikel ini membicarakan historitas yang terjadi di Kabupaten Solok Selatan, khususnya dalam bidang politik. Sejak lahirnya gerakan pembentukan kabupaten baru, dan setelah kabupaten baru dikabulkan pendiriannya oleh pemerintah pusat, masyarakat Solok Selatan berbenah membangun masyarakat dengan mengedepankan politik integrasi antara dua kelompok masyarakat utama, yang dikenal dengan masyarakat Sungai Pagu dan Masyarakat Sangir. Kedua poros masyarakat itu menghadirkan kolaborasi politik dan menggalang partisipasi sosial politis, serta mengenyamping persaingan yang menjadi akar konflik dan rivalitas mereka sepanjang proses kesejarahannya. Akar konflik diketahui berasal dari adanya perbedaan kondisi dua poros masyarakat, soal penentuan pusat ibukota kabupaten, dan kebijakan pemanfaatan potensi daerah, sedangkan pelahiran kolaborasi terkait pada pengaruh arus reformasi, kepentingan perlunya Kabupaten baru, dan demokrasi lokal.

Kata Kunci: dinamika, fenomena, rivalitas, kolaborasi, dan demokrasi lokal

### **A. Pengantar**

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 merupakan penanda bagi terbentuknya tiga kabupaten baru di Sumatera Barat. Kabupaten itu adalah Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pasaman, dan Kabupaten Solok Selatan. Kabupaten Solok Selatan menjadi menarik untuk diteliti dikarenakan masyarakatnya menunjukkan suatu fenomena politik yang saling bertentangan dalam kelompok utama masyarakat setempat, yang mana gejalanya terlihat dalam hal perebutan tempat pusat pemerintahan Kabupaten. Kelompok masyarakat Sungai Pagu menginginkan sebagai pusat kabupaten baru itu ditempatkan di wilayah mereka, sementara masyarakat Sangir sesuai dengan kesepakatan awal bersikeras pula untuk menempatkan ibukota pemerintahan di wilayah mereka. Mengapa hal itu terjadi dan bagaimana penyelesaiannya ?

Sementara itu, ketika pemilihan kepala daerah secara langsung akan dilakukan, pertentangan kelompok masyarakat Sangir dan masyarakat Sungai Pagu mencair dengan sendirinya. Semua pasangan calon Kepala Daerah selalu melibatkan kedua kelompok masyarakat itu. Artinya bilamana calon Bupati berasal dari orang Sungai Pagu, maka wakilnya pasti dari kalangan masyarakat Sangir, begitu pula sebaliknya. Bagaimana persatuan masyarakat Sungai Pagu dan masyarakat Sangir bersatu dan menyeimbangkan diri dalam politik. Apa yang dilakukan dan bagaimana bentuknya ? Oleh sebab itu, uraian berikut akan mendiskusikan dinamika konflik, upaya penyelesaian konflik, bentuk-bentuk kolaborasi politik, dan gerak atau kekuatan yang dimiliki masyarakat Solok Selatan. Dalam konteks keindonesiaan, pengalaman historis Solok Selatan menjadi penting terutama dalam membangun kesepahaman dan integrasi kebangsaan Indonesia di tengah keberagaman masyarakat etnisnya.

## **B. Berebut Pusat Ibukota Kabupaten Baru: Fenomena Rivalitas di Solok Selatan**

Rivalitas masyarakat Sungai Pagu dengan masyarakat Sangir berakar pada kondisionalitas kesejarahan yang sudah berlangsung sejak lama. Masyarakat Sungai Pagu yang juga populer dengan sebutan “Orang Atas”, lebih maju dibandingkan dengan masyarakat Sangir, yang disebut dengan istilah “Orang Bawah”.<sup>1</sup> Kemajuan orang Sungai Pagu itu terkait dengan persoalan dengan sumber daya manusia, sebagian besar guru yang mengajar di Solok Selatan berasal dari kalangan masyarakat Sungai Pagu. Tingkat pendidikan orang Sungai Pagu jauh lebih tinggi daripada orang Sangir. Temuan di lapangan diperoleh kenyataan bahwa pada awal terbentuknya Solok Selatan, hanya sekitar 15 orang sarjana yang berasal dari Sangir, sedangkan orang Sungai Pagu tidak hanya banyak yang sarjana Strata Satu (S1) melainkan juga ada yang berpendidikan S2 dan S3.<sup>2</sup>

Selain terkait dengan tingkat pendidikan, masyarakat Sungai Pagu juga menguasai perekonomian di pusat pemerintahan Solok Selatan, dan banyak pula orang Sungai Pagu yang sukses di daerah perantauan. Kemajuan yang diperoleh oleh masyarakat Sungai pagu itu berlatar belakang dari faktor historis, misalnya ketika pedagang Aceh menguasai perdagangan di kawasan Bandar X, orang Sungai pagu yang wilayahnya berdekatan dengan Pesisir Selatan mendorong keterlibatan orang Sungai pagu dalam perdagangan itu. Kedinamisan orang Sungai pagu dalam jaringan perdagangan berlanjut ketika pedagang-pedagang Belanda menggantikan posisi Aceh dalam mendominasi perdagangan di kawasan Pesisir Selatan. Faktor lain, semenjak Sumatera Barat dikuasai oleh Belanda sebagai pewaris VOC, daerah Muaralabuh sejak pertengahan abad ke-19, dijadikan pusat pemerintahan *onderafdeeling* yang membawahi seluruh daerah Solok bagian

## *Memperkuat Komitmen Keindonesiaan di Era G. 4.0*

Selatan. *Onderafdeeling* merupakan unit pemerintahan terendah dalam birokrasi kolonial Belanda yang dikepalai oleh seorang bangsa Belanda. Mengingat strategisnya daerah Muaralabuh sebagai pusat pemerintahan *onderafdeeling*, mendorong pula masyarakat Muaralabuh berkenalan dengan dunia pendidikan dibandingkan dengan masyarakat Sangir. Malahan sampai dengan tahun 1992, satu-satunya sekolah tertinggi di wilayah Solok Selatan, yaitu Sekolah Menengah Atas (SMA) terdapat di Muaralabuh.<sup>3</sup> Selain itu, faktor yang membuat masyarakat Sungai Pagu mengalami kemajuan adalah dibangunnya jalan raya dari Padang dan Solok menuju Muaralabuh melalui Lubuk Selasih, sehingga Muaralabuh tidak lagi terisolir dalam jaringan transportasi darat di Sumatera Barat.<sup>4</sup>

Berbeda halnya dengan masyarakat Sangir, yang menempati wilayah sebanyak tujuh nagari yang terletak di sepanjang aliran Batang Sangir. Wilayah itu, pernah dikunjungi oleh Damste, yang ketika itu menjabat sebagai *controleur* sekita permulaan abad ke-20, yang melaporkan bahwa wilayah Sangir yang juga dikenal sebagai Rantau XII Koto merupakan daerah terkebelakang.<sup>5</sup> Ternyata keadaan itu tidak mengalami perubahan yang mendasar hingga memasuki dekade 1980-an. Keterbelakangan masyarakat Sangir, antara lain disebabkan oleh tidak adanya jaringan jalan raya untuk memasuki sebagian besar wilayah Sangir. Akibatnya sebagian besar wilayah Sangir tidak bisa dimasuki oleh kendaraan roda empat. Jalan raya yang bisa dilalui kendaraan bermotor ke wilayah Sangir hanyalah sampai Nagari Lubuk Gadang, yaitu sampai pada persimpangan jalan yang menghubungkan wilayah Sumatera Barat dengan Kerinci Propinsi Jambi.

Jalan raya dari Lubuk Gadang ke wilayah Bawah hanya sampai di sekitar Lubuk Malako, berupa jalan kecil dan berbatu-batuan, sehingga sulit ditempuh oleh kendaraan bermotor. Nagari

Bidar Alam, Abai, dan Dusun Tengah ketika itu tidak ada jalan raya sama sekali. Kesulitan orang Sangir bepergian ke daerah lain menjadi salah satu penghambat dari kemajuan mereka. Bersamaan dengan itu, masyarakat Sangir relatif terisolasi dari pergaulan dengan daerah lain, apalagi kawasan sekitar Batanghari dan Sungai Dareh juga bukan wilayah perdagangan.

Untuk menempuh pendidikan SMA saja masyarakat Sangir harus bersekolah ke Muaralabuh, karena di situlah satu-satunya terdapat sekolah untuk wilayah Selatan di Wilayah Solok Selatan. Jauhnya letak sebagian besar wilayah Sangir dari Muaralabuh, dan tidak tersedianya Jalan Raya yang bisa ditempuh oleh kendaraan bermotor, menyebabkan rendahnya minat orang Sangir bersekolah, apalagi melanjutkannya hingga Perguruan Tinggi.<sup>6</sup>

Pada penghujung tahun 1990-an, tuntutan perubahan dan angin reformasi bertepuk kencang di Indonesia. Tuntutan pemekaran wilayah muncul pada banyak tempat, situasi itu berpengaruh terhadap masyarakat Sungai Pagu untuk memprakarsai dibentuknya Kabupaten Solok Selatan sebagai pemekaran dari Kabupaten Solok. Inisiatif masyarakat dari masyarakat Sungai Pagu itu didukung sepenuhnya oleh pemuka masyarakat Sangir. Perjuangan mereka tidaklah sia-sia, pemerintah pusat akhirnya mengeluarkan Undang-Undang No. 38 Tahun 2003 tentang pembentukan tiga kabupaten baru di Sumatera Barat, yaitu Solok Selatan, Pasaman Barat, dan Dharmasraya. Selanjutnya diadakan persiapan dengan cepat, dan akhirnya pada tanggal 7 Januari 2004, Kabupaten Solok Selatan resmi berdiri, dengan pusat pemerintahan ditetapkan di Padang Aro, Kecamatan Sangir.

Pada tanggal 10 Januari 2004, Gubernur Sumatera Barat Zainal Bakar, SH, melantik Drs. Aliman Salim sebagai Penjabat Bupati Kabupaten Solok Selatan. Akan tetapi pada tahun 2005, Gubernur Sumatera Barat kembali melantik Drs. Marzuki Onmar

## *Memperkuat Komitmen Keindonesiaan di Era G. 4.0*

sebagai penjabat Bupati Solok Selatan, karena penjabat sebelumnya Drs. Aliman Salim, meninggal dunia. Akhirnya pada masa Drs. Marzuki Onmar sebagai Penjabat Bupati Kabupaten Solok Selatan inilah berhasil diadakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung pada tahun 2005. Meskipun kabupaten sudah berdiri, riak-riak yang selama ini “dipendam” mulai mencuat kembali. Riak tersebut misalnya soal seputar lokasi pusat pemerintahan. Tentu saja kedua daerah utama yang berasal dari 2 Kecamatan Sungai Pagu (*Ateh*) dengan Kecamatan Sangir (*Bawah*) merasa wilayah mereka yang paling berhak.

Masyarakat Kecamatan Sungai Pagu, yang wilayahnya lebih memiliki infrastruktur yang lebih lengkap dan kelebihan Sumber Daya Manusia (SDM) jauh lebih baik dengan wilayah dari masyarakat Kecamatan Sangir, yang hanya memiliki kelebihan dari Sumber Daya Alam (SDA).<sup>7</sup> Perseteruan atau rivalitas kedua wilayah ini sampai sekarang (tahun 2018) tetap terasa, misalnya seputaran pembahasan dan penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) oleh DPRD Kabupaten Solok Selatan tiap tahun anggaran. Tidak jarang pertikaian ini melibatkan perseteruan antara Bupati Solok Selatan dengan Ketua DPRD Kabupaten Solok Selatan, yang ujung-ujungnya harus diselesaikan oleh pihak ketiga atau pihak lain, seperti oleh Gubernur Sumatera Barat, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia juga ada yang turun tangan langsung.<sup>8</sup>

Pertentangan penentuan pusat pemerintahan di Kabupaten yang baru ini berlangsung terus menerus, akhirnya masyarakat dan pemuka masyarakat Kecamatan Sungai Pagu, pada tanggal 12 April 2002, mengeluarkan Surat Pernyataan, bahwa mereka yang berasal dari Kecamatan Sungai Pagu, menyatakan persetujuan lokasi Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Solok Selatan berlokasi di Kecamatan Sangir. Syarat Pernyataan ini

ditandatangani oleh Keta KAN Nagari Pasir Talang, Ketua KAN Nagari Koto Baru, Ketua KAN Nagari Alam Pauah Duo, 2 (dua) orang anggota DPRD Kabupaten Solok yang berasal dari Muaralabuh, seorang Ketua LSM Yapemas, serta seorang tokoh pemuda Kecamatan Sangir Khairunnas yang waktu itu juga menjadi anggota DPRD Kabupaten Solok juga ikut menyaksikan penyerahan Surat Pernyataan tersebut.<sup>9</sup> Walaupun demikian, lokasi Pusat Pemerintahan telah disetujui oleh masyarakat Kecamatan Sungai Pagu di Kecamatan Sangir, penentuan lokasi tepatnya di lokasi mana belum juga tuntas dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Sangir sendiri.

Beberapa lokasi seperti di Jorong Pekonina (sekarang tahun 2018 menjadi Nagari Persiapan, pemekaran dari Nagari Alam Pauah Duo) yang tahun 2007 masuk ke Kecamatan Pauah Duo, kecamatan pemekaran dari Kecamatan Sungai Pagu, Jorong Padang Aro di Nagari Lubuk Gadang, Golden Arm di Nagari Lubuk Gadang, serta Jorong Lubuk Gadang sendiri, yang 3 (tiga) lokasi terakhir berada di Kecamatan Sangir.<sup>10</sup> Akhirnya setelah keluar Undang-Undang No. 38 Tahun 2003 ditetapkan oleh Undang-Undang tersebut bahwa pusat pemerintahan berada di Padang Aro.

### **C. Berkolaborasi Untuk Solok Selatan : Pengalaman Pemilukada Pertama Tahun 2005**

Ketika Solok Selatan sudah resmi berdiri, dan mulai berpemerintahan sendiri yang diawali dengan penetapan Pejabat Bupati, maka Solok Selatan mulai berbenah diri sebagai kabupaten yang baru. Tugas pertama pejabat Bupati adalah mengantarkan Solok Selatan ke dalam suatu pemilihan umum daerah untuk mendapatkan Kepala Daerah definitif. Kondisi yang mendesak juga untuk diselesaikan adalah soal menanamkan “rasa Solok Selatan”,

## *Memperkuat Komitmen Keindonesiaan di Era G. 4.0*

atau berpikir sebagai “orang Solok Selatan”. Oleh sebab itu, penonjolan ide pembangunan daerah sebagai suatu kesatuan menjadi sentra utama dari pemikiran yang dikembangkan pejabat pemerintahan dan para elit pada waktu itu. Isu pembangunan yang diangkat adalah “pemerataan pembangunan” yang seimbang antara “atas” (Muaralabuh) dan “bawah” (Sangir). Ideologi membangun secara adil dijadikan dasar untuk penggalangan kerja sama atau terjalinnya kolaborasi antara masyarakat daerah di seluruh wilayah Solok Selatan. Khairunas, salah seorang inisiator dan anggota legislatif dari daerah Sangir berkata, “saya tidak pernah menggolong-golongkan ini rakyat Sangir dan ini rakyat Muaralabuh, tetapi rakyat Kabupten Solok Selatan”.<sup>11</sup>

Persoalan penting dalam membangun daerah pada masa awal pembangunan kabupaten adalah bagaimana menggalang partisipasi sosial politis dan mensosialisasikan berbagai program kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Apalagi berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, Solok Selatan mesti segera bersiap-siap melaksanakan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung yang pertama kali di Kabupaten Solok Selatan. Untuk maksud itu, setiap elemen masyarakat dan pemerintahan di Kabupaten yang baru berdiri ini memerlukan kerjasama dan kemampuan berinteraksi dalam membangun daerah.

Salah satu yang menarik disorot dalam fenomena kolaborasi ini berada pada tataran tim sukses dan kehadiran pasangan para calon pemimpin daerah baru ini. Dari calon yang muncul pada tahun 2005, terlihat para calon menempatkan pasangan Bupati dan Wakil Bupati berasal dari “dua poros lama”, yaitu Sangir dan Sungaipagu, seperti (1) H. Muhammad Tulus (Muaralabuh) berpasangan dengan H. Mursiwal Bagindo Kayo (Sangir); (2) Yusrizal Salta (Muaralabuh) berpasangan dengan Yoskarnedi

(Sangir); (3) Dr (Hc) Zulkhairi Dt. Marajo (Muaralabuh) dengan Bustami Narda (Sangir); dan (4) Drs. Syafrizal, M.Si., (Sangir) berpasangan dengan Nurfirmanwansyah, A.Pt.MM, (Muaralabuh).<sup>12</sup>

Pertimbangan mengambil salah satu dari kedua daerah, baik dalam pemilihan Bupati ataupun pejabat publik, setidaknya telah memperlihatkan prinsip keseimbangan. Apalagi ada semacam kesadaran elit, bahwa dua daerah itu punya akar konflik sejak lama, yaitu Sangir yang terpinggirkan, dan Muaralabuh yang selalu mendominasi.<sup>13</sup> Kondisi ini menjadi salah satu yang mesti “diterabas” oleh para calon pemimpin daerah di Kabupaten Solok Selatan dalam mengambil hati masyarakat dan bekerja sama dengan “orang Muaralabuh” dan “orang Sangir”. Untuk mengeliminir kesenjangan di dua kelompok masyarakat, maka ide yang dikedepankan adalah soal persatuan dan pemerataan, serta cita-cita percepatan pembangunan sesuai ide awal dari pembentukan Kabupaten Solok Selatan.<sup>14</sup>

“Para penggalang” dukungan masyarakat yang diperkerjakan para calon bupati dan wakil bupati di atas dikenal dengan nama “Tim Sukses”. Dapat diasumsikan, pada awalnya usaha calon Bupati bersama Timses menggunakan berbagai saluran komunikasi tertentu melakukan gerakan menyapa anggota masyarakat, dan menawarkan serta mengajak masyarakat untuk bergabung kepada pasangan mereka. Dalam konteks seperti itu, maka sasaran calon Bupati dan timses adalah para “pemegang kunci” dalam sistem sosial, seperti anggota kaum atau suku dalam sistem sosial, tokoh intelektual (agen pembaharu), tokoh masyarakat, dan memanfaatkan berbagai saluran komunikasi untuk memperlancar upaya mereka. “Mereka menjual program, figur kedaerahan, kesukuan, nagari”, kata Hapison.<sup>15</sup>

## *Memperkuat Komitmen Keindonesiaan di Era G. 4.0*

Menjadi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memang memerlukan beberapa persyaratan, antara lain (1) mempunyai sumber keuangan yang cukup kuat dan siap “merugi” apabila hasil tidak menguntungkan, (2) Mempunyai kemampuan berpikir yang cerdas, dan yang tidak kalah pentingnya (3) pemberani atau mempunyai jiwa “petualang”, yang mampu mengambil resiko dan siap menerima “musibah” bila usaha mereka ternyata mengalami kegagalan. Di antara ketiga syarat tersebut, untuk daerah Solok Selatan ditambah “putra daerah Solok Selatan”. Syarat yang terakhir ini tampaknya menjadi fenomena umum, pada semua daerah sejak bergulirnya era otonomi daerah, dan bahkan sering menjadi penentu kemenangan calon kepala daerah. Ada anggapan yang berkembang dalam pemikiran masyarakat, bahwa “apabila orang daerahnya menjadi kepala daerah, maka pembangunan di wilayah nagarnya akan lebih banyak”.<sup>16</sup> Isu putra daerah adalah salah satu “yang dijual” dalam kampanye pemenangan calon, dan terkadang menjadi alasan pembenaran bagi masyarakat untuk menentukan pilihannya kepada salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.

Peranan “timses” dalam proses pemilukada pertama Solok Selatan, antara lain (1) mendramatisir permasalahan dan meyakinkan masyarakat pemilih bahwa mereka dapat mengatasi permasalahan tersebut; (2) membina keakraban dengan meningkatkan kesan dapat dipercaya, jujur, dan empati dengan kebutuhan masyarakat; (3) menganalisa situasi permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat, dan menentukan mengapa cara lama tidak lagi tepat dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat; (4) membangkitkan motivasi masyarakat untuk berubah sesuai kebutuhan bersama; dan (5) berusaha memengaruhi perilaku masyarakat untuk ikut dalam “kapal politik” yang akan mewujudkan program yang mereka sarankan.<sup>17</sup> Di samping itu,

keberhasilan para anggota “timses” akan berkaitan erat dengan sejauhmana mereka mampu meyakinkan (1) ide-ide baru, (2) memenuhi kebutuhan masyarakat sasaran, (3) menggerakkan tokoh masyarakat, dan (3) kredibilitas “timses” dipercaya oleh masyarakat.

Bila dipetakan, maka terlihat posisi tokoh dan ketokohan seseorang menentukan bagi berhasil tidaknya tindakan mengajak, mengkoordinasikan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat secara umum. Beberapa tokoh yang menonjol pada waktu itu adalah para inisiator yang terlibat dalam upaya perwujudan lahirnya kabupaten Solok Selatan, seperti Dr. Armen Muchtar, Ir. Musril Kusai dari Badan Penggerak Pembentukan Kabupaten Solok Selatan (BP2KS2). BP2KS2 beranggotakan sebanyak 22 orang sebagai Tim Khusus yang bekerja untuk lahirnya Kabupaten Solok Selatan.<sup>18</sup>

Para tokoh tersebut, bagaimanapun termasuk pemberi warna baru bagi masyarakat Solok Selatan. Beberapa dari tokoh Solok Selatan itu mencalonkan diri dalam pemilihan umum Kepala Daerah tahun 2005, seperti Drs. Syafrizal, M.Si. Calon Bupati Syafrizal ini adalah salah seorang Ketua Bidang Sosialisasi dan Lobby Tingkat Pusat, dan termasuk tokoh inti dari perwujudan Kabupaten Solok Selatan. Kemudian, Calon Bupati Drs Yusrizal Sauta merupakan anggota panitia Khusus untuk membantu BP2KS2 dalam mempercepat proses pembentukan Kabupaten. Beberapa tokoh lainnya yang cukup memberi pengaruh pada perolehan suara pasangan calon, antara lain M Zen Dt. Bandaro dari Kecamatan Sangir Jujuan dan Batang Hari, Masrial Dt. Indo Mangkuto dari Kecamatan Sungai Pagu, dan Andi Suryadi dari Kecamatan Parit Gadang Diateh.<sup>19</sup> Pada akhirnya, kontestasi dalam pemilukada pertama dimenangkan oleh Drs. Syafrizal, MS.i yang berpasangan dengan Nurfirmanwansyah, A.Pt.MM. Mereka

## *Memperkuat Komitmen Keindonesiaan di Era G. 4.0*

mendapat suara terbanyak, yaitu 20.639 suara mengungguli pasangan H Muhammad Tulus dan H. Mursiwal Bagindo Kayo (16.490 suara), Yusrizal Salta dan Yos Karnedi (12.184 suara), serta pasangan Dr (Hc) Zulkhairi Dt. Marajo dengan Bustami Narda sebanyak 8/228 suara.<sup>20</sup>

### **D. Kesimpulan**

Dapat dilihat bahwa fenomena rivalitas yang menjurus kepada persaingan kelompok masyarakat, salah satunya adalah persoalan mendudukkan ibukota Kabupaten. Ketika Kabupaten telah berdiri, titik debat sudah bernada perimbangan pembangunan di masing-masing daerah kecamatan. Meskipun demikian, debat juga menampilkan keharmonisan antara sesama anggota masyarakat, dan pemerintah, serta calon pemegang kekuasaan pemerintahan. Hal ini terlihat, misalnya dalam pengajuan dan penetapan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pelibatan kelompok masyarakat nagari atau kepemimpinan tradisional nagari dalam membangun daerah dengan “rasa Solok Selatan”, penempatan kepegawaian, dan sebagainya, yang selalu memperhitungkan dan mempertimbangan asal usul kedaerahan, khususnya Sungai Pagu dan Sangir. Keadaan itulah, yang dalam dinamika perkembangan sosial politis di Solok Selatan menjadi “politik perimbangan” dari dua wilayah utama dari masyarakat Solok Selatan yaitu, Sungai Pagu dan Sangir. Keadaan ini terus berlangsung hingga dewasa ini.

### **DAFTAR PUSTAKA**

“Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2005-2010”. Padang Aro: Komisi Pemilihan Umum Daerah, 2010.

- Itra Antoni, “Perebutan Lahan dan Hegemoni: Konflik Antara Muara Labuh dengan Sangir”, dalam Zaiyardam Zubir dan Ana Fitri Ramadani, 2017. *Tanah dan Perempuan dalam Pusaran Konflik*. Padang: Minangkabau Press.
- Rusli Amran, *Sumatera Barat Hingga Plakat Panjang*. Jakarta: Sinar Harapan, 1991.
- Syamsurizaldi dan Bimbi Irawan, 2009. *Mengenal Struktur Sosial Masyarakat Adat Solok Selatan*. Padang Aro: Lembaga Kajian Sarantau Sasurambi dan Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan.

**Wawancara:**

- Afrion Hosen, Sekretaris MUI Solok Selatan pada tanggal 30 Agustus 2018.
- Febri, Staf Kesbangpol Solok Selatan, di Padang Aro pada tanggal 30 Agustus 2018.
- Hapison, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari Kabupaten Solok Selatan. (via Telepon pada tanggal 7 Oktober 2018).
- Irman, Staf Kesbangpol Solok Selatan, di Padang Aro pada tanggal 30 Agustus 2018.
- Khairunas, Mantan Ketua DPRD Kabupaten Solok Selatan, 2004-2009 (Padang Aro: 31 Agustus 2018)
- Mohd. Ansyar mantan Ketua KPU Kabupaten Solok Selatan dan sekarang menjabat sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Solok Selatan, pada tanggal 31 Agustus 2018
- Muharisman, Staf Kesbangpol Solok Selatan, di Padang Aro pada tanggal 30 Agustus 2018.
- Nila Puspita, Ketua KPU Kabupaten Solok Selatan, pada tanggal 30 Agustus 2028.

## *Memperkuat Komitmen Keindonesiaan di Era G. 4.0*

Ridwan, Kabid GTK Dinas Pendidikan Solok Selatan, di Padang Aro pada tanggal 31 Agustus 2018.

Sastrawati, Hajjah, S.Ag., Guru (Muaralabuh: 1 September 2018).

Tri Handoyo, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Solok Selatan, di Padang Aro pada tanggal 30 Agustus 2018.

### Catatan

\* Makalah disampaikan dalam Konferensi Nasional 90 Tahun Sumpah Pemuda (1928-2018) dengan tema “Memperkuat Komitmen Keindonesiaan di Era G.4.0” pada Tanggal 19 Oktober 2018, yang diselenggarakan oleh Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Padang.

\*\*Dr. Nopriyasmann, M.Hum; Drs. Syafrizal, M.Hum, dan Drs. Armansyah, M.Hum adalah Dosen Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Padang.

<sup>1</sup>Wawancara dengan Tri Handoyo, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Solok Selatan, di Padang Aro pada tanggal 30 Agustus 2018.

<sup>2</sup>Wawancara dengan Sastrawati, Pensiunan Guru MTSn Muara Labuh, di Muara Labuh pada tanggal 1 September 2018.

<sup>3</sup>Rusli Amran, *Sumatera Barat Hingga Plakat Panjang* (Jakarta: Sinar Harapan, 1991), hal. 109-114.

<sup>4</sup>Syamsurizaldi dan Bimbi Irawan, *Mengenal Struktur Sosial Masyarakat Adat Solok Selatan* (Padang Aro: Lembaga Kajian Sarantau Sasurambi dan Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan, 2009), hal. 34-38

<sup>5</sup>Syamsurizaldi dan Bimbi Irawan, *op.cit.*, hal. 48.

<sup>6</sup>Syamsurizaldi dan Bimbi Irawan, *op.cit.*, hal. 48.

<sup>7</sup>Wawancara dengan Bapak Ir. Tri Handoyo di Padang Aro, tanggal 30 Agustus 2018 dan Ridwan di Padang Aro, tanggal 31 Agustus 2018.

<sup>8</sup>Seluruh narasumber yang diwawancarai pada tanggal 30 dan 31 Agustus 2018, mengakui bahwa dikotomi pertentangan atau rivalitas dua kubu masih dan tetap berlangsung sampai sekarang. Bahkan sudah menjadi rahasia umum di kabupaten ini.

<sup>9</sup>Wawancara dengan H. Khairunnas di Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir pada tanggal 31 Agustus 2018.

<sup>10</sup>Wawancara dengan H. Khairunnas di Lubuk Gadang Kecamatan Sangir tanggal 31 Agustus 2018.

## 90 Tahun Sumpah Pemuda (1928-2018)

<sup>11</sup>Wawancara dengan Khairunas, Mantan Ketua DPRD Kabupaten Solok Selatan, 2004-2009 (Padang Aro: 31 Agustus 2018)

<sup>12</sup>Lihat “Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2005-2010” (Padang Aro: Komisi Pemilihan Umum Daerah, 2010).

<sup>13</sup>Itra Antoni, “Perebutan Lahan dan Hegemoni: Konflik Antara Muaralabuh Dengan Sangir”, dalam Zaiyardam Zubir dan Ana Fitri Ramadani (Eds.), *Tanah dan Perempuan dalam Pusaran Konflik* (Padang: Minangkabau Press, 2017), hlm. 3-4

<sup>14</sup>Wawancara dengan Sastrawati, S.Ag., Muaralabuh: 1 September 2018. Sastrawati menggambarkan, bahwa wilayah Solok Selatan sebelum pemekaran kurang diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Solok. Sarana dan prasarana yang tidak memadai, apalagi di daerah Sangir, kondisinya jauh kurang beruntung dibandingkan dengan apa yang dimiliki oleh Sungaipagu (Muaralabuh). Oleh sebab itu ide percepatan dan pemerataan pembangunan memang menjadi kebutuhan masyarakat yang mesti diwujudkan.

<sup>15</sup>Wawancara via telepon dengan Hapison, pemuda Sangir, sekarang menjabat Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari Kabupaten Solok Selatan, pada tanggal 7 Oktober 2018.

<sup>16</sup>Wawancara Hapison via Telepon, pada tanggal 7 Oktober 2018.

<sup>17</sup>Kesimpulan diambil dari pembicaraan dengan masyarakat Solok Selatan, seperti Khairunas, Mohammad Ansyar, Nila Puspita, Ridwan, Afrion Hosen, Hapison, Sastrawati, dan Febri di Solok Selatan, pada tanggal 30-31 Agustus sampai 1 September 2018, dan juga Wawancara dengan Hapison pada tanggal 7 Oktober 2018.

<sup>18</sup>BP2KS2 diketuai oleh Dr. Armen Muchtar dan Sekretaris Ir. Musril Kusai, sedangkan Tim Khusus diketuai oleh Drs. Bulasmi Aban dengan 21 anggota, yaitu Ahmad Yani, Hazwar Muis Dt. Bagindo Sati, Suhatri Hamid Dt. Nan Batuah Dilanguang, Drs. Yusrizal Sauta, Ir. Thamrin Nurdin, M.Si, Drs. Ramalis Dt. Tangkeh Rullah, Kahaidir Nuh, BE, Moechtar Is, S.H., Dr. Amen Muchar, Ir. Musril Kusai, Ir. Syahril Effendi, Nasrullah, Yunizal Bari, SE., Putra Nusa, Irwandi Yusuf, Mahyuddin, Irwandi Rais, M.Zen Dt. Bandaro, Masrial Dt. Indo Mangkuto, Andi Syuryadi, dan Khairunnas. Lapidan *Surat Keputusan BP2KS2 No. 01/KPTS/BP2KS2/2002*. Dari komposisi itu, terlihat bahwa para inisiator memang banyak berasal dari daerah Muaralabuh.

## *Memperkuat Komitmen Keindonesiaan di Era G. 4.0*

<sup>19</sup>Penyebutan tokoh ini, tentu saja tidak bermaksud meminggirkan peran tokoh-tokoh lainnya, karena pada prinsipnya semua elemen kemasyarakatan terlibat pada waktu itu. Wawancara Hapison via Telepon, pada tanggal 7 Oktober 2018.

<sup>20</sup>"Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2005-2010" (Padang Aro: Komisi Pemilihan Umum Daerah, 2010).

# Dinamika Sistem Pemerintahan dan Perlawanan Rakyat Nias Pada Masa Kolonial Belanda

Drs. Sabar, M. Hum., Dr. Anatona, M. Hum.,

Drs. Purwo Husodo, M. Hum, Riski Syukri Zalukhu

## Abstrak

Artikel ini merupakan hasil riset mengenai sejarah pulau-pulau di perairan sebelah barat Sumatera, studi kasus wilayah kepulauan Nias. Selama 3 abad belakangan, wilayah kepulauan Nias memiliki peran penting dalam konteks regional perairan di sebelah barat Sumatera. Saat organisasi dagang VOC Belanda datang ke kota Padang pada pertengahan abad ke-17 dan mendirikan sebuah loji di kota ini misalnya, maka langkah yang ditempuh VOC berikutnya ialah mengunjungi Pulau Nias melakukan hubungan dagang dengan penguasa setempat. Hal ini menunjukkan bahwa di antara pulau-pulau yang ada di gugusan perairan sebelah barat Sumatera, kedudukan pulau Nias sangat diperhitungkan. Dalam perkembangan berikutnya, kepulauan Nias akhirnya juga dikuasai oleh pemerintah kolonial Belanda. Selama Belanda berkuasa, banyak sekali dinamika perubahan yang terjadi di kepulauan tersebut di berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya serta keagamaan. Umumnya semua perubahan tersebut disebabkan pengaruh luar yang dibawa oleh pemerintah kolonial Belanda. Penulisan artikel ini bermaksud untuk menelusuri kembali sekaligus merekonstruksi bagian-bagian penting yang terjadi di kepulauan Nias selama masa pemerintahan kolonial Belanda, terutama pengaruh bidang pemerintahan kolonial Belanda dan perjuangan rakyat Nias melawan kolonial Belanda di pulau Nias yang semuanya ini berpengaruh terhadap identitas dan kebudayaan orang Nias hingga saat ini.

Keywords: Pulau Nias, Pemerintahan Tradisional, Pemerintahan Kolonial dan Perjuangan Rakyat

## **A. Pendahuluan**

Studi mengenai gugusan pulau-pulau yang membentang di sebelah barat Sumatera masih terhitung minim dan terbatas. Dari sejumlah studi yang sudah ada, kebanyakan dilakukan oleh para peneliti asing terutama Belanda, Inggris, Swiss, Jerman, Italia, Amerika Serikat, dan Jepang (Alain Viaro, 2015). Beberapa pulau yang penting dan memiliki ukuran relatif besar dimulai dari yang paling utara yaitu Pulau Simeulue. Kemudian diikuti oleh Pulau Nias dan pulau-pulau kecil di sekitarnya seperti Hinako, pulau-pulau Batu termasuk pulau Tello.

Belanda pertamakali menginjakkan kakinya pada tahun 1669 di bagian selatan pulau Nias tepatnya di Teluk Dalam tujuannya untuk berdagang dengan membuat kontrak-kontrak dengan penguasa setempat. Akan tetapi, secara administrasi penguasaan pulau ini baru berlangsung pada tahun 1826. Sebelumnya Belanda mendirikan pos militernya pada tahun 1924 di kota pelabuhan Gunung Sitoli.

Pada tahun 1840 sejumlah garnisun Belanda mulai ditempatkan di Gunung Sitoli (Andrew Beatty, 1991:4). Pada tahun yang sama dibuka pula sebuah pos militer Belanda di sana (E.B. Kielstra, 1883; M.C. Ricklefs, 1993:217). Kemudian secara bertahap, menyusul dibuka beberapa pos lainnya (E.S. de Klerck, 1912). Hingga tahun 1853 pengaruh Belanda atas Pulau Nias hanya terbatas di sekitar pos-pos yang didirikan khususnya di Gunung Sitoli (ANRI, SWk. 151.1), namun pada tahun 1863 pihak Belanda sepenuhnya berhasil menguasai Pulau Nias (E.B. Kielstra; M.C. Ricklefs; Kees Groeneboer). Masuknya pemerintah kolonial Belanda secara berangsur-angsur membawa perubahan yang sangat besar di Nias seperti administrasi pemerintahan, militer, sekolah, agama, dan lain-lain. Permasalahan mendasar pertama dalam

penelitian ini ialah, Bagaimanakah dinamika sejarah pemerintahan dan perjuangan rakyat pulau Nias pada masa kolonial Belanda?

## B. Pemerintahan Tradisional di Nias

Masyarakat Nias pada umumnya memiliki pelapisan sosial dalam masyarakat yang terdiri 4 (empat) lapisan, terutama di Nias bagian selatan yaitu di Kecamatan Teluk Dalam sebagai berikut: (1) *Si'ulu* (bangsawan); (2) *Ere* (pemuka agama); (3) *OnoMbanua* (rakyat jelata); (4) *Sawuyu* (budak). Lapisan *Si'ulu* dapat dibagi menjadi 2 golongan yaitu *balo Ziulu* (yang memerintah) dan *Si'ulu* (bangsawan kebanyakan). *Ono Mbanua* dapat dibagi menjadi 2 golongan yaitu *Sila* (cerdik pandai dan pemuka rakyat) dan *Sato* (rakyat kebanyakan). Sedangkan *Sawuyu* dapat dibagi menjadi 3 golongan yaitu *binu* (orang yang menjadi budak karena kalah perang atau di culik), *sondrara hare* (orang menjadi budak karena tidak dapat membayar hutang) dan *holito* (orang yang menjadi budak karena ditebus orang setelah dijatuhi hukuman mati) (Koentjoroningrat, 1982:49).

Sistem pemerintahan di Nias pada masa prakolonial Belanda, sebelum abad ke-19 sangat erat kaitannya dengan bentuk desa tradisional yang ada di Nias. Desa-desa ini merupakan sebuah bentuk kesatuan pemerintahan yang letaknya berpencar-pencar dan merupakan bentuk pemerintahan yang pertama yang ada di Nias. Sebelum kedatangan orang Belanda, orang Nias terpecah menjadi beberapa kesatuan setempat yang otonom yang disebut *ori* (negeri). Tiap *ori* merupakan gabungan dari beberapa *banua* (desa), dan setiap *banua* di huni oleh bagian-bagian dari beberapa *mado*. Tiap *ori* dikepalai oleh *tuhenori* (kepala *ori*) dan tiap *banua* di kepalai oleh seorang *salawa* (kepala desa). Pada pemerintahan Belanda semua *ori* di kepulauan Nias dipersatukan menjadi *Afdeeling Nias* di bawah

## *Memperkuat Komitmen Keindonesiaan di Era G. 4.0*

seorang *Assisten Resident*. Para *tuhenori* tetap dipertahankan oleh Belanda untuk mengurus *ori-ori* (Koentjoroningrat, 1982:48).

Istilah penyebutan pemimpin sebuah *banua* di Nias tidaklah sama. Pimpinan tertinggi dari sebuah *banua* di Nias Utara di sebut *salawa* sedangkan di Nias Tengah dan Selatan di sebut *si'ulu*. Baik *salawa* maupun *si'ulu* termasuk dalam kategori golongan bangsawan yaitu strata social masyarakat paling atas dan termasuk golongan orang berada dan memerintah karena mempunyai otoritas. Lingkup pemerintahan seorang *salawa* dan *si'ulu* terbatas seantero *banua* sebuah kawasan yang masih ada hubungannya dengan desa induk. Seorang *salawa* dan *si'ulu* dapat memerintah karena dipilih atau ditunjuk oleh dewan *banua* yaitu badan musyawarah dari para pengetua dan kaum bangsawan lainnya (Anatona, tt:35).

Khusus di Nias Utara dan Nias Tengan beberapa *banua* yang berdekatan biasanya membentuk semacam federasi yang permanen yang mencakup penggabungan beberapa *banua*. Gabungan dari beberapa *banua* inilah yang di sebut *Öri*, yang setelah tahun 1860 *öri* ini kemudian diadopsi oleh pemerintah Hindia Belanda untuk diterapkan di seluruh Nias. Daerah *Öri* dipimpin oleh seorang kepala *öri* yang di sebut *tuhenöri*, namun karena wilayahnya luas makaseorang *tuhenöri* dibantu oleh beberapa orang yang bertugas membantu *tuhenöri*. *Binua* dan *Öri* di Nias masing-masing memiliki dewan pimpinan yang di sebut *site 'oli*. Nama *site 'oli* baik di tingkat *banua* maupun *öri*, di sebut sebagai *salawa banua* dan *salawa öri* (Anatona, tt:35). Pemerintahan adat suku Nias juga mengenal adanya lembaga legislative yang di sebut *fondrakö*, yaitu suatu badan musyawarah dari tokoh-tokoh adat untuk menetapkan hukum tentang berbagai bidang kehidupan (Anatona, tt:31).

Menurut Samuel Novelman Wau, terdapat ciri-ciri sistem pemerintahan tradisional di seluruh Nias. Sistem pemerintahan tradisional Nias bersifat monarki-otonom, artinya tiap-tiap daeah

di pimpin secara mandiri oleh sekelompok bangsawan (*si'ulu*) setempat dan terlepas dari daerah lainnya. Di era sifat yang otonom itu Nias tidak pernah menjadi satu kesatuan politik secara utuh, yang masing-masing mempunyai kedaulatan sendiri yang tidak boleh dicampuri lainnya. Sistem pemerintahan yang dijalankan di Nias bersifat kolektif yang terdiri kaum bangsawan (*si'ulu*) dengan seorang raja (*balösi'ulu*) yang mengepalainya. Kelemahan sistem ini adalah kaum bangsawan mempunyai hubungan kekerabatan sehingga praktis kekuasaan menjadi monopoli bangsawan. Ada pula pemerintahan federasi yang di sebut Öri yaitu koalisi beberapa *banua* yang membentuk pemerintahan gabungan. Mula-mula federasi Öri dikenal di Nias Utara, tetapi setelah zaman penjajahan Belanda federasi ini mulai diterapkan di Nias Selatan (Samuel Novelman Wau, 2017:113-114).

Meskipun Belanda tetap mempertahankan dan memelihara eksistensi Öri sebagai bentuk pemerintahan asli Nias, namun Öri pada masa pemerintahan kolonial Belanda telah berubah fungsinya. Fungsi semula untuk memperkuat pemerintahan tradisional berubah fungsi menjadi alat penjajahan Belanda yang tentu menindas rakyat. Belanda memeralat para *tuhenori* demi kepentingan Belanda seperti memungut pajak, mengerahkan pekerja rodi. Akibatnya ada beberapa pimpinan Öri dan *tuhenori* menentang campurtangan Belanda. Mereka menentang kerja rodi, setoran pajak sebesar 10 perak dan 3 sen setiap kepala keluarga (Tim Penyusun, 1989:53). Mereka juga mempersiapkan perlawanan, membangun benteng perlawanan, memobilisir rakyat untuk berjuang, membuat peralatan perang, mengumpulkan perbekalan makanan (Tim Penyusun, 1989:54).

### **C. Pemerintahan Kolonial Belanda di Nias**

Pada tahun 1663 VOC memulai hubungan dagang dengan Nias. Pada saat itu Nias juga sudah mengadakan kontak dagang dengan Aceh dan Padang. Sebelum VOC mempeluas wilayah kekuasaan ke bagian barat dan bagian tengah pulau Nias, maka kelompok *zending* ini terlebih dahulu mendatangi wilayah Nias. Dengan begitu masuknya Agama Katholik ke Nias secara efektif berbarengan dengan perluasan kekuasaan Belanda di pulau Nias (Ketut Wiradnyana, 2010:109). Pada awal abad ke-19 kekuasaan kolonial Belanda masih berfokus di Jawa. Pertama-tama Dendeles membagi pulau Jawa menjadi 5 daerah administrasi yang di sebut *perfecture* yang masing-masing dikepalai seorang *pefectur* berkebangsaan Eropa. Pada tingkat bumiputra didirikan 30 kabupaten, di mana para bupati digaji dan menjadi pegawai kolonial Belanda, (Mestika Zed, 1989:21) yang oleh Daendeles jabatan bupati dimasukkan dalam hirararki birokrasi pemerintah kolonial Belanda.

Pada saat pemerintah mulai tercurah keluar Jawa pada akhir abad ke-19, maka secara perlahan-lahan pembagian daerah administratif diperluas. Kemudian pemerintah kolonial Belanda dibagi dalam 8 daerah provinsi (Mestika Zed, 1989:23) yaitu:

- a. 3 provinsi di Jawa ialah: (1) Jawa Barat, (2) Jawa Tengah, (3) Jawa Timur.
- b. Sedangkan 2 lainnya terdapat di Jawa sebagai pemerintahan khusus yang di sebut *Vorstenlanden* yaitu (4) Yogyakarta dan (5) Surakarta.
- c. Selebihnya masih ada 3 provinsi lagi di luar Jawa (*Buiten Gewesten*) yaitu: (6) Sumatera, (7) Borneo/Kalimantan, dan (8) *Groot Oost* (daerah Indonesia Timur sekarang).

Berdasarkan Surat Keputusan (*Besluit*) dari *Gouvernement Kommissaris Cochius* tanggal 29 November 1837 diputuskan bahwa

status Keresidenan Sumatera Barat ditingkatkan menjadi *Gouvernement* sehingga sejak saat itu menjadi *Gouvernement van Sumatra's Westkust* yang di pimpin oleh *Gouvernour*. Sebagai konsekuensinya maka tahun 1837 *Gouvernement van Sumatra's Westkust* dibagi menjadi 2 (dua) *Residentie* yaitu: a) *Residentie van Padang* dengan ibu kota di Padang dan b) *Noordelijke Residentie* dengan ibu kota di Air Bangis (Gusti Asnan, 2006:44). *Noordelijke Residentie* di bagi 5 (lima) *Afdeelingen* yaitu (Gusti Asnan, 2006:46): (1) Air Bangis, (2) Pasaman dan *Westerlijke Ophirdistricten*, (3) Natal dan Tapanuli dengan seorang *Controleur* Kelas I di Natal dan seorang *Controleur* kelas 3 di Tapanuli, (4) Mandahiling dan Angkola, (5) Rao, Bonjol dan *Oosterlijke Ophidistricten*.

Reorganisasi pemerintahan terus dilakukan pada tahun 1841, tahun 1842 selaras dengan perluasan wilayah Hindia Belanda, maka pada pertengahan abad ke-19 *Gouvernement Sumatra's Westkust* dibagi menjadi 3 (tiga) Keresidenan yaitu: 1) Keresidenan *Padangsche Benedenlanden*, 2) Keresidenan *Padangsche Bovenlanden* dan 3) Keresidenan Tapanuli (Gusti Asnan, 2006:53). Sementara Keresidenan Tapanuli di bagi menjadi 7 (tujuh) *Afdeelingen* yaitu (Gusti Asnan, 2006:55-56): (1) *Afdeeling* Singkel, (2) *Afdeeling* Barus, (3) *Afdeeling* Sibolga, (4) *Afdeeling* Angkola, (5) *Afdeeling* Mandahiling, (6) *Afdeeling* Natal, (7) *Afdeeling* Pulau Nias berkedudukan di Gunung Sitoli.

Setelah *Afdeeling* pulau Nias dibentuk, maka segera pemerintah kolonial Belanda semakin memantapkan kekuasaannya. Pada tahun 1857 pemerintah kolonial Belanda menjalankan politik bahasa di Nias yaitu memberlakukan atau memakai bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar di pulau Nias. Melalui bahasa Belanda ini yang sekaligus sebagai sarana untuk penyebaran Agama Kristen. Pemerintah kolonial Belanda menyadari bahwa bahasa Belanda amat sulit digunakan untuk

## *Memperkuat Komitmen Keindonesiaan di Era G. 4.0*

pendidikan, maka akhirnya tahun 1858 diputuskan untuk memberikan pendidikan di Nias dengan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar, sehingga tidak menggunakan bahasa Belanda ((Kees Groeboer, 1999:35).

Afdeeling Pulau Nias ini terbagi ke dalam 4 *Districten* dan tiap-tiap distrik di di pimpin oleh Demang. Keempat kedemangan itu ialah: (1) Demang Gunungsitoli Nias Timur, bergabung dalam beberapa kelompok Nöi-Öri. Dulu bernama Luaha Nou, Hili Gatoli, sekarang Gunungsitoli, (2) Demang Nias selatan, bergabung beberapa Öri. Dulu bernama Luha Wara, dan yang sekarang dinamakan Teluk Dalam, (3) Demang Nias Barat, yang terdiri 12 kelompok öri. Dulu bernama Asi Gombu, yang sekarang dinamakan Sirombu, (4) Demang Nias Utara, yang terdiri beberapa kelompok öri. Dulu bernama Uja Lewa, yang sekarang bernama Lahewa (Fanghao Matias Zebua, 2015:84).

Kemudian pada tahun 1919, Nias dengan pulau-pulau sekitarnya menjadi 1 (satu) *Afdeeling* dalam lingkungan Residen Tapanuli. Pada saat itu *Afdeeling* Nias dibagi ke dalam 2 (dua) *Onderafdeeling* yaitu: (1) *Onderafdeeling* Nias Selatan dengan ibu kota di Teluk Dalam, (2) *Onderafdeeling* Nias Utara dengan ibu kota Gunung Sitoli. Setiap *Onderafdeeling* dipimpin oleh seorang kontroler, dan setiap *Onderafdeling* dibagi menjadi beberapa distrik dan *Onderdistrik* yang masing-masing di pimpin oleh seorang Demang dan Asisten Demang. *Onderdistrik* di Teluk Dalam dipimpin oleh Asisten Demang yang pertama yang bernama Ama Kaenu Zebua. Sementara pemerintahan di bawah *Onderdistrik* ialah *Ori* yang dipimpin oleh *Tuhenöri* (bangsawan kebanyakan). Pemerintahan di daerah ini dilaksanakan untuk kepentingan pemerintahan penjajahan Belanda (Emanuel Lasawa Fau, 1989:23-24).

Pada tahun 1907 seorang *countroleur* Schröder ditempatkan di pulau Nias. Pada saat itu wilayah Teluk Dalam belum mau tunduk kepada pemerintah kolonial Belanda. Maka dari itu pada tahun 1908 para bangsawan (*si'ulu*) dari Nias Selatan bersama dengan *si'ulu Saönigehe Bawö Mataluo* mengadakan rapat untuk melawan Belanda. Namun Belanda berhasil menaklukkan Nias Selatan dan mendirikan benteng, sehingga pada akhir 1908 seluruh pulau Nias ditaklukkan Belanda. Akhirnya Jendral van Sodieten mengangkat Nias Menjadi *Afdeeling* (kabupaten) dengan Asisten Residen pertama adalah Van Vuuren (P. Johannes M. Hammerle, 2017:61).

Selanjutnya Van Vuuren diganti oleh Asisten Demang Rappard (1913-1915). Segera setelah itu *Afdeeling* Nias dibagi ke dalam 3 (tiga) *gezagheiber* yaitu (Tim Penyusun, 1989:50) yaitu: (1) Noord Nias yang berkedudukan di Lahewa *gezagheiber* pertama bernama Maidman, (2) Zuich Nias berkedudukan di Teluk Dalam *gezaghaeiber* pertama bernama Hajehius (1911-1913), lalu diganti oleh Stoop (1914-1919), (3) West Nias berkedudukan di Lolowe'u, kemudian dipindahkan ke Sirombu tahun 1910. Adapun para kontroler dan Asisten Residen Belanda yang ditempatkan di kota Gunung Sitoli sebagai berikut: (1) Kontroler Eman (1902-1904), (2) Kontroler Lijsten (1904-1908), (3) Assisten Residen Van Vuuren (1908-1913), (4) Assisten Residen Rappard (1913-1915), (5) Kontroler Naidman (1915-1919), (6) Assisten Residen P. Karthaus (1919—?), (7) Assisten Residen Boumen, (8) Assisten Residen Plast (sampai 1942 adalah pejabat Belanda yang terakhir di Nias). Setelah Jepang masuk ke Nias maka digantikan oleh Gunseibu Suzuki, bangsa Jepang (Mei 1942-25 Agustus 1945)

Tahun 1915 pemerintah kolonial Belanda di Lahagu pindah ke Mandrehe (Nias Barat), sehingga pengaruh Belanda semakin banyak dan orang Nias banyak yang menjalankan perintah Belanda.

## *Memperkuat Komitmen Keindonesiaan di Era G. 4.0*

Oleh karena itu bertambah lagi tempat pemerintahan Asisten Demang yaitu: (1) Demang Gunungsitoli, (2) Demang Idano Gomo, (3) Demang Gomo, (4) Demang Lahusa, (5) Demang Telukdalam, (6) Demang Lolowa'u, (7) Demang Mendrehe, (8) Demang Lahewa, (9) Demang Tuhemberua, (10) Demang Pulau-pulau Tello. Walaupun terdapat 10 tempat Assisten esident, namun yang terpakai hanyalah 2 (dua) tempat Demang yaitu: (a) Nias Timur, Nias Utara yang tinggal di Gunungsitoli dan (b) Nias Barat, Nias Selatan yang tinggal di Telukdalam (Fangehao Matias Zebua, 2015:85-86).

### **D. Perlawanan Rakyat Nias Terhadap Kolonial Belanda**

Kehadiran militer Belanda di Nias menimbulkan amarah rakyat, terutama ketika Letnan Donleben bertugas di Nias pada tahun 1846 untuk mendata topografi pulau Nias dan wakilnya Kapten Kroesen. Pemimpin benteng militer Nias di Teluk Luaha Gundre (sekarang disebut Lagundi) diserang oleh rombongan penduduk yang datang dengan perlengkapan perang, sehingga terpaksa pulang ke benteng militer di Gunungsitoli (P. Johannes. M. Hammerle, 2017:1) Lokasi serangan sampai sekarang dikenal dengan nama Daro-Daro Amatola (atau tempat duduk melepas lelah) karena di tempat tersebut terdapat sebuah batu besar yang datar permukaannya sehingga oleh penduduk setempat dimanfaatkan untuk tempat duduk sambil beristirahat.

Peristiwa tersebut membuat amarah Belanda, kemudian pada tahun 1847, Pemerintahan Belanda di Padang mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Let. Kol Van den Hart mendarat di Teluk Lagundi di pantai selatan Nias untuk menyerang para penduduk. Kedatangan satuan tugas tempur Belanda untuk melakukan serangan balasan, begitu kapal perang Belanda tiba di Teluk Luaha Gundre (Lagundi). Begitu pasukan Belanda melakukan

pendaratan di Pantai Luaha Gundre mereka langsung dihadang oleh pejuang-pejuang dari desa Hilizondrege'asi. Penghadangan dipimpin oleh seorang *Bohalima* (Panglima Perang) dari *Si'ulu* (pemimpin) Hilizondrege'asi bernama Tuhululo Ge'e (Tim Penyusun, 1989:7). Penghadangan dilakukan dengan menempatkan para pemuda sambil bersembunyi disepanjang jalan mulai dari Lagundi sampai Hilizondrege'asi. Pasukan pejuang Nias dilengkapi dengan senjata batu, bambu runcing, tombak, *baluse* (perisai), *telogu* (pisau khusus berburu) dan pedang.

Pada tahun 1854 terjadi perang saudara di Nias Selatan antara desa Orahili yang bersekutu dengan desa Botohilitano dengan desa Bawomaenamolo bersekutu dengan desa Hilizondrege'asi. Dalam perang saudara ini Si'ulu Bawomaenamolo, Tuhamaenamolo tewas dan sampai sekarang dikenal dengan istilah *Amada Sakao Baluaha* (pimpinan atau orang tua yang tewas di muara sekitar Teluk Luaha Gundre atau Lagundi) (Tim Penyusun, 1989:10). Pada pertengahan 1854 Residen Netcher mengunjungi daerah yang saling bermusuhan dengan berpura-pura bertindak sebagai misi perdamaian dan telah mempersiapkan konsep keputusan yaitu menjatuhkan denda yang berat atas desa Orahili. Kepentingan Belanda melakukan operasi perdamaian sudah tentu tidak terlepas dari kepentingan politik penjajahan Belanda yaitu "*divide et empera*" (Tim Penyusun, 1989:10).

Perlawanan rakyat Nias Selatan yang kedua terjadi pada Desember 1855. Pada tanggal 30 Desember 1855 ekspedisi Militer II berangkat dari Sibolga lewat Gunungsitoli menuju Teluk Lagundi. Pemerintah kolonial Belanda membentuk *task force*, yaitu suatu ekspedisi militer yang dipimpin Kapten de Vos. Penduduk desa Orahili tidak tinggal diam atas berita kedatangan pasukan Belanda, semua jalan menuju desa Orahili diberi ranjau berupa panah. Ekspedisi militer Belanda bergerak menuju desa Orahili (T.

## *Memperkuat Komitmen Keindonesiaan di Era G. 4.0*

Lukman Sinar, 2017). Senjata pemuda-pemuda Orahili sangat sederhana seperti tombak, pedang dan pisau. Hal ini sangat berbeda dengan persenjataan militer Belanda yang cukup modern. Pemuda-pemuda Orahili menghadapi militer Belanda dengan gagah berani meskipun dengan persenjataan apa adanya.

Melihat perlawanan pemuda-pemuda Orahili yang gigih dan pemberani, pasukan Belanda mulai mundur dari medan peperangan kembali ke Sibolga. Dengan kegagalan tersebut dalam menguasai seluruh Nias, penduduk yang digambarkan masih primitif ternyata telah memberikan perlawanan dengan kekalahan dipihak pasukan Belanda. Sejak saat itu pemerintah Kolonial Belanda memberikan julukan kepada pimpinan perlawanan rakyat Orahili (Tuhobadano Fau) sebagai "*De Verdrijver der Hollanders*" (Pengusir orang-orang Belanda)" (Tim Penyusun, 1989:18).

Perlawanan rakyat Nias Selatan ketiga terjadi pada tahun 1856. Kegagalan demi kegagalan dialami oleh militer Belanda di Nias. Mendengar kegagalan terus menerus di Nias membuat pimpinan pemerintah penajajahan Belanda di Padang Jenderal Van Swieten sangat marah menerima laporan Kapten De Vos bahwa pasukannya dipukul mundur oleh para pejuang Nias Selatan dan bahkan banyak korban yang tewas serta kerugian senjata yang ditinggalkan dalam pertempuran. (Tim Penyusun, 1989:19). Pimpinan operasi militer ketiga di Nias Selatan dipimpin Mayor J. H. Crena dengan wakilnya Kapten H. P de Vos (komandan garnizun Gunungsitoli).

Pada bulan Desember 1856, pada suatu rapat umum, Residen P.T. Couperus dengan resmi menjadikan wilayah Lagundi sebagai hak milik Belanda dan mengumumkan bagaimana pejabat setempat harus memegang pemerintahan. Umpamanya dilarang mengeksport budak atau orang lain yang dibeli (P. Johannes. M.

Hammerle, 2017:3). Sejak tahun 1856, perdagangan budak secara *de jure* dilarang dan harus berakhir, tetapi secara *de facto* masih berlangsung secara tersembunyi. Orang Nias yang dibawa ke Padang disebut *Pandelingen*. Dalam bahasa Belanda *pand* berarti jaminan atau agunan. Dengan demikian orang Nias yang ada di Padang menjadi seperti jaminan atau agunan (P. Johannes. M. Hammerle, 2017:20).

Pada tanggal 17 Februari 1863 Satuan Tugas Ekspedisi Militer V Belanda diberangkatkan dengan iring-iringan konvoi dari Padang ke Sibolga. Konvoi tiba di Sibolga tanggal 20 Februari 1863. Setelah tiga hari mengadakan persiapan di Sibolga maka pada tanggal 23 Februari 1863 Satuan Tugas berangkat menuju Pulau Nias dan pada tanggal 25 Februari 1863 tiba di Gunung Sitoli. Dari Gunungsitoli Satuan Tugas menuju Lagundi. Setelah beberapa bulan berada di Lagundi disertai pengamatan yang cermat maka pada tanggal 24 Mei 1863 oleh pimpinan mengeluarkan perintah harian dan pada tanggal 25 Mei 1863 semua pasukan diperintahkan untuk melakukan pendaratan dan invasi ke Orahili. (Tim Penyusun, 1989:26-27).

Pada tanggal 1 Juni 1863 pasukan Belanda mulai membuka serangan ke Orahili dengan melepaskan tembakan mortir dan granat. Oleh karena faktor keunggulan persenjataan dan pengalaman perang yang dimiliki pihak pasukan Belanda, maka para pejuang tidak dapat bertahan lebih lama dalam benteng Orahili. Dari pada menyerah atau ditawan oleh pasukan Belanda maka Tuhobadano Fau dan Saonigeho sebagai pimpinan pejuang mengeluarkan perintah kepada anak buahnya untuk bersama-sama mengundurkan diri ke pedalaman sambil meneruskan perlawanan secara bergerilya (Tim Penyusun, 1989:29).

Pada tanggal 6 Juni 1863 tentara Belanda menuju desa Botohosi, sesampai di tempat, para penduduk sudah banyak yang

## *Memperkuat Komitmen Keindonesiaan di Era G. 4.0*

mengungsi dan tidak mengadakan perlawanan. Desa mereka dibumihanguskan oleh tentara Belanda. Sekembali di desa Botohosi, tentara Belanda masuk lagi ke desa Orahili sambil membumihanguskannya. Pengumuman resmi (*Staatsblad* Nr. 104 tahun 1864 dalam lembaran Pemerintah Belanda berbunyi: “Pulau-pulau di sebelah Barat Sumatera sudah ditaklukkan di bawah kekuasaan pemerintahan Belanda (P. Johannes. M. Hammerle, 2017:13).

Setelah berhasil menguasai desa Orahili, pasukan Belanda melanjutkan operasi militernya ke desa Botohosi sekutu dari Orahili. Mereka membakar desa Botohosi sehingga rata dengan tanah. Pada tanggal 11 Juni 1863 benteng Orahili dapat diledakkan dan hancur rata dengan tanah. Istana atau rumah adat Si’ulu Orahili yang penuh ukiran dan patung-patung berukir yang terbuat dari batu rata dengan tanah. Penduduk Orahili terpaksa mengungsi ke tempat lain seperti ke Baruzo Sifaedo (Tim Penyusun, 1989:31).

Pada tahun 1878 dengan dukungan Belanda, desa Botohosi dihancurkan oleh pemuda-pemuda desa Fadoro. Para penduduk Botohosi tercerai berai. Ada yang ke desa Bawomataluo dan Hilizondrege’asi. Pada waktu itu penduduk Orahili sudah meninggalkan desa mereka yang telah dibumihanguskan oleh tentara Belanda (pada tahun 1863) dan membangun desa baru yang bernama Fanayama atau Bawomataluo. Meskipun demikian masih ada sebagian penduduk dari desa Botohosi yang tidak mau bergabung dengan desa lain. Mereka mendirikan desa baru yaitu desa Hilisondrekha (P. Johannes. M. Hammerle, 2017:21).

Pada tahun 1907 wilayah Teluk Dalam, Nias Selatan belum mau tunduk pada Belanda. Pada tahun 1908 para bangsawan (*Si’ulu*) dari Nias Selatan bersama dengan *Si’ulu* Saonigeho dari Bawomataluo mengadakan rapat untuk melawan Belanda. Pasukan

Belanda dengan 300 prajurit masuk Nias Selatan melalui sungai Susua. Pasukan Belanda menaklukkan Nias Selatan dan mendirikan benteng. Si'ulu Saonigehe ditangkap dan dibawa ke Gunung Sitoli. Oleh karena itu sejak akhir tahun 1908 seluruh Nias ditaklukkan oleh Belanda. (P. Johannes. M. Hammerle, 2017:61). Saonigehe memimpin di Orahili dari tahun 1902-1908.

Pada tahun 1908 desa Orahili dipimpin oleh anak muda yang bernama Ruyu dalam usia 24 tahun. Ruyu merupakan anak keturunan pejuang Orahili, kakeknya Laowo pemimpin dan pejuang Orahili pada tahun 1863, sementara ayahnya Saonigehe adalah pemimpin dan pejuang Orahili pada tahun 1902 (Samuel Novelman Wau, 2017:73).

Perjuangan yang dilakukan Ruyu berbeda dengan yang dilakukan oleh ayah dan kakeknya. Ayah dan kakeknya berjuang melawan Belanda dengan mengangkat senjata, sementara Ruyu sadar dengan mengangkat senjata tidak akan pernah mengusir penjajah karena perlengkapan persenjataan yang tidak memadai. Ruyu berjuang melawan Kolonial Belanda dengan cara diplomasi. Ruyu melawan penjajah dengan cara perundingan. Kecerdasan dan keberanian modal utama menghadapi Belanda (Samuel Novelman Wau, 2017:93).

Perlawanan Rakyat Nias terhadap pemerintahan kolonial Belanda tidak hanya terjadi di Nias Selatan, di Nias Tengah pun rakyat berjuang untuk mengusir penjajah yang bertindak sewenang-wenang. Pemerintah kolonial Belanda mengadakan ekspedisi militer ke Nias Tengah (mereka menyebut dengan Ekspedisi Militer IV) sebagai komandan satuan tugas adalah Spanjaard. Para pejuang Nias Tengah seperti: Tuha La'imba Ndruru, Siwaloro Ndruru, Nitaho Halawa, Siwahumola Halawa, Zakibu Halawa, Balohalu Waruwu, Saefa Maria Halawa, dan Sitambaho Waruwu sangat menentang kehadiran orang-orang Belanda. Pimpinan pejuang di

## *Memperkuat Komitmen Keindonesiaan di Era G. 4.0*

Nias Tengah terdiri dari para *tuhenori* dan *salewa*, sedangkan pimpinan gabungan para pejuang adalah Tuha Laimba Ndruru pemegang pimpinan adat di Nias Tengah (Tim Penyusun, 1989:45).

Diantara pejuang Nias Tengah terdapat seorang keturunan suku Aceh bernama Barusi'ite Polem. Pergaulannya dengan pejuang cukup baik dan tidak asing lagi bahkan sudah berbaur dengan masyarakat setempat. Ia mengawini putri salah seorang *balugu* (bangsawan) sebagai istri. Barusi'ite Polem memegang peranan yang cukup strategis, yaitu sebagai instruktur mengenai cara menggunakan meriam dan senjata api lainnya yang dianggap modern pada waktu itu (Tim Penyusun, 1989:46).

Pada tanggal 17 Februari 1862 pasukan Belanda bergerak dari Gunung Sitoli menuju Nias Tengah. Sasaran utama mereka adalah menghancurkan benteng Hililolowalu. Pada tanggal 18 Februari 1862 pasukan Belanda mendekati benteng Hililolowalu. Dilain pihak gong yang ada di pos Siwalawa dibunyikan dan bersamaan dengan terdengarnya suara gong maka para pejuang di benteng Hililolowalu segera mengambil posisi dalam keadaan siaga penuh. Pasukan Belanda semakin mendekat dan pada jarak pandang terlihat pada mereka para pejuang menari-nari di atas bukit sambil mengejek kedatangan mereka (Tim Penyusun, 1989:47).

Sejak adanya pemekaran pemerintahan penjajahan Belanda di Pulau Nias pada tahun 1908, maka di Nias bagian tengah dan barat mengadakan rapat rutin pemerintahan. Pada saat rapat dimulai tiba-tiba suasana berubah menjadi tegang karena pejabat Belanda yang memimpin rapat sempat melihat Tuhenori Tuha La'imba Ndruru, langsung marah dan membentakinya. Tuhenori Tuha Lai'mba Ndruru tidak patuh terhadap tata tertib pemerintah kolonial Belanda (Tim Penyusun, 1989:52). Pada tahun 1908, pemerintah kolonial Belanda menertibkan peraturan dan larangan.

Contohnya: peternakan babi tidak boleh dilakukan lagi di bawah rumah dan orang mati harus dikubur, tidak boleh dibiarkan di atas tanah (P. Johannes. M. Hammerle, 2017:22).

Pada tahun 1915, pemerintah kolonial Belanda menyelenggarakan sensus yang meliputi berbagai bidang. Sebenarnya penyelenggaraan sensus tersebut hanya sebagai siasat untuk memperoleh informasi dalam rangka melacak jejak para pimpinan pejuang yang belum berhasil mereka tangkap. Pimpinan pemerintah kolonial Belanda dalam hal ini *Gezagheibber* Van Lohagu mengeluarkan perintah penangkapan para *tuhenori* yang menjadi pimpinan pejuang. Penangkapan dilakukan dengan menggunakan berbagai siasat, seperti penangkapan terhadap Balohalu Waruwu, Niatano Halawa, Saefa Maria Halawa dibuang ke Tapanuli Utara. Sedangkan Rajanako Marunduri dibuang ke Tapanuli Selatan dan kuburannya masih ada sampai sekarang di Padang Sidempuan. Tuha La'imba Ndruru yang tertangkap di Uluwi dibuang ke Tapanuli Tengah (Sibolga) dan tidak lama kemudian dipindahkan ke rumah tahanan Belanda di Hilisimaetano (Tim Penyusun, 1989:62).

Sementara perlawanan rakyat Nias Barat dikaitkan dengan penyebaran agama Kristen. Pada tahun 1891 pekabaran Injil berkembang sampai di Nias Barat yaitu di desa Tugalamanu Lahomi dan kemudian pada tahun 1899 datang utusan *Zendingleraal* Barmen Germani bersama pendeta Sporket dan menetap di Lolomboli Moro'o. Para misionaris ini tidak ditentang rakyat dan malah sebaliknya akrab dengan rakyat. Para misionaris lebih menonjolkan pelayanan kasih dan melakukan pengobatan secara gratis. Peranan para misionaris dalam mendorong terciptanya situasi keakraban tersebut mendapat dukungan dari pemerintah kolonial Belanda dengan menyediakan berbagai fasilitas termasuk penyediaan obat-obatan. Demikian pula dengan

## *Memperkuat Komitmen Keindonesiaan di Era G. 4.0*

pengangkatan *tuhenori*, banyak memanfaatkan peranan para misionaris. Misalnya peranan pendeta Sporket yang berhasil membujuk Tetaru Gulo di Lolomboli untuk diangkat menjadi *Tuhenori Moro'o*. Kemurahan hati Belanda untuk menunjuk seseorang menjadi *tuhenori* bukan tanpa pamrih. Setidak-tidaknya diharapkan orang yang ditunjuk atas keinginannya dapat mendukung berbagai kebijaksanaan Belanda yang akan diterapkan pada rakyat (Tim Penyusun, 1989:65).

Pemerintah kolonial Belanda di Pulau Nias pada masa *Assisten Resident* Van Vuuren (1908-1913) yang berkedudukan di Gunung Sitoli, mengeluarkan peraturan bahwa setiap penduduk diwajibkan memiliki Surat Pas (*Fasi*), membayar *blasting* (pajak) dan wajib kerja rodi. Van Vuuren menjadi *Assisten Resident* pertama di Nias. (P. Johannes. M. Hammerle, 2017:60).

Pada Tahun 1909 rakyat Nias di Ori Lahomi mengadakan musyawarah dibawah pimpinan Balugu Tuha Lalai, dengan tujuan untuk menentang segala kebijaksanaan dari pemerintah kolonial Belanda maupun para misionaris, sebab Ori Lahomi menyadari bahwa kedatangan pemerintah kolonial Belanda, tujuannya adalah untuk merobohkan ketentuan-ketentuan adat yang telah ditetapkan para pimpinan adat sejak dari nenek moyang rakyat Nias. Balugu Tuha Lalai adalah seorang yang memiliki keahlian dalam ilmu bela diri. Oleh karena keahliannya, dia menjadi terkenal dan disegani diseluruh Ori Lahomi (Tim Penyusun, 1989:79).

Balugu Tuha Lalai menjadi buronan pemerintah Belanda karena sulit ditangkap berkat ilmu bela diri yang dimilikinya. Tempat persembunyian Balugu Tuha Lalai sekaligus sebagai tempat tinggal, yaitu di atas sebuah bukit kecil. Selama menjadi buronan, Balugu Tuha Lalai pergi ke Gunungsitoli dan bertemu dengan Ama Leo Zebua seorang pegawai pemerintah Belanda. Kepada Ama Leo Zebua, ia mengutarakan maksudnya

datang ke Gunung Sitoli yaitu untuk membunuh pimpinan pemerintah Belanda yang ada di Gunung Sitoli dengan cara apapun juga. Ama Leo Zebua sedikit kaget mendengar maksud dari Balugu Tuha Lalai, kemudian menyarankan kepada Balugu Tuha Lalai untuk tidak berbuat demikian karena bila dilakukan tanpa persiapan yang matang merupakan pengorbanan yang sia-sia. Penjelasan dari Ama Leo Zebua dapat dipahami dan diterima oleh Balugu Tuha Lalai. Mulai saat itu juga ia didekati oleh seorang misionaris dan akhirnya menerima dan memeluk agama Kristen (Tim Penyusun, 1989: 82-83).

Pada tanggal 14 Juli 1910 pasukan Belanda dengan dukungan persenjataan dan logistik yang cukup, bergerak dari Gunung Sitoli menuju Moro'o. Ketika mendekati desa Hiligoe sebagai desa pertama yang dilewati dari arah Gunungsitoli dalam wilayah Ori Moro'o, mereka melangkah maju secara sistem komando dengan maksud untuk menghindari jangankan sampai terperangkap dengan senjata tradisional pejuang yang pernah dialami di Nias Selatan. Pasukan Belanda melakukan pemeriksaan dari rumah kerumah dan yang mereka jumpai hanya anak-anak dan wanita karena semua laki-laki telah masuk hutan untuk bergerilya. Pasukan Belanda meneruskan operasi mereka dari kampung ke kampung yaitu ke Lolozasai, Iraonogambo dan Sisobahili, dan mereka menemui keadaan penduduk yang kosong sama seperti di Hiligoe (Tim Penyusun, 1989: 73).

Tentara Belanda tidak sabar lagi menghadapi perang gerilya dan mencari siasat agar para pejuang menyerah. Siasat yang mereka lakukan yaitu dengan cara menyiksa wanita dan anak-anak, merampok bahan makanan dan ternak, serta membakar rumah penduduk. Mendengar istri dan anak-anak disiksa disamping perbekalan sudah tidak ada maka para pejuang yang bergerilya di hutan bermusyawarah dan sepakat mau berdamai dengan pihak

## *Memperkuat Komitmen Keindonesiaan di Era G. 4.0*

Belanda. Misi perdamaian dipercayakan kepada Idano Gulo atau Ama Mbohou gelar Balugu Sesolo. Langkah pertama yang ditempuh yaitu mendekati pendeta Lagemen di Lolomoyo atau sekarang disebut Simae'asi. Pendeta Lagemen bersedia membantu misi perdamaian ini asalkan semua penduduk Moro'o menerima dan memeluk Agama Kristen. Usul pendeta Lagemen diterima oleh para pejuang (Tim Penyusun, 1989: 75).

### **E. Kesimpulan**

Pulau Nias yang terletak di pantai barat Sumatera mempunyai peranan yang penting dalam pemerintahan Belanda baik dalam bidang politik, ekonomi, agama. Oleh karena itu Pulau Nias tetap menjadi bagian dari daerah jajahan Belanda. Untuk itulah Belanda menjadi Nias bagian dari Residensi Tapanuli. Selanjutnya di Pulau Nias Pemerintah Kolonial Belanda membagi Nias menjadi beberapa distrik. Bahkan untuk mengintensifkan penjajahannya di Nias maka tahun 1857 Bahasa Belanda menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan di Nias, meskipun nanti tahun 1858 bahasa pengantarnya diganti dengan bahasa Melayu.

Sama seperti di tempat lain di Hindia Belanda maka di Pulau Nias juga terjadi perlawanan rakyat terhadap pemerintah kolonial Belanda, baik di Nias Selatan, Tengah maupun Barat. Perjuangan rakyat Nias banyak terjadi di Nias Selatan, mengingat Nias Selatan wilayahnya di pedalaman dan berbukit-bukit. Disamping itu penduduk Nias Selatan lebih cerdas dan memiliki jiwa patriotisme. Penduduk Nias Selatan menentang penjajah Belanda sampai titik darah penghabisan. Daerah yang menentang habis-habisan melawan penjajah Belanda adalah desa Orahili. Perjuangan rakyat Nias Barat lebih dikaitkan dengan penyebaran agama Kristen.

### DAFTAR PUSTAKA

- Alain Viaro, *Nias Archives on Bibliography*, Geneva, 2015.
- Anatona, "Dari Tradisional Ke Kolonial: Sistem Pemerintahan di Pulau Nias Hingga Abad ke-19" dalam Khairil Anwar (Editor), *Proseding Forum Ilmiah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, Seminar Internasional Budaya Membentuk Jati Diri dan Karakter Bangsa* (Padang: Fakultas Ilmu Budaya), tt.
- Andrew Beatty, *Society and Exchange in Nias*, Oxford: Clarendon Press, 1992.
- ANRI, SWk. 151.1, *Memorie van Overgave J. Van Swieten*.
- E.B. Kielstra, *Beschrijving van den Atjeh-Oorlog met Gebruimaker der Officieele Bronnen*, Jilid 1, ('s-Gravenhage: de Gebroeders van Deef: 1883).
- E.S. de Klerck, *De Atjeh-Oorlog*, Deel I, 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1912.
- Fangehao Matias Zebua, *Nidunö-Dunö Somasido Urongo*. Gunungsitoli: Yayasan Pusaka Nias, 2015.
- Gusti Asnan. *Pemeintahan Sumatera Barat Dari VOC Hingga Reformasi*. Yogyakarta: Citra Pustaka, 2006.
- Kees Groeneboer, *Jalan ke Barat: Bahasa Belanda di Hindia Belanda 1600-1950*, Jakarta: Erasmus Taalcentrum, 1995.
- Kees Groeboer. "Politik Bahasa pada Masa Hindia Belanda" *Wacana*, Vol. 1, No. 1, 1999.
- Ketut Wiradnyana. *Legitimasi Kekuasaan Pada Budaya Nias*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010.
- Koentjoroningrat *Manusia dan Kebudayaan Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1982.

*Memperkuat Komitmen Keindonesiaan di Era G. 4.0*

- M.C.Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern* Penerjemah: Dharmono Hardjowidjono, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993.
- Mestika Zed, “Struktur Birokrasi Kolonial di Indonesia dan Perkembangannya di Sumatera Barat Abad XIX dan XX”. *Makalah*, Padang: Fak. Sasatra Unand, 1988.
- Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Sumatera Utara*, tt.
- P. Johannes M. Hammerle. *Pasukan Belanda di Kampung Para Penjagal*. Gunungsitoli: Yayasan Pustaka Nias, 2017.
- Samuel Novelanam Wau, *Ruyu Putra Saönigehe Pejuang Yang Terlupakan*. Bekasi: Yayasan FETUA, 2017.
- Tim Penyusun. *Sejarah Perjuangan Rakyat Nias*. Gunungsitoli: 1989.
- Fangehao Matias Zebua, *Nidunö-Dunö Somasido Urongo*. Gunungsitoli: Yayasan Pusaka Nias, 2015.

# Pesona Pariwisata Minangkabau Pedalaman Sebagai *Mooi Indie* Pada Masa Kolonial Belanda (1900-1942)

Wahyu Suri Yani

## Abstrak

Visi misi utama pemerintahan dalam mewujudkan Halal Tourism sebagai potensi daya tarik para turis pada masa ini untuk berkunjung ke Sumatera Barat tidak bisa dilepaskan dari mata rantai sejarah pariwisata Minangkabau Pedalaman masa Kolonial Belanda. Minangkabau Pedalaman sebagai objek utama wisata yang mengundang turis untuk berkunjung sangat menguntungkan kolonial Belanda. Hal ini tidak terlepas dari daya pesona eksotiknya Arsitektur Bangunan Rumah Gadang, Adat Istiadat, sistem Matrilineal, keislaman dan keindahan alam Minangkabau yang menarik para turis untuk berkunjung. Serta sarana prasarana transportasi, hotel, jasa biro wisata serta publikasi buku, guide book, kartu pos, brosur dan diterbitkan pula majalah bulanan tentang Minangkabau yang sebelumnya sangat ditutupi dari negara lain. Sehingga paper ini hadir sebagai tulisan sejarah pariwisata yang akan menjelaskan bagaimana Minangkabau Pedalaman sebagai *Mooi Indie* pada masa Kolonial Belanda (1900-1942).

Kata Kunci: Minangkabau Pedalaman, Matrilineal, Islam, Rumah Gadang, Tourism, Mooi Indie

## **Pendahuluan**

Bila kita melihat bagaimana maraknya fenomena pariwisata hari ini, kita akan heran bagaimana motifnya hampir sama dengan pariwisata ketika dahulunya zaman penjajahan kolonial Belanda, terutama pariwisata Sumatera Barat dengan visi Halal Tourism sebagai icon dalam memperkenalkan Sumatera Barat ke dunia. Tulisan ini hadir mengisi kekosongan terkait bagaimana dinamika pariwisata pada zaman kolonial Belanda tepatnya di daerah Minangkabau Pedalaman sebagai kilas balik pariwisata hari ini. Pariwisata pada zaman Kolonial Belanda secara terinstitusi ada setelah didirikannya biro wisata oleh kolonial Belanda yaitu Vereeniging Toeristenverkeer (VTV). Dalam menarik wisata ke daerah koloninya Belanda melakukan berbagai publikasi seperti menerbitkan brosur, mengiklankan di koran dan menerbitkan buku tentang pariwisata unggulan daerah koloninya.

Kunjungan wisata asing ke Hindia Belanda terbatas. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor: pemerintah kolonial Belanda sengaja menutupi keberadaan Hindia Belanda terhadap wisatawan asing terutama wisatawan bangsa-bangsa Eropa lainnya. Hal tersebut disebabkan oleh ketakutan pemerintah kolonial Belanda terhadap ketertarikan bangsa Eropa terhadap kekayaan Hindia Belanda yang akan berujung pada keinginan bangsa lain untuk menguasai Hindia Belanda. Sebelum abad ke-20, pemerintah Hindia Belanda melakukan pembatasan dan pengawasan kepada mereka yang hendak berkunjung ke Hindia Belanda. Ketertutupan ini menyebabkan Hindia Belanda menjadi wilayah yang misterius. Apa yang didengar oleh masyarakat Eropa tentang kehidupan di Hindia Belanda hanyalah berita mengenai wabah penyakit, bencana alam, perang antar suku, dan santet, namun keadaan seperti inilah yang justru semakin membangkitkan rasa penasaran para pelancong Eropa.

Setelah Belanda berhasil menguasai sepenuhnya Indonesia, kemudian baru Hindia Belanda di ekspos ke dunia luar tepatnya setelah Perang Aceh berakhir ditandai dengan menyerahnya sultan Aceh ke pemerintah Belanda. Aceh menyerah tepatnya tahun 1904, yang menjadi pemberontakan daerah terakhir taklukan Belanda, sedangkan daerah lain sudah lama dikuasai terutama Jawa. Sehingga dalam mempromosikan pariwisata Belanda fokus ke daerah Jawa, Bali dan Sumatra. Daerah Sumatra Belanda mengkhususkan paket wisata ke daerah Minangkabau Pedalaman.<sup>1</sup> Adanya program wisata yang diadakan oleh kolonial Belanda ke nusantara tidak terlepas dari tujuan utamanya untuk memperkenalkan daerah koloninya yang eksotik.

Turisme modern di Hindia Belanda pada awal abad ke-20 tidak terlepas dari perkembangan industri turisme di Eropa yang berkembang setelah industrialisasi menjelang pergantian abad. Selain itu dipicu pula oleh munculnya kelas masyarakat baru, yaitu kelas pengusaha yang memiliki penghasilan lebih dan ingin melepaskan diri sejenak dari kepenatan pekerjaan mereka. Hindia Belanda yang pada masa itu merupakan salah satu koloni Belanda menjadi tujuan para pelancong Eropa dan Amerika. Tidak hanya sebagai tempat asal para pribumi memproduksi hasil alamnya untuk diperdagangkan di Padang, Pariaman, dan daerah pesisir barat lainnya, tetapi Alam Minangkabau menyimpan sejuta pesona yang belum terwakili oleh tulisan dan foto-foto yang di kirim ke Eropa untuk menarik pengunjung.

Minangkabau Pedalaman sebagai salah satu destinasi wisata tidak terlepas dari faktor jiwa zaman pada masa itu. Pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, kegiatan melakukan perjalanan yang merupakan dasar dari kegiatan turisme yang terbatas dilakukan oleh mereka yang memiliki kelebihan uang dan waktu, tetapi juga keberanian melihat sesuatu yang berbeda dan baru,

## *Memperkuat Komitmen Keindonesiaan di Era G. 4.0*

sesuatu yang di luar dari kebiasaan di negeri sendiri. Dengan demikian motif petualangan menjadi hal penting bagi para turis pada masa awal kegiatan turisme di Hindia-Belanda, dan motif utamanya adalah keingin tahuan tentang eksotisnya daerah tujuan terutama tentang budaya, adat istiadat serta pemandangannya yang indah atau *mooi Indie*, dalam beberapa catatan perjalanan ke pedalaman Minangkabau hal yang membuat turis tertarik adalah, Arsitektur Bangunan Rumah Gadang, Adat Istiadat, sistem Matrilineal dan keislaman Minangkabau. Motif selanjutnya bagi para turis ini melakukan perjalanan untuk mengunjungi daerah-daerah pegunungan (health resort) di Fort De Kock (Bukittinggi) dengan tujuan untuk memulihkan kesehatan terutama para militer. Pendukung kegiatan turisme tersebut berupa akomodasi, infrastruktur serta objek yang dapat dilihat dicantumkan dalam buku panduan (*gidsboek*). Buku panduan tersebut menjadi pegangan para turis ditambah lagi berbagai promosi menarik mengenai Hindia-Belanda.

Berdasarkan latarbelakang ini maka penulis membatasi pembahasan terkait pariwisata di Minangkabau Pedalaman dengan batas permasalahan, Apa yang menjadi Faktor Minangkabau Pedalaman sebagai Objek Wisata yang menarik bagi wisatawan? Bagaimana Minangkabau Pedalaman di gambarkan dalam catatan pariwisata Belanda? Pesona apa sajakah yang membuat orang tertarik dalam berwisata ke Minangkabau Pedalaman? Penelitian ini akan di analisis berdasarkan konsep ‘mooi indie’. Menurut Onghokham, *mooi indie* berarti “Hindia Molek”. Sederhananya *mooi indie* adalah penggambaran alam dan masyarakat Hindia secara damai, tenang, dan harmonis. *Mooi indie* sebenarnya adalah aliran dalam lukisan tentang Hindia-Belanda pada zaman kolonial. Dikenalkan oleh Du Chattel yang diterbitkan dalam bentuk portofolio di Amsterdam tahun 1930. Lukisan *mooi indie* biasanya

menggambarkan Hindia seperti pemandangan alam yang cantik, kebudayaan yang eksotis, dan manusia Hindia yang menerima perlakuan Barat sebagai pembawa peradaban. *Mooi indie* kemudian dijadikan politik oleh pemerintah Hindia-Belanda untuk pariwisata bangsa Eropa yang hendak berkunjung ke Hindia, dan penggambaran tentang Hindia yang seolah-olah makmur dan kaya walau dijajah oleh Belanda (Onghokham: 1994).

### **Faktor Pendukung Minangkabau sebagai Destinasi Wisata Kolonial.**

Salah satu faktor pendukung Pedalaman Minangkabau jadi tujuan wisata adalah karena sarana transportasi yang sudah berkembang. Terutama terkait pelabuhan, di bawah Pemerintahan Hindia Belanda, Pelabuhan Air Bangis dijadikan sebagai salah satu pusat perekonomian terpenting di Pantai Barat Sumatera. Pelabuhan Air Bangis kemudian dikembangkan oleh Belanda menjadi pelabuhan yang melayani kegiatan ekspor dan impor barang perdagangan dan pelayaran internasional.<sup>2</sup> Selain sebagai pusat perekonomian, kawasan Pelabuhan Air Bangis juga dijadikan sebagai pusat Pemerintahan Hindia Belanda dengan nama *Residentie Air Bangis* (Keresidenan Air Bangis) di bawah *Gouvernement van Sumatra's West kust*. Pada masa inilah pelabuhan Air Bangis mencapai puncak kejayaannya. Berkembang pesatnya Pelabuhan Air Bangis menjadikannya sebagai pelabuhan terpenting di kawasan utara *Gouvernement van Sumatra's Westkust* pada seperempat pertama abad XIX, menyaingi Pelabuhan Natal dan Barus.

Kemudian berkembangnya pelabuhan di kota Padang, sejak pertama kali dibangun, sekitar pertengahan abad ke-17 hingga awal abad ke-20, pelabuhan telah menjadi salah satu prasarana transportasi terpenting di kota Padang, pelabuhan telah menjadi pintu gerbang utama bagi kota Padang menjadi salah satu kota

## *Memperkuat Komitmen Keindonesiaan di Era G. 4.0*

pusat kegiatan politik, sosial, ekonomi, dan budaya terpenting di Sumatera. Berbagai fasilitas pendukung disediakan sepanjang abad ke 18 dan 19. Beberapa di antara fasilitas tersebut adalah: dermaga sebanyak tiga buah; pergudangan sebanyak empat lokasi (namun tiga di antaranya kemudian dipergunakan untuk kepentingan militer) dan satu sisanya untuk penumpukan batubara; serta sebuah menara suar setinggi 19 meter yang diletakkan pada bagian selatan pulau.

Kemudian dikembangkan Pelabuhan Muaro. Pelabuhan Muaro juga dilengkapi dengan sejumlah fasilitas lain seperti pergudangan, kantor syahbandar, dan menara suar. Jalan raya yang menghubungkan pelabuhan dengan bagian kota yang lain juga tersedia dengan cukup baik. Ketika pemerintah Hindia Belanda membangun jaringan jalan kereta api, pelabuhan ini juga dilintasi oleh rel yang menghubungkannya dengan jalur utama, dan itu sangat memudahkan bagi mobilitas barang dan penumpang yang akan menggunakan pelabuhan Muaro.

Pada akhir tahun 1880-an pemerintah membangun pelabuhan baru di kota Padang, yakni pelabuhan Emmahaven. Pelabuhan ini diresmikan bersamaan waktunya dengan pemakaian jalan kereta api ruas Emmahaven-Padang, Padang Panjang-Muaro Kelaban. Kemudian didukung sejak perempat kedua abad ke 20 telah hadirnya sarana transportasi lain yang menjadi saingan utama kapal laut, seperti bus, *vracht auto* (keduanya mulai hadir tahun 1915), dan pesawat terbang (mulai hadir tahun 1935) (Gusti Asnan, Kota Padang Tempo Doeloe, 2009). Rute pesawat Batavia-Palembang-Singapura oleh Koninklijke Nederlandsch-Indische Luchtvaart Maatschappij (KNILM)- maskapai penerbangan Hindia Belanda- sehingga memberikan peluang kepada para turis di Singapura untuk berlibur di Sumatra, Jawadan Bali meskipun hanya memiliki waktu satu minggu.

Meningkatnya sarana transportasi antara Eropa dan Hindia Belanda mengakibatkan meningkatnya pula arus kunjungan wisata asing di Hindia Belanda. Menurut catatan *the Netherlands Indies Official Tourist Bureau*, wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Hindia Belanda berjumlah 8.147 orang. Meningkatnya arus wisatawan tersebut, kemudian diikuti pula oleh pembangunan berbagai sarana penunjang/akomodasi pariwisata. Pembangunan sarana-sarana akomodasi pariwisata tersebut antara lain: Hotel-hotel bertaraf internasional di kota-kota pelabuhan. Pembangunan prasarana jalan raya dan sarana transportasi keretaapi. Kemajuan tersebut diiringi pula oleh pembangunan sarana akomodasi di daerah-daerah pedalaman dan pegunungan yang berhawa sejuk. Sampai awal abad 20 terdapat sekitar 200 jenis kapal dan perahu di seluruh Kepulauan Indonesia. Pemerintah Hindia Belanda tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Mereka mendirikan dua maskapai, NISM dan KPM, untuk memonopoli transportasi laut di pantai barat Sumatera bahkan di seluruh Hindia Belanda.

Perkembangan sarana transportasi, pembangunan hotel, fasilitas kesehatan tidak hanya di Kota Padang tapi juga ke Minangkabau Pedalaman. Initidak terlepas dari telah berhasilnya usaha Belanda menggagalkan perlawanan selama Perang Padri. Perang Padri yang berpusat di Pedalaman Padang awalnya menjadi kendala utama Belanda dalam menguasai daerah Minangkabau. Tetapi ketika permasalahan itu sudah terselesaikan dan diterapkannya “Sistem Tanam Paksa” kopi, semakin memberikan kesempatan Belanda mengetahui Padang Pedalaman, terutama terkait Adat Istiadat, Agama Islam dan ke eksotikan Minangkabau dari bangunan Rumah Gadangnya, sistem matrilineal.

### **Minangkabau dalam Publikasi Kepariwisata**

Sebelum adanya publikasi khusus dari VTV terkait pariwisata di Hindia Belanda. Pariwisata berawal dari kepentingan orientalis untuk memenuhi kebutuhan mengenai informasi daerah koloni. Oleh karena itu, Raja Willem I menganggapnya sebagai masalah serius dan ia mengirimkan para ahli serta juru gambar ke Hindia untuk dapat menggambarkan situasi sebenarnya, seperti penulis sejarah, ahli ilmu alam, dan ilmu bumi. Merekalah yang menjadi sumber untuk cerita-cerita perjalanan tersebut (VanGoor 2000: 213). Cerita-cerita perjalanan mereka dimuat di koran pemerintah berisi gambaran tentang pemandangan, flora, dan fauna di wilayah yang didatangi, pengamatan tentang kebiasaan dan budaya masyarakat setempat dan catatan sewaktu mereka mendaki gunung-gunung yang tinggi (Termorshuizen 1993: 13). Tulisan mereka juga menceritakan bagaimana para penduduk pribumi pada masa itu melihat dan menyambut para penjelajah Eropa (*Europese reizigers*). Sehingga bagi banyak orang Eropa, koran merupakan sumber pengetahuan mereka tentang penduduk pribumi Hindia (Termorshuizen 1993: 18).

Kemudian dibentuknya VTV semakin memberikan informasi luas terkait Padang Pedalaman. VTV tidak hanya menyelenggarakan kegiatan pariwisata, yang merupakan salah satu sumber keuangan organisasi tersebut, tetapi juga menerbitkan berbagai informasi wisata dalam bentuk brosur maupun buku. Berbagai brosur ditulis dengan menggunakan Bahasa Inggris, sedangkan buku-buku yang diterbitkan oleh VTV, merupakan buku-buku penuntun wisata (*guide book*), yang menjelaskan mengenai daerah-daerah wisata di pulau-pulau di Hindia Belanda. Pada tahun 1923 VTV menerbitkan semacam artikel bulanan bernama *Tourism*. Artikel tersebut secara selektif dikirim ke 10.000 alamat di seluruh

dunia dalam usaha memperkenalkan pariwisata di Hindia Belanda.

Mempromosikan Hindia Belanda kepada wisatawan asing khususnya negara-negara Eropa memang menjadi kecemasan tersendiri bagi pemerintah Belanda. Pemerintah Belanda cemas, jika Hindia Belanda menjadi incaran negara lain.

Namun demikian kunjungan wisatawan asing merupakan sumber pemasukan penting bagi keuangan Pemerintah Hindia Belanda. Oleh sebab tersebut, Pemerintah menetapkan untuk membatasi kunjungan dan ruang gerak wisatawan asing. Pantai Barat Sumatera merupakan salah satu dari sejumlah provinsi di luar Jawa yang mempunyai daerah terluas, memiliki kekayaan alam yang besar, merupakan salah satu daerah yang memberikan pemasukan yang tinggi bagi Pemerintah Hindia Belanda, serta terkenal di kalangan ilmuwan, politisi, saudagar, pelaut, dan para pengelana. Bahkan, menurut Rusli Amran (1988), pada abad 19 salah satu kota di pantai barat Sumatera, yaitu Padang, adalah kota metropolis terbesar di seluruh Pulau Sumatera disini berkembang berbagai pers, mulai dari pers Islam, Hindia Belanda dan pers yang berbahasa Melayu yang memperkaya literatur tentang informasi kemolekan Minangkabau Pedalaman.

Berbagai penerbitan untuk promosi antara lain 1000 eksemplar gambar *kunstkalendar* (kalender seni) sebanyak 3000 eksemplar serta 1000 eksemplar kartu posoleh VTV (*AH*, 27-02-1910). Lainnya adalah *Come to Java, Visit Java and Sumatra, Batavia*. Selain kartu pos dan buku diterbitkan pula majalah bulanan 'Tourism' dengan tiras sebanyak 10.000 eksemplar. Majalah ini dibagikan secara gratis di luar negeri, khususnya di negara-negara sekitar Hindia-Belanda (*HV*, 11-01-1927 dan *NRC*, 13-01-1927). Sehubungan dengan daerah tujuan turisme di Hindia, Jawa dan Sumatra merupakan daerah yang kerap dikunjungi oleh para turis.

## *Memperkuat Komitmen Keindonesiaan di Era G. 4.0*

Oleh karena itu perusahaan pelayaran *Rotterdam Lloyd* menerbitkan buku khusus mengenai wilayah tersebut. Buku tersebut adalah *Java, the holiday paradise and Sumatra*, buku yang diterbitkan oleh *Rotterdam Lloyd Royal Mail Line*. *NRC* (14-08-1929) dan *Het Vaderland* (17-08-1929) memuat reklame mengenai penerbitan buku panduan dalam bahasa Prancis *Java, l'Eden sous les tropiques; Bali, l'île de Beauté* dan *Visitez Sumatra le pays des contrastes* yang diterbitkan sebanyak 60.000 eksemplar dan dikirimkan ke berbagai alamat. Penerbitan buku itu dimaksudkan karena meningkatnya minat para turis dari Prancis dan Belgia terhadap Hindia-Belanda.

Penerbitan majalah lipat yang berisi informasi mengenai Batavia dimuat *Het Vaderland* (7-05-1930). Sembilan tahun kemudian diterbitkan buku panduan turisme edisi Batavia yang beritanya dimuat *Het Vaderland* (23-04-1939). VTV pun mengeluarkan seri terbitan tentang Hindia-Belanda yang penuh dengan gambar. Seri terbitan itu antara lain *West -Java, Mid-Java, East-Java* dan *North Sumatra, Middle Sumatra, South Sumatra, Bali, Celebes, de Molukken, de Klein Soenda eilanden, dan Borneo*. Seri terbitan ini mendapatkan pujian yang terbaik sehingga dikirim ke 12.000 alamat di seluruh dunia (*HV*, 17-05-1930). Berkaitan dengan objek turisme terdapat artikel dalam bentuk opini yang dimuat dalam *NRC* (10-08-1920). Artikel tersebut ditulis oleh Dr. Roelof Broersma penulis *Oostkust van Sumatra* (1919). Broersma membahas keindahan rumah di Minangkabau. Ia berpendapat bahwa jika ada wilayah dengan potensi turisme yang besar di Sumatra, dua wilayah itu adalah Pantai Barat Sumatra dan Tapanuli. (Achmad Sunjayadi, 2014: 47-66) Sedangkan buku yang terkenal terkait Minangkabau Pedalaman adalah *Vereeniging Toeristenverkeer, Guide to Sumatra. With a More Complete Description of the Padang Highlands* dan *Vereeniging Toeristenverkeer and Westenenk*,

*Sumatra: Illustrated Tourist Guide: A Fourteen Day's Trip in the Padang Highlands (the Land of Minang Kabau).*

terbit tahun 1913 Official Tourist Bureau (Dinas Pariwisata) Hindia Belanda yang ditulis oleh L.C. Westenenk. Buku itu mempromosikan keindahan alam Minangkabau dan keunikan budayanya kepada calon turis dari Eropa.

### **Pesona Wisata Minangkabau Pedalaman**

Mula-mula yang menikmati keindahan alam dan keunikan budaya Minangkabau itu hanya wisatawan pejabat kolonial Hindia Belanda dari Batavia yang melakukan turne ke Minangkabau Pedalaman. Namun, menyusul selesainya pembangunan Pelabuhan Teluk Bayur (Emmahaven) pada tahun 1893, kapal-kapal dari Eropa secara reguler singgah di Padang yang juga membawa para pelancong dari Eropa yang ingin menikmati keindahan alam Minangkabau. Dalam Rubrik Minang Saisuak *SinggalangMinggu yang ditulis oleh Suryadi Leiden* edisi 11 September 2011. Menurunkan foto klasik Hotel Merapi di Padang Panjang. Menjelaskan keberadaan hotel berhubungan erat dengan budaya pelancongan. Foto tersebut berjudul Hotel Merapi te Padang-Pandjang dibuat tahun 1899. Dalam foto kelihatan satu keluarga dengan anak-anaknya. Walaupun kotanya tidak begitu besar, Padang Panjang sangat strategis letaknya: yaitu sebagai kota transit bagi para pedagang atau siapa saja yang melakukan perjalanan dari kawasan pantai barat Sumatra ke pedalaman Minangkabau atau sebaliknya. Padang Panjang, seperti halnya Bukittinggi (Fort de Kock) berfungsi sebagai kota tempat istirahat bagi kalangan menengah dan atas dalam masyarakat kolonial di Sumatra Barat, khususnya bagi mereka yang bekerja di Padang, kota yang karena terletak dekat pantai bersuhu panas.

## *Memperkuat Komitmen Keindonesiaan di Era G. 4.0*

Tidak hanya di Padang Panjang, hotel juga berkembang di daerah Solok, Foto klasik Hotel Talang di Solok, salah satu hotel tertua. Keberadaan hotel ini menunjukkan bahwa Solok juga sudah lama menjadi daerah tujuan wisata di dataran tinggi Minangkabau. Foto tersebut dibuat sekitar 1900 dan merupakan salah satu foto dalam album yang berjudul *Souvenir de Voyage West-Sumatra en West-Java*. Dalam foto kelihatan satu keluarga Eropa yang sedang menginap di Hotel Talang. Tidak disebutkan nama kepala keluarga ini, dari model pakain menjelaskan mereka kalangan atas orang Belanda. Pakaian para wanitanya masih merefleksikan Zaman Victoria: gaun panjang yang sampai ke tanah. Di latar belakang terlihat Hotel Talang yang sudah memakai atap genteng dan di terasnya tampak dua orang pribumi.

Begitu pula dengan perkembangan hotel di Kota Padang. Padang sejak dulunya sudah menjadi kota bisnis dan kota wisata di Hindia Belanda. Di zaman kolonial Padang adalah kota termaju di pantai barat Sumatra. Pada masa ini di Padang sudah ada perusahaan asuransi, hotel, klub eksekutif dan bisnis, bioskop, grup musik, dan surat kabar. Kapal-kapal dari dan ke Eropa selalu singgah di pelabuhan Emma yang dibangun Belanda pada tahun 1888. Penduduk Padang pada waktu itu sudah terdiri dari berbagai suku bangsa: pribumi, Eropa, dan bangsa-bangsa Asia lainnya. Kemudian foto Hotel Sumatra, hotel yang pertama didirikan di Padang. Foto ini dibuat tahun 1867 oleh Woodbury & Page, pionir tukang foto profesional di Batavia pada masa itu. Terakhir, sebelum sampai ke KITLV Leiden, foto ini dikoleksi oleh G.P. Rouffaer di Den Haag. Lokasi Hotel Sumatra kira-kira dekat Penjara di Berok. Bangunannya yang masih terbuat dari kayu dan beratap rumbia. Pada masa itu juga belum ada alat transportasi mobil; yang ada baru kereta kuda. Boleh dibilang bahwa Hotel Sumatra adalah pionir dunia perhotelan di Padang. Pada dekade-

dekade berikutnya muncul hotel-hotel lain, seperti Hotel Atjeh, Hotel Oranje dan Hotel Kong Bie Hiang. Mungkin beberapa bangunan hotel tua yang masih tersisa di Padang dapat dilestarikan sebagai aset wisata sejarah kota ini, yang rupanya pernah jaya di masa lalu. (Sumber: Suryadi Leiden, Belanda.)

Sedangkan destinasi wisata yang utama di Minangkabau pedalaman adalah Fort de Kock. Bukittinggi adalah “*mooi Indie*” di Minangkabau Pedalaman yang tampil sebagai gadis Minangkabau yang menawan. Kota ini dibangun Belanda untuk para pegawainya yang ingin menghirup udara dingin Eropa setelah kepanasan bekerja di ibukota Sumatra’s Westkust, Padang, yang menurut Parada Harahap dalam bukunya *Dari Pantai ke Pantai* (1926) panasnya minta ampun. Kota wisata yang diciptakan Belanda tersebut dilengkapi dengan Jam Gadang yang selesai dibangun tahun 1926. Jam ini adalah hadiah Ratu Belanda Emma kepada Tuan Cotroleur Rookmaaker atas kesuksesannya menjadi administrator kolonial dan juga karena Ratu Emma berulang tahun. (Suryadi – Leiden University, Belanda | *Singgalang*, Minggu, 12 Juni 2016 (Sumber foto: Majalah *PandjiPoestaka*, No. 50, Tahun VI, 22 Juni 1928: 1)

Fungsi kota Fort de Kock kurang lebih sama dengan kota Bogor, sebuah kota peristirahatan untuk para pegawai Belanda yang bekerja di Batavia (kini: Jakarta), atau kota Malang dan Salatiga di Jawa Timur yang juga berfungsi sama: tempat peristirahatan para pegawai Belanda yang bekerja di Surabaya. Di zaman kolonial, Fort de Kock telah dipromosikan menjadi salah satu kota tujuan wisata (*touristdestination*) di Sumatra. Asisten Residen Agam Tua, L.C. Westenenk, bahkan menulis dua *guide book* untuk turis guna mempromosikan Fort de Kock dan daerah-daerah sekitarnya sebagai daerah tujuan wisata, yaitu: *Acht Dagen in de Padangsche Bovenlanden* (*‘DelapanHaridiPadangDarat’*) (1909) dan *Sumatra:*

## *Memperkuat Komitmen Keindonesiaan di Era G. 4.0*

*Illustrated Tourist Guide: Fourteen Day's Trip in the Padang Highlands (The Land of Minangkabau)* (1913). Selanjutnya Ngarai Sianok, sudah difasilitasi dengan pepohonan hijau meneduhi jalan-jalan kota, keberadaan hotel Centrum, salah satu hotel 'mewah' di Fort de Kock pada awal abad ke-20. Selain itu, di kota ini berdiri beberapa gedung pemerintah kolonial dan fasilitas pariwisata dan olah raga. Sampai saat ini masih melekat istilah di darek: kalau mau pergi ke Bukittinggi disebut '*paikaGaduang*' ('pergi ke gedung' = pergi ke kota yang banyak gedungnya). (Suryadi – Leiden, Belanda. (Sumber foto: *Tropemuseum Amsterdam*)

Selanjutnya adalah daerah Taram (sekarang masuk Kecamatan Harau) adalah salah satu *nagari* yang cukup terkenal di Luhak 50 Koto. Di nagari ini ditemukan beberapa peninggalan megalitik berupa bekas-bekas tempat tinggal manusia gua. Nagari Taram pernah mendapat perhatian khusus oleh antropolog Harsja W. Bachtiar, seperti terefleksi dalam artikelnya: "Nagari Taram: A Minangkabau Village Community", dalam: Koentjaraningrat (ed.), *Villages in Indonesia* (Ithaca, New York: Cornell University Press, 1967: 348-385). Di zaman Paderi. Nagari Taram pernah pula dijadikan target pemurnian agama oleh para pengikut Tuanku Nan Renceh. Surau yang terekam dalam foto tentang Taram, bagian dari ekspansi agamais Kaum Paderi ke Taram. Foto tersebut menunjukkan bahwa Nagari Taram sudah menjadi salah satu objek promosi wisata pedesaan (*ruraltourism*) di Minangkabau sejak zaman kolonial. (Suryadi, *Singgalang*, Minggu, 2 Oktober 2011, – Leiden, Belanda, Sumber foto: KITLV Leiden).

Selain fasilitas yang mendukung dan keindahan Minangkabau Pedalaman, asal nama Minangkabau dari mitos adu kerbau dengan orang Jawa menjadi jualan yang menarik dalam mempromosikan Padang Pedalaman. Dan itu sempat di sangkal oleh Jeffrey Hadler dalam bukunya "Karena itu saya tadinya

beranggapan bahwa etimologi itu dikarang-karang oleh dewan pariwisata kolonial pada 1910-an untuk mempromosikan dataran tinggi itu sebagai suatu kota peristirahatan. Tapi ternyata cerita itu sudah muncul jauh lebih awal, dalam suatu kisah kekerasan sadis yang dituliskan oleh penakluk-penakluk yang gagal dari Jawa. (Jeffrey Hadler, 2010: 18)

Ketertarikan para pelancong terkait Minangkabau di gambarkan oleh Hans Meulendijks dalam pengantar bukunya yang berjudul “Tourism and imperialism in the Dutch East Indies Guidebooks of the Vereeniging Toeristenverkeer in the late colonial era (1908-1939)” Tulisan tersebut menggambarkan ke eksotisan bangunan Rumah Gadang Minangkabau, arsitekturnya, bentuk atapnya, seninya dan bahan yang digunakan untuk membuat Rumah Gadang tersebut dari kelapa, bambu dan bagaimana indahnya ukiran dari rumah gadang tersebut yang melambangkan adat dan teknologinya. Hal-hal seperti ini menjadi menarik bagi orang Belanda dan Eropa lainnya. Kemudian merek menyebut dalam buku *Guide to Sumatra* mengklaim bahwa “the Padang Highlands have ‘from every point of view, an interesting native population, which is not yet spoiled by a stream of Tourists, but adheres rigidly to its old customs”. Sedangkan ulasan Hans Meulendijks terkait Guidebooks ke Minangkabau Pedalaman. Bagaimana mereka menggambarkan Minangkabau yang dianggap primitif apalagi sistem Matrilinealnya tetapi penganut Islam yang kuat. (Hans Meulendijks, 2017)

Kemudain bagaimana pemandangan di Minangkabau Pedalaman, Belanda juga mengabadikannya dalam sebuah film yang berjudul *Door de Padangsche Bovenlanden* (1940) Film ini menampilkan suasana pinggiran Emmahaven, perayaan Cap Go Meh di kampung Pondok Padang, perjalanan kereta api dari Kota Padang menuju daerah pedalaman Minangkabau. Selain itu, dalam

## *Memperkuat Komitmen Keindonesiaan di Era G. 4.0*

film yang berdurasi 20 menit, 33 detik ini, juga menampilkan sisi unik dari aktivitas perekonomian di pedalaman Minangkabau. *Door de Padangsche Bovenlanden* merupakan salah satu film yang diproduksi NIFM Polygoon pada tahun 1940. Film berdurasi 20 menit, 33 detik ini menampilkan suasana sejarah maritim, kebudayaan, Pariwisata, transportasi, sosial ekonomi, Pemandangan sekaligus geografis Minangkabau pedalaman.

### **Kesimpulan**

Pariwisata pada masa kolonial berawal dari kepentingan pemerintahan kolonial untuk mengetahui lebih dalam tentang daerah koloninya, mereka mencari tau dengan cara mengirimkan para orientalis. Setelah dikuasi daerah koloni oleh Belanda secara umum baru di buka pariwisata secara besar-besaran ke publik dengan berbagai media, buku, brosur, kartu pos dan lainnya. Daerah utama destinasi pariwisata zaman kolonial adalah Jawa, Bali dan Sumatra. Sumatra tepatnya di Minangkabau Pedalaman. Minangkabau sebagai tujuan destinasi wisata tidak hanya mempunyai pemandangan alam yang indah dan budaya yang unik dari masyarakat juga telah didukung dengan prasarana pariwisata. Ini tidak lepas dari kekuatan ekspansi ekonomi Belanda yang menjadikan Padang sebagai pusat kekuasaannya.

Motif pelancong Eropa melakukan perjalanan ke Minangkabau Pedalaman selain didukung dengan finansial juga keingintahuan mereka yang besar terkait eksotisnya Minangkabau baik itu budayanya, sistem Matrilinealnya yang kuat tapi juga pemeluk agama Islam yang taat, kemudian eksotisnya bangunan Rumah Gadang dan di dukung oleh pemandangan alamnya. Banyaknya pelancong yang ke Minangkabau Pedalaman menjadi salah satu faktor kenapa catatan tentang Minangkabau banyak sekali terutama dalam bahasa Belanda dan Jerman .

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal dan Koran

- Achmad Sunjayadi. Kabar dari Koloni: Pandangan dan Pemberitaan Surat Kabar Belanda tentang turisme di Hindia Belanda (1909-1940. *Jurnal Kajian Wilayah* 5, 1. 2014.
- Achmad Sunjayadi Mengabadikan estetika Fotografi dalam promosi pariwisata kolonial di Hindia-Belanda. *Wacana* 10, 2. 2008
- Gusti Asnan. Pelabuhan Pelabuhan Kota Padang Tempo Doeloe. *Amoghapasa* 13, 17. 2009.
- Onghokham “Hindia yang Dibekukan: 'Mooi Indie' dalam Seni Rupa dan Ilmu Sosial” Dalam *Majalah Kalam* edisi 3, 1994.
- Suryadi, Singgalang, 2 Oktober 2011
- Suryadi, Singgalang*, 23 November 2011
- Suryadi, Singgalang*, 11 September 2011
- Suryadi, Singgalang*, 12 Juni 2016

### Buku

- Bachtiar, Harsja W. “Negeri’ Taram A Minangkabau Village Community”, dalam: Koentjaraningrat (ed.), *Villages in Indonesia*. Ithaca, New York: Cornell University Press. 1967.
- Dobbin, Christine. *Kebangkitan Islam Dalam Ekonomi Petani Yang Sedang Berubah, Sumatera Tengan 1784-1847*. Jakarta: Komunitas Bambu. 2008.
- Gusti Asnan. *Dunia Maritim Sumatra Diawal Dan Di Akhir Era Kolonial: Kesaksian Dua Penulis Travelogues” Dalam Arus Balik Memori Rempah Dan Bahari Nusantara Kolonial Dan Poskolonial*. Yogyakarta: Penerbit Ombak. 2014.

*Memperkuat Komitmen Keindonesiaan di Era G. 4.0*

- Gusti Asnan. Pemerintahan Sumatera Barat dari VOC Hingga Reformasi. Yogyakarta: Citra Pustaka. 2006
- Harahap, Parada. *Dari Pantai ke Pantai*. Bintang Hindia. 1926.
- Hadler, Jeffrey. Sengketa Tiada Putus, Matriarkat, Reformisme Islam dan Kolonialisme di Minangkabau. Jakarta: Freedom Institut. 2010.
- Loeb, Edwin M. *Sumatra Sejarah Dan Masyarakatnya*. Yogyakarta: Penerbit Ombak. 2013.
- Marsden, William. *Sejarah Sumatera*. Komunitas Bambu: Jakarta. 2013.
- Meulendijks, Hans. *Tourism And Imperialism In The Dutch East Indies Guidebooks Of The Vereeniging Toeristenverkeer In The Late Colonial Era (1908-1939)*. MA Thesis Cultural History Of Modern Europe, Utrecht University. 2017.
- Rusli Amran. *Sumatera Barat Hingga Pelakat Panjang*. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan. 1981.
- Rusli Amran. *Padang Riwayatmu Dulu Cetakan ke-II (Diperlengkap)*. Jakarta: CV Yasaguna. 1988.
- Singgih Tri Sulistiyono, *Java Sea Network: Patterns In The Development Of Interregional Shipping And Trade In The Process Of National Economic Integration In Indonesia 1870s - 1970s*, Amsterdam: Vrij University Amsterdam, 2003.
- Termorshuizen, Gerard. *In de binnenlanden van Java: vier negentiende eeuwse Reisverhalen*. Leiden: KITLV Uitgeverij. 1993. (Di Download dari Delpher)
- Van Goor, J. *Indische avonturen: opmerkelijke ontmoetingen met een anderewereld*. Den Haag: Sdu. 2000. (Di Download dari Delpher)
- Zulqayyim. *Boekittinggi Tempo Doeloe*. Padang: Andalas University Press. 2006.

### Catatan

1 *Padangsche Bovelanden*, atau 'Padang Dataran Tinggi', adalah istilah yang digunakan Belanda dan Eropa pada masa kolonial, menunjuk daerah pedalaman Sumatra Barat atau pusat kerajaan Minangkabau.

2 Pelabuhan Air Bangis dinyatakan sebagai pelabuhan pelayaran internasional oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1839 beserta Pelabuhan Singkil, Barus dan pada tahun 1847 disusul oleh Pelabuhan Muara Kumpeh (Jambi). Lihat Singgih Tri Sulistiyono, *Java Sea Network: Patterns In The Development Of Interregional Shipping And Trade In The Process Of National Economic Integration In Indonesia 1870s-1970s*, Amsterdam: Vrij University Amsterdam, 2003, hlm. 84-85.

*Memperkuat Komitmen Keindonesiaan di Era G. 4.0*

# Konstruksi Keindonesiaan di Sumatera Barat Pada 1950an

Yudhi Andoni, S.S., M.A, Alex Darmawan, S.S., M.A

## Abstrak

Era 1950an di Sumatera Barat bagi masyarakat Sumatera Barat adalah masa-masa penuh euforia keintelektualan, sekaligus arena ekspresi keindonesiaan yang tengah mencari kelempangan jalannya. Setelah generasi 1920an hijrah ke Jakarta dan menjadi elit nasional di akhir perang (1949), telah tumbuh generasi kedua yang berusaha menegosiasi antara tradisi dan modernitas dalam alam kebangsaan yang baru (1950) di Sumatera Barat. Mereka adalah orang-orang yang berusaha melihat serta memahami identitas keindonesiaan sebuah warisan sekaligus ekspresi tradisi (Minangkabau) dan modernitas. Makalah ini akan *pertama*, memahamimunculnya alam pemikiran baru yang dikembangkan pasca kolonial, sehingga bisa menjelaskan bentuk-bentuk keindonesiaan yang tumbuh-kembang dalam masyarakat Indonesia yang baru; *kedua*, warisan intelektual para elite baru Sumatera Barat itu dalam merumuskan “imajinasi keindonesiaan” pasca kolonial. Pendekatan yang dipakai dalam analisis makalah ini adalah sejarah intelektual. Berdasarkan analisis dapat dijelaskan kemunculan gerakan-gerakan anti-Jakarta (PRRI) di akhir 1950an merupakan satu “anti-klimaks dan ironi keindonesiaan” orang-orang di Sumatera Barat kala itu. Pada satu sisi mereka kelompok idealis yang memandang Indonesia sebagai “produk modernitas” versus “Indonesia versi Jakarta”. Tapi di sisi lain, ekspresi modernitas itu larut dalam tradisi purba (baca: pemberontakan), ketimbang dialog titik temu keindonesiaan sebagai tradisi modernitas.

Kata kunci : euforia keintelektualan, menegosiasi tradisi dan modernitas, warisan intelektual, sejarah intelektual, dialog titik temu keindonesiaan

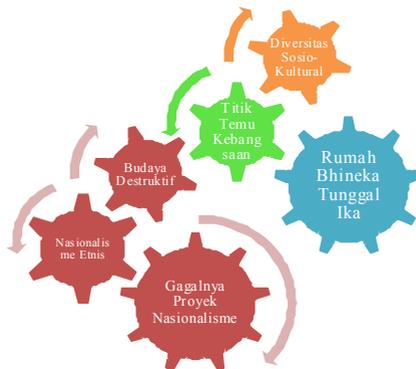
## **Pengantar**

*Imagined communities* (komunitas terbayangkan) merupakan salah satu teori penting dan klasik tentang sejarah nasionalisme Indonesia (Chong, 2009). Menurut Ben Anderson dalam bukunya *Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism* (1983), nasionalisme negara-negara yang muncul pasca Perang Dunia II diawali kemunculan media cetak (*print capitalism*). Melalui media cetak, ide-ide tentang kesamaan nasib oleh penderitaan yang diakibatkan kolonialisme menjadi tersebar ke berbagai daerah (Reid, 1985: 499). Nasionalisme tidak bisa tumbuh melalui penguatan rasisme atau etnisisme (*ibid.*).

Dalam konteks Indonesia, yang memberi kekuatan kepada gagasan nasionalisme Indonesia bukanlah kesatuan yang dibangun atas solidaritas etnis atau ras, keterikatan keagamaan, atau geografis, melainkan rasa kesamaan pengalaman dan solidaritas khusus yang mengalir di dalamnya (Elson, 2008: 22). Solidaritas khusus itu terbentuk pada kekuatan diseminasi konseptual *imagined communities* para *founding fathers* bangsa Indonesia. Mereka membentuk kesadaran nasionalisme melalui Proklamasi 17 Agustus 1945, Revolusi Indonesia 1945-1949, Pemilu 1955, dan Pembentukan Konstituante sebagai hasil pemilu. Empat peristiwa historis dalam satu tarikan nafas itu terbukti ampuh menjadi cangkang kokoh keindonesiaan, di masa Orde Lama (1959-1966), dan periode Orde Baru (1967-1998). Namun selama hampir dua dekade terakhir, terasa adanya erosi nasionalisme Indonesia itu melalui penguatan budaya-budaya destruktif di berbagai daerah, terutama pasca Orde Baru (1999-2017). Erosi itu telah mendatangkan distorsi kebangsaan melalui antagonisme primordial terhadap bangunan keindonesiaan (Rumah Bhineka Tunggal Ika).

Secara umum, setidaknya ada tiga alasan utama erosi ideologis kebangsaan sebagai ideologi dan filsafat berbangsa Indonesia. *Pertama*, pengaruh dunia internasional. Pasca perang dingin, paradigma politik dunia bergeser pada adanya simpati bagi kemunculan negara-negara berdasar etnis, seperti halnya terjadi pada negara-negara kecil pecahan Yugoslavia atau Uni Soviet. *Kedua*, runtuhnya rezim Orde Baru yang selama ini merancang pengekangan ketegangan etnis dan agama, sehingga kala rezim ini runtuh maka untuk mengisi kekosongan muncullah ekspresi identitas etnis yang telah lama dibungkam, dan adakalanya melibatkan kekerasan. *Ketiga*, munculnya antagonisme primordial pasca Orde Baru sebagai cerminan ketidakpuasan, pencerabutan, serta peminggiran sosial-ekonomi karena penyempitan dan pengetatan ruang nasional (Elson, 2008: 425-6). Erosi ideologi kebangsaan, serta kemunculan dan penguatan budaya destruktif melalui penguatan identitas lokal bersifat etnis pasca runtuhnya rezim Suharto (1999) membuat proyek nasionalisme menjadi terhambat/mangkrak. Padahal proyek nasionalisme merupakan program tanpa akhir. Skema di bawah ini dapat menjelaskan distorsi nasionalisme atau gagalnya proyek keindonesiaan karena pergerakan budaya destruktif/ antagonisme primordial.

Gambar skema gagalnya proyek nasionalisme



## *Memperkuat Komitmen Keindonesiaan di Era G. 4.0*

Dalam prosesnya, “kebangsaan Indonesia” itu tidak dilalui dengan mudah. Perdebatan, pertikaian, pengorbanan fisik dan psikologis selalu saja dilalui. Nasionalisme telah mengalami tantangan sejak awal, mulai dari pembentukan arah nasionalisme, pembentukan negara kesatuan dan juga dalam mengisi kemerdekaan, tantangan kebangsaan itu selalu datang silih berganti. Pasca proklamasi kemerdekaan tahun 1945, perjuangan mempertahankan kemerdekaan dilewati melalui dua agresi militer, yaitu pada 1947 dan 1948. Selain itu pertarungan ideologis dan pemberontakan meletus di berbagai tempat. Begitu juga sikap separatis yang tidak henti-hentinya adalah bahagian proses kebangsaan yang tidak bisa dihindari.

Dalam kaitan dengan “kebangsaan Indonesia”, Audrey Kahin menyatakan bahwa sumbangan etnik Jawa dan Minangkabau adalah sangat penting dalam membentuk keindonesiaan. Dialektika kedua etnik ini akan menentukan ke mana arah bangsa ini ke depan. Uniknya Minangkabau, walaupun penduduknya hanya sekitar dua juta jiwa sebelum Indonesia merdeka namun mereka menyumbangkan sangat banyak tokoh-tokoh pergerakan di tingkat nasional. Gagasan dari etnik Minangkabau sangat menarik menurut Kahin, “Minangkabau menyumbangkan sistem yang lebih egaliter dan desentralistik dan menciptakan ketegangan yang dinamis. Sistem Minangkabau ini sangat penting dalam menata ketatanegaraan yang feodalistik” (Kahin, 2005).

Namun periode pasca perang, 1945-1949, menjadi era baru bagi masyarakat Minangkabau. Hampir semua para tokoh-tokoh pemikir dan aktivis kebangsaan periode 1920an dan 1930an hijrah ke Jakarta/ Jawa. Mereka berkiprah lebih banyak dalam tataran nasional, sebagai menteri, pejabat republik, bahkan wakil presiden atau perdana menteri. Meski demikian, generasi intelektual baru

Minangkabau bertumbuh dengan pemikiran dan orientasi baru mereka melalui berbagai karya-karya. Maka dari itu, makalah ini berusaha mengonstruksi seperti apa keindonesiaan yang terbentuk Sumatera Barat pasca kolonial itu? Penulisan ini mencoba memahami keindonesiaan yang tumbuh dalam alam imajinasi intelektual orang Minangkabau yang tinggal di Sumatera Barat, sehingga bisa menjabarkan alam pemikiran keindonesiaan pasca generasi Hatta *cs* yang hijrah ke Jakarta pada akhir perang.

### **Realitas sosio-historis**

Periode 1950an dalam kajian historiografi Indonesia modern merupakan salah satu era yang sering disalahtafsirkan. Periode ini cenderung membenarkan konsep sejarah sebagai politik masa lalu. Hampir seluruh historiografi yang lahir membahas periode ini menjabarkan persoalan politik Indonesia pasca kolonialisme (McVey, 1994; Feith, 1962; Benda, 1982; Anderson, 1972, Kahin, 1952). Selain itu, periode 1950an memang “sibuk” dengan persoalan politik nasional, mulai dari persoalan siapa yang menjadi walikota, bupati, gubernur pasca aparat sipil Belanda (NICA) meninggalkan Indonesia sampai debat dasar negara yang didahului dengan Pemilu serta terpilihnya anggota Konstituante yang bertuga merumuskan konstitusi baru. Pertikaian di antara partai politik dalam menguasai lembaga-lembaga kekuasaan negara menjadi bagian dari “drama sejarah” periode 1950an.

Pada konteks kehidupan lain, bidang ekonomi misalnya, Indonesia tengah menyelesaikan persoalan utang yang dibebankan Negara Belanda sebagai bagian perjanjian dalam Konferensi Meja Bundar (KMB). Sementara pada tataran mikro, pemerintah direpotkan berbagai urusan menyangkut gaji pegawai, pencetakan uang yang bersifat nasional, dan perlunya investasi dari dalam dan luar negeri. Kondisi ekonomi pasca perang yang morat-marit,

## *Memperkuat Komitmen Keindonesiaan di Era G. 4.0*

ditambah luasnya partai-partai politik ikut campur dalam urusan pemerintahan dan perekonomian berpuncak pada usaha nasionalisasi semua perusahaan-perusahaan asing di Indonesia.

Dua realitas historis di atas telah mengaburkan esensi perjuangan pergerakan nasional yang dirintis pada periode kolonial. Keindonesiaan sebagai mozaik pergerakan dimulai dari “kecacatan”. Cacat keindonesiaan itu bermula ketika organ perjuangan melalui gerakan intelektual melalui dunia pendidikan ditelikung melalui proses rekolonialisasi. Rekolonialisasi dunia pendidikan itu terjadi ketika sistem dan bentuk pendidikan era kolonial diadopsi dan “dinasionalisasi”. Jadi sekolah-sekolah bentukan kaum pergerakan sebagai anti-tesis hegemoni pengetahuan kolonial justru “diswastanisasi”. Mereka hidup di luar perhatian negara-bangsa yang telah mewujudkan pada 1950 itu. Padahal sejak 1950 itu menjadi awal berfungsinya “jembatan emas” kemerdekaan yang akan mengantarkan seperti apa negara dan bangsa Indonesia dibentuk dan berhakikat (Vikers, 2008).

### **Dari Wacana ke Pemberontakan**

Sumatera Barat sejak awal sampai akhir 1950 menghadapi periode sejarah yang penuh kemelut, dilema, dan ironi. Sumatera Barat yang kala itu tergabung dalam provinsi Sumatera Tengah bergelut dengan persoalan pemisahan daerah seperti Riau dan Jambi. Orang-orang Riau dan Jambi merasa orang-orang Minangkabau sejak zaman kolonial menguasai segala lini kehidupan mereka, terutama dalam dunia politik (Asnan (ed), 2006).

Bagi orang Minangkabau sendiri era 1950 menjadi awal implementasi ide-ide modernitas mereka yang telah terbentuk beberapa dekade sebelumnya. Bagi mereka demokrasi adalah bagian penting membentuk Indonesia modern pasca kolonial.

Maka dari itu, wacana-wacana akan demokrasi, otonomi, dan kebebasan berpendapat mendapat tempat dalam berbagai media diskusi kala itu, termasuk dalam surat kabar seperti *Haluan*, *Semi*, dan lain-lain. Setidaknya ada tiga wacana yang berkembang sepanjang 1950an, yakni terkait reformasi adat, negosiasi pemikiran Islam, dan modernitas kebangsaan dalam Indonesia merdeka. Wacana-wacana itu tampak dalam berbagai tulisan di media cetak, dan buku-buku yang terbit di awal 1950. *Haluan* sebagai media cetak paling berpengaruh kala itu di Sumatera Tengah mengambil peran penting mensosialisasikan negosiasi ketiga tema besar itu yang tampak pada artikel opini yang didimuatnya. *Haluan* menjadi arena polemik dan sosialisasi pemikiran-pemikiran negosiatif modernitas, adat, dan Islam (Asnan (ed), 2006).

Wacana dan polemik atas demokrasi muncul di *Haluan* pada bulan April 1950 (Asnan (ed), 2006: vii-viii). Pada penerbitannya bulan April, *Haluan* membuka ruang diskusi yang intens menyangkut representasi Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Tengah (DPRST) yang kala itu diisi berbagai partai politik dengan ideologi beragam, seperti Islam yang diwakili Masyumi, PSII, Perti, NU, dan sebagainya; nasionalis oleh PNI, komunis oleh PKI dan PKI Lokal Islami, sosialis oleh PSI, serta adat oleh MTKAAM. Dalam konteks modernitas, selain demokrasi, wacana yang berkembang dalam wacana dan perdebatan di Sumatera Barat pada 1950an adalah menyangkut otonomi daerah atau desentralisasi yang dipersonalisasi melalui penolakan Gubernur Ruslan Mulyohardjo yang dianggap mewakili pusat yang Jawa. Keberadaan gubernur Jawa dianggap menganggangi eksistensi intelektual daerah yang telah “bertungkus lumut” mempertahankan republik di waktu perang. Namun sentimen “anti-Jawa” itu tidak didasarkan pada emosi kultural, tapi kesadaran intelektual bahwa

## *Memperkuat Komitmen Keindonesiaan di Era G. 4.0*

orang Minangkabau sejak masa kolonial menguasai alam pemikiran dan realita masyarakat Sumatera Tengah, baik sebagai guru atau pegawai pemerintah. Maka keberadaan Gubernur Ruslan Mulyohardjo sebagai acting gubernur seakan menafikan peran kaum intelektual Minangkabau yang turut merumuskan dan memperkaya ide-ide keindonesiaan pada 1920an-sampai akhir perang.

Otonomi menurut Nasrun, “intelektual darek” pada 1950an, itu merupakan sebuah dasar susunan ketatanegaraan. Otonomi adalah sifat utama dari nilai-nilai keindonesiaan (Asnan (ed), 2006: 4-5). Indonesia bukan warisan satu kekuasaan terpusat, seperti Majapahit atau Sriwijaya, meski dalam catatan sejarah kedua politik dominan itu dibentuk dari pelbagai otonomi-otonomi kultural yang terikat melalui perang atau diplomasi. Maka ketika negara-bangsa dibentuk di awal 1950, Indonesia sebagai produk modernitas tidak bisa menghilangkan wilayah-wilayah otonom yang memiliki akar historis dan kultural yang telah mapan sejak ratusan tahun lalu. Otonomi dalam sifat keindonesiaan berarti memberi ruang *swapraja* pada daerah-daerah otonomi berdasarkan etnis pre-Indonesia. Pada masyarakat Minangkabau, otonomi itu menurut kaum “intelektual darek” ada pada nagari. Nagari bagi orang Minangkabau adalah eksistensi, waris, dan ekspresi. Namun dalam perjalanannya, nagari justru dikerdilkan dan pemerintah pusat kehilangan pedoman dan melupakan janji otonomi dalam konstitusi (Alisjahbana, 1957: 8).

“Bukan sadja djandji akan memberi autonomi, seperti djelas dikemukakan oleh pasal 131 Undang<sup>2</sup> Dasar kita itu tidak kita penuhi, tetapi kitapun telah menjalah gunakan sembojan<sup>2</sup> kesatuan untuk memuaskan ber-matjam<sup>2</sup> egoismus, jaitu nafsu kekuasaan dan nafsu kehartaan, nafsu kedudukan...pemusatan pemerintahan

Indonesia telah mengikuti jalan yang sama dengan sentralismus pemerintahan pendjadjahan Belanda” (Alisjahbana, 1957: 8-9).

Pidato Mr.St. Takdir Alisjahbana dalam Kongres Adat Sumatera di Bukittinggi pada 12-20 Maret 1957 di atas merupakan pernyataan keras atas pentingnya peran adat, terutama tradisi Minangkabau dalam negara modern Indonesia. Hamka dalam *Haluan* (April, 1951) dari awal sudah menyampaikan budaya Indonesia yang tengah dikembangkan tidak berdasar pada satu tradisi, seperti Jawa atau Sunda. Kebudayaan Indonesia mesti berjejak dalam kebudayaan lokal yang hidup lama di berbagai belahan bumi pertiwi (Asnan (ed), 2006: 137).

Adat Minangkabau pada 1950an adalah tradisi dan nilai-nilai yang jauh berkembang sebagai hasil negosiasi dengan Islam dan modernitas. Adat Minangkabau itu dianggap adat modern bagi manusia Indonesia modern (Andoni, 2016d). Untuk itu, eksistensi nagari dan adat Minangkabau dalam sistem otonomi yang dipinta kaum “intelektual darek” pada awal 1950an merupakan tawar yang tidak bisa ditolak. Namun persoalan menjadi pelik ketika tuntutan kultural dan intelektual itu direspon reaktif-politis oleh pemerintah pusat, juga militer yang melahirkan pemberontakan PRRI pada akhir 1950an.

Selain wacana-wacana yang berdampak pada aksi militer pada akhir 1950an, konstruksi keindonesiaan itu juga berjalan pada tataran kultural, dalam bentuk penerbitan buku-buku tentang tradisi dan budaya Minangkabau. Budaya Minangkabau bagi para penulisnya merupakan identitas yang memperkaya keindonesiaan, tapi lebih dari itu sebagai warisan dunia modern yang diperjuangkan sejak awal abad ke-20. Pada 1950an terbit buku-buku bertopik Minangkabau. Buku-buku itu misalnya, Nj. Limbahk Tjahaja, *Minangkabau Tanah Adat* (NV. Ganaco, 1955), Ahmad Dt.

## *Memperkuat Komitmen Keindonesiaan di Era G. 4.0*

Batuah dan A. Dt. Madjoindo, *Tambo Minangkabau* (Jakarta: Balai Pustaka, 1956), dan sebagainya.

### **Kesimpulan**

Sejarah mentalitas dan kultur elite modern Minangkabau pasca kemerdekaan menunjukkan idetentang Indonesia sebagai simbol bangsa baru bukanlah suatu yang imajiner. Sebagai simbol pembentukan bangsa baru, diksi Indonesia muncul dari jaringan intelektual yang mereka bangun dengan elite kota lain yang memiliki kedekatan kedaerahan atau etnis sejak 1920an. Indonesia awalnya bagi mereka merupakan jawaban kultural terhadap delegitimasi modernitas yang ditawarkan negara kolonial di akhir tahun 1920an. Namun para elite modern Minangkabau tidak memahami sepenuhnya perubahan yang terjadi ketika diksi Indonesia itu dilekatkan nilai-nilai ideologis dan politis oleh kalangan nasionalis yang ada di tingkat nasional sepanjang periode 1950an.

Indonesia menurut “elite baru” Minangkabau di daerek itu adalah dunia kemajuan baru, dan bangsa sebagai pengejawantahan dari pemilik Indonesia itu adalah entitas rakyat yang memiliki kebebasan menjadi orang modern. Maka dari itu, menurut para “intelektual darek”, identitas keindonesiaan belum selesai dinegosiasikan karena mesti memilih apa yang terbaik yang disediakan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat kala itu, yakni antara Islam, adat, dan Barat atau sosialisme. Ketika negosiasi itu mengalami jalan buntu karena Indonesia menjadi produk politik (negara) dalam pemahaman elite republik di akhir tahun 1950an, maka mereka menyatakan ketidaksepakatan mereka dan mengambil jalan lain dengan mendirikan PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia).

Namun PRRI juga merupakan hasil kegagalan “intelektual darek” menginternalisasi nilai-nilai keindonesiaan yang cenderung

politis daripada kultural yang melandasi struktur kekuasaan baru pasca hancurnya negara kolonial. Mereka menjadi kelompok yang gamang terhadap nasionalisme Indonesia yang telah digeser sebagai sebuah produk politik daripada produk modernitas sebagaimana dicita-citakan di awal perjuangan mereka. “Intelektual darek” Minangkabau menganggap indonesianisasi negara sebagai cangkang modernitas baru yang mereka perjuangkan telah gagal. Bagi mereka juga, PRRI adalah simbol perubahan dan dunia baru, selain perjuangan melawan struktur hegemoni kolonial yang disimbolkan dengan “Jakarta sebagai neo-Batavia”.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### **Artikel Jurnal**

- Curaming, R. A., Review of Unfinished Nation, Max Lane. London: Verso, *Journal of Southeast Asian Studies*, Vol. 42, No.1, 2011, pp. 176-178.
- Farabi Fakhri, 2015. “Reading Ideologi in Indonesia Today”. *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, 171, 347–363.
- Kaufmann, Eric,. 2017. “Complexity and Nationalisme”. *Nations and Nationalism*, 23 (1), pp, 6–25.
- Reid, Anthony,. 1985. “Review: Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. by Benedict Anderson Reviewed Work: Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. by Benedict Anderson”, *Pacific Affairs*, Vol. 58, No. 3, pp. 497-499.
- Schefold, R. 1998. “The domestication of culture; Nation-building and ethnic diversity in Indonesia”, *In: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Globalization, localization and Indonesia 154* (1998), no: 2, Leiden, 259-280

## *Memperkuat Komitmen Keindonesiaan di Era G. 4.0*

### **Artikel online, Buku, Makalah**

- Djawatan Penerangan. 1958. *Ichtsar Tjataan Penting di Sumatera Barat Bulan Agustus 1958*.
- Kementerian Penerangan RI. 1950. *Tempo dan Peristiwa Politik: Ichtsar Chronologis*.
- Ahmad Dt. Batuah, A. Dt. Madjoindo. 1956. *Tambo Minangkabau*. Djakarta: Balai Pustaka.
- <http://obsessionnews.com/kritik-untuk-saya-indonesia-saya-pancasila/>
- Brass,**
- Paul R. 1991. *Ethnicity and Nationalism: Theory and Comparison*, Newbury Park, Calif: Sage Publication.
- Chalterjee, Partha., 1990. "The Nationalist Resolution of the Women's Question", in Kumkum Sangari and Sudesh Vaid (eds.), *Recasting Women: Essays in Colonial History* (New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.
- Gusti Asnan (ed). 2006. *Demokrasi, Otonomi, dan Gerakan Daerah*. Padang: Citra Budaya Indonesia.
- Kahin, Audrey., 2005. *Dari Pemberontakan ke Integrasi Sumatera Barat dan Politik Indonesia 1926-1998*. (Terj. Azmi dan Zulfahmi), Jakarta: YOI. hal. xxx.
- NJ. Limbak Tjahaja. 1955. *Minangkabau Tanah Adat*. Jakarta: NV. Ganaco.
- Sartono Kartodirdjo. 1992. *Pendekatan Ilmu-Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, Jakarta: Gramedia.
- S. Takdir Alisjahbana. 1957. "Perdjuangan untuk Autonomi dan Kedudukan Adat Didalamnja". *Pidato Pada Konggres Adat Sesumatera*.
- Vickers, Adrian. 2008. "Mengapa tahun 1950an penting bagi kajian Indonesia", dalam Henk Schulte Nordholt, Bambang

Purwanto, Ratna Saptari (ed). *Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia*. Jakarta: KITLV-Obor, hlm. 67-78.

Yudhi Andoni. 2015. *Ontologi Waktu*, Padang: Labor Sejarah.

\_\_\_\_\_. 2016a. *Jaringan Kebangsaan Antar-Nusa*, Padang: Labor Sejarah.

\_\_\_\_\_. 2016b. *Kegelisahan di Zaman yang Berubah*, Padang: Arthapurna Persada.

\_\_\_\_\_. 2016c. "Keindonesiaan dan Gerakan Kemajuan: Elit Tradisi Modernis Minangkabau di Awal Abad ke-20", *Makalah Penelitian*, Seminar Nasional 71 Indonesia Merdeka, Padang: MSI Sumbar.

\_\_\_\_\_. 2016d. "Mencipta Doenia Madjoe: Peta Jaringan Kebangsaan Orang Minangkabau di Tiga Kota Sumatera Barat Masa Kolonial", *Laporan Penelitian*, Padang: FIB Unand.

\_\_\_\_\_. 2016e. "Cupak dipapek urang manggaleh, Jalan dialiah urang lalu: Gagalnya "Ideologi" Keindonesian", *Jurnal Didaktika*, Edisi 2, Juli-Desember.

\_\_\_\_\_. 2012. "Antara Menjadi Urang Awak dan WNI: Perumnas dan Etnis Turunan Tionghoa di Kota Padang", *Laporan Penelitian Lapangan*, Kampung Percik, Salatiga.

\_\_\_\_\_. dkk. 2013. "Reproduksi Lokalitas dalam Kontestasi Budaya", *Laporan Penelitian*, Yogyakarta: FIB UGM.

\_\_\_\_\_. 2010. "Keindonesiaan, Modernisasi, dan Globalisasi: Komunitas Adat dalam Tantangan dan Peluang Perubahan Bagi Masa Depan", *Penelitian Mandiri*, Padang: Jurusan Sejarah Unand.

ISBN 978-402-72301-4-3



9 786027 230163